



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS *BEST PRACTICE*
PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(STUDI PADA RELOKASI PEDAGANG
KAKI LIMA MONUMEN '45 BANJARSARI KE
PASAR KLITHIKAN NOTOHARJO KOTA SURAKARTA)**

SKRIPSI

**RATNA PERTIWI
0806397130**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS *BEST PRACTICE*
PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(STUDI PADA RELOKASI PEDAGANG
KAKI LIMA MONUMEN '45 BANJARSARI KE
PASAR KLITHIKAN NOTOHARJO KOTA SURAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

**RATNA PERTIWI
0806397130**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
JUNI 2012**

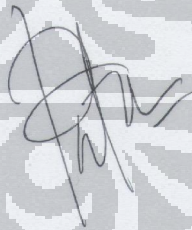
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ratna Pertiwi

NPM : 0806397130

Tanda Tangan :



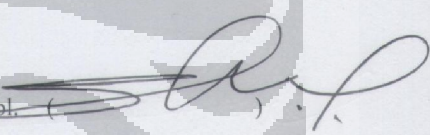
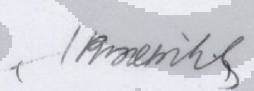
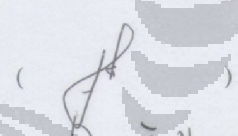
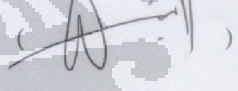
Tanggal : 03 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Ratna Pertiwi
NPM : 0806397130
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Analisis *Best Practice* Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Eko Prasajo Mag. rer. Publ. ()
Penguji : Dra. Sri Susilih, M.Si ()
Ketua Sidang : Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si ()
Sekretaris Sidang : Murwendah, S.IA ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 03 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan dan kekuatan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, meski kadang kala lupa kepada-Nya saat penulis terlalu sibuk dengan penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung, kepada :

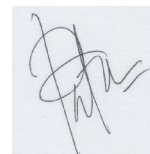
1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono M. Sc selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si selaku Ketua Program Sarjana Reguler dan Kelas Paralel Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
3. Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag. rer. Publ. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran ditengah-tengah kesibukannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Tetaplah menginspirasi, Profesor.
4. Drs. Afiati Indri Wardani, M.Si selaku dosen pembimbing akademis penulis selama empat tahun ini.
5. Dra. Sri Susilih, M.Si selaku penguji ahli saat sidang skripsi. Terima kasih telah memberi banyak masukan dan perbaikan untuk skripsi ini.
6. Mamah dan Bapak yang selalu memberikan dukungan serta kasih sayangnya yang tidak pernah bisa terbalas oleh apapun yang menjadi motivasi terbesar dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Nini, Aki, Teteh dan Aziz, yang juga selalu memberikan segala daya dan upayanya untuk selalu mendukung dan menguatkan penulis saat mengerjakan skripsi ini.
8. Mbak Desy Hariyati yang juga telah menyediakan beberapa kali pertemuan untuk ikut serta membantu mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Pihak-pihak yang terkait pada saat penulis studi lapangan di Kota Surakarta, Bapak Didik, Ibu Sunarti, Bapak Joko, Bapak Nanang, Bapak Sudarmo, Bapak

Murdi, Bapak Sukatno dan Mas Mukhlis yang menjadi narasumber yang ramah dan murah informasi kepada penulis. Juga pihak-pihak yang memberikan informasi tambahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

10. Albertus Nirwanto, teman satu perjuangan yang sama-sama melakukan studi lapangan di Kota Surakarta. Terima kasih atas semua bantuannya selama di Solo.
11. A Banu, Mbak Nia, dan si kecil Zahra yang juga ikut memotivasi pada saat penyusunan skripsi ini.
12. Chacha, Nuri, dan Widia yang sudah menjadi sahabat terbaik penulis hampir 1 dekade dalam perjalanan hidup penulis. Juga kepada teman-teman AC 11 lainnya, Ami, Sherin, Santri, Ajeng, Priska, Ina dan Uji.
13. Dede, Dicit, Hesti, Risna yang sudah menemani 4 tahun perjalanan perkuliahan di kelas dan kebersamaannya untuk saling memotivasi saat menyusun skripsi. Terima kasih juga kepada Deviyanto The Dlava yang selalu menemani penulis dalam lika-liku pengerjaan skripsi, teman berdiskusi dan melepas penat saat mengerjakan skripsi dan pemantik semangat demi mengejar harapan untuk dapat wisuda bersama-sama pada semester ini.
14. Puyol dan Markicol yang menjadi penyemangat terakhir dalam *finishing touch* skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu hingga selesainya skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat banyak dan memberikan ilmu tambahan bagi yang membaca. Semoga penulis dapat kembali melakukan penulisan-penulisan lainnya yang lebih baik lagi untuk kedepannya.

Depok, 21 Juni 2012



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Pertiwi

NPM : 0806397130

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis *Best Practice* Pengelolaan Pedagang Kaki Lima
(Suatu Studi Pada Relokasi PKL Monumen '45 Banjarsari
ke Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta)**

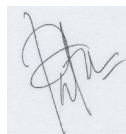
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 03 Juli 2012

Yang menyatakan,



(Ratna Pertiwi)

ABSTRAK

Nama : Ratna Pertiwi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Analisis *Best Practice* Pengelolaan Pedagang Kaki Lima
(Studi Pada Relokasi PKL Monumen '45 Banjarsari ke Pasar
Klithikan Notoharjo Kota Surakarta)

Pengelolaan pedagang kaki lima seringkali menjadi masalah bagi pemerintah saat pelaksanaan programnya. Seringkali terjadi konflik antara pemerintah dan pedagang yang menjadi sasaran. Namun ternyata Pemerintah Kota Surakarta mampu merelokasi 989 pedagang kaki lima di Monumen Banjarsari ke Pasar Notoharjo tanpa kekerasan. Selain mendapat banyak pandangan positif dari berbagai pihak, tentu saja hal tersebut menjadi *benchmarking* bagi pemerintah daerah lainnya. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penerapan konsep *best practice* didalam relokasi tersebut dengan menganalisis unsur-unsur dari *impact*, *partnership*, *sustainability*, *leadership* dan *transferability*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak yang terkait. Kesimpulan hasil yang didapatkan adalah hampir semua unsur yang menjadi landasan analisis sudah baik dan positif, meskipun ada beberapa hal yang masih kurang dan menjadi masukan kepada Pemerintah Kota Surakarta.

Kata Kunci : relokasi, pedagang kaki lima, *best practice*.

ABSTRACT

Name : Ratn Pertiwi
Major : Public Administration
Title : *Best Practice* Analys to Management Street Vendors Program.
(Study of Relocation Street Vendors at Monumen '45 Banjarsari
to Notoharjo Market Surakarta)

Management of street vendors is often a problem for the government when implementation of the program. Often there is a conflict between the government and the merchants who were targeted. But the Surakarta's Government was able to relocate 989 street vendors in Banjarsari Monument to Notoharjo Market without violence. In addition to their many positive views of various parties, of course it became a benchmark for other local governments. This study wanted to know how the application of the concept of best practice in relocation by analyzing the elements of impact, partnership, sustainability, leadership and transferability. Data was collected through in-depth interviews to interested parties. The conclusion results obtained are almost all the elements on which the analysis is good and positive, although there are some things that are lacking and to advise the Government of Surakarta.

Key Words : relocation, street vendors, best practice.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Signifikansi Penulisan.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB 2 KERANGKA TEORI.....	10
2.1 Tinjauan Pustaka.....	10
2.2 Konstruksi Model Teoritis.....	15
2.2.1 Reformasi Administrasi.....	14
2.2.2 Inovasi.....	18
2.2.3 <i>Best Practice</i>	21
2.3 Operasionalisasi Konsep.....	24
2.3.1 Dimensi <i>Impact</i>	24
2.3.2 Dimensi <i>Partnership</i>	25
2.3.3 Dimensi <i>Sustainability</i>	26
2.3.4 Dimensi <i>Leadership</i>	26
2.3.5 Dimensi <i>Transferability</i>	27
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Pendekatan Penelitian.....	30
3.2 Jenis Penelitian.....	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.4 Teknik Analisis Data.....	31
3.5 Narasumber/Informan.....	32
3.6 Proses Penelitian.....	32
3.7 Penentuan Lokasi Penelitian.....	34
3.8 Batasan Penelitian.....	35
BAB 4 GAMBARAN UMUM.....	36
4.1 Gambaran Umum Kota Surakarta.....	36

4.2	Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta.....	39
BAB 5	ANALISIS <i>BEST PRACTICE</i> RELOKASI PKL MONUMEN BANJARSARI KE PASAR NOTOHARJO.....	44
5.1	Pelaksanaan Relokasi PKL Monumen '45 Banjarsari ke Pasar Notoharjo.....	44
5.2	Analisis Konsep <i>Best Practice</i>	50
5.2.1	Dimensi <i>Impact</i>	50
5.2.2	Dimensi <i>Partnership</i>	57
5.2.3	Dimensi <i>Sustainability</i>	63
5.2.4	Dimensi <i>Leadership</i>	68
5.2.5	Dimensi <i>Transferability</i>	72
5.3	<i>Lesson Learned</i>	74
BAB 6	SIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	76
6.1	Simpulan.....	76
6.2	Rekomendasi.....	76
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

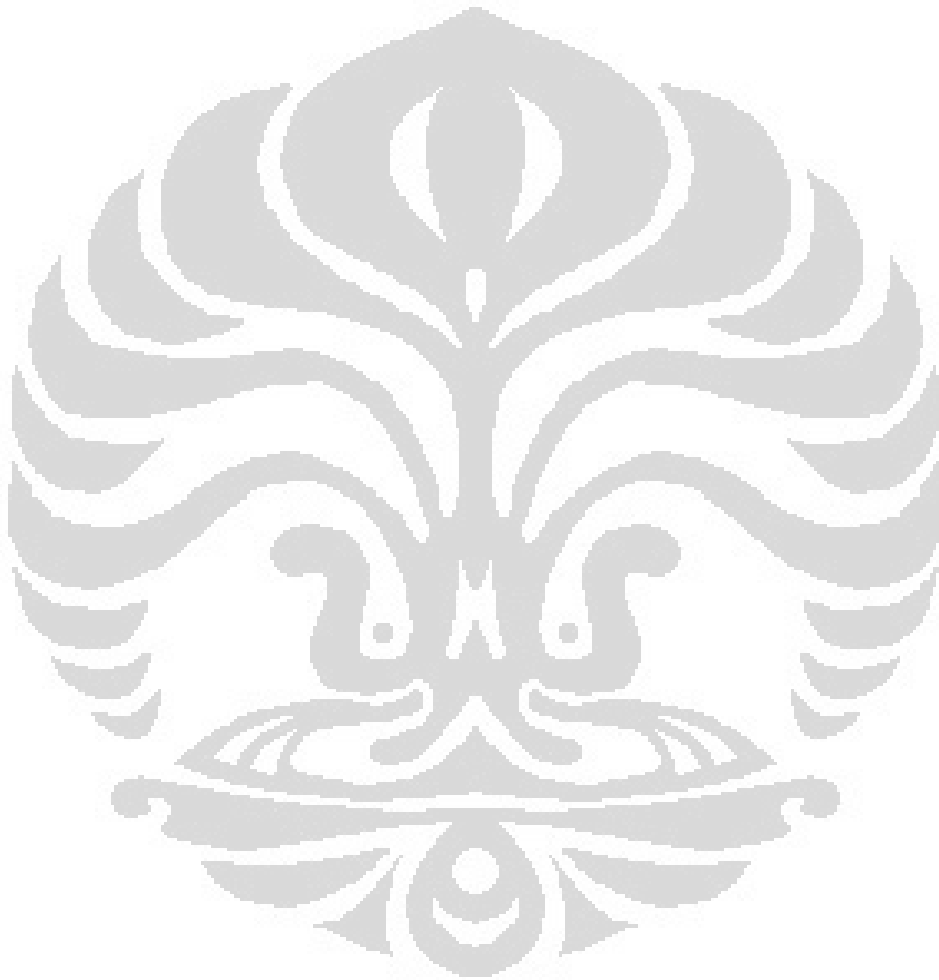
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	14
Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep.....	29
Tabel 4.1 Laju Pertumbuhan Kota Surakarta 2000-2010.....	37
Tabel 4.2 Banyaknya Penduduk menurut Mata Pencaharian di Kota Surakarta 2010.....	38
Tabel 4.3 Banyaknya Penduduk 5 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Surakarta 2010.....	38
Tabel 4.4 Penataan PKL Kota Surakarta.....	40
Tabel 4.5 Shelter PKL Kota Surakarta.....	43
Tabel 5.1 Kontribusi Pedagang Pasar Notoharjo Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.....	51



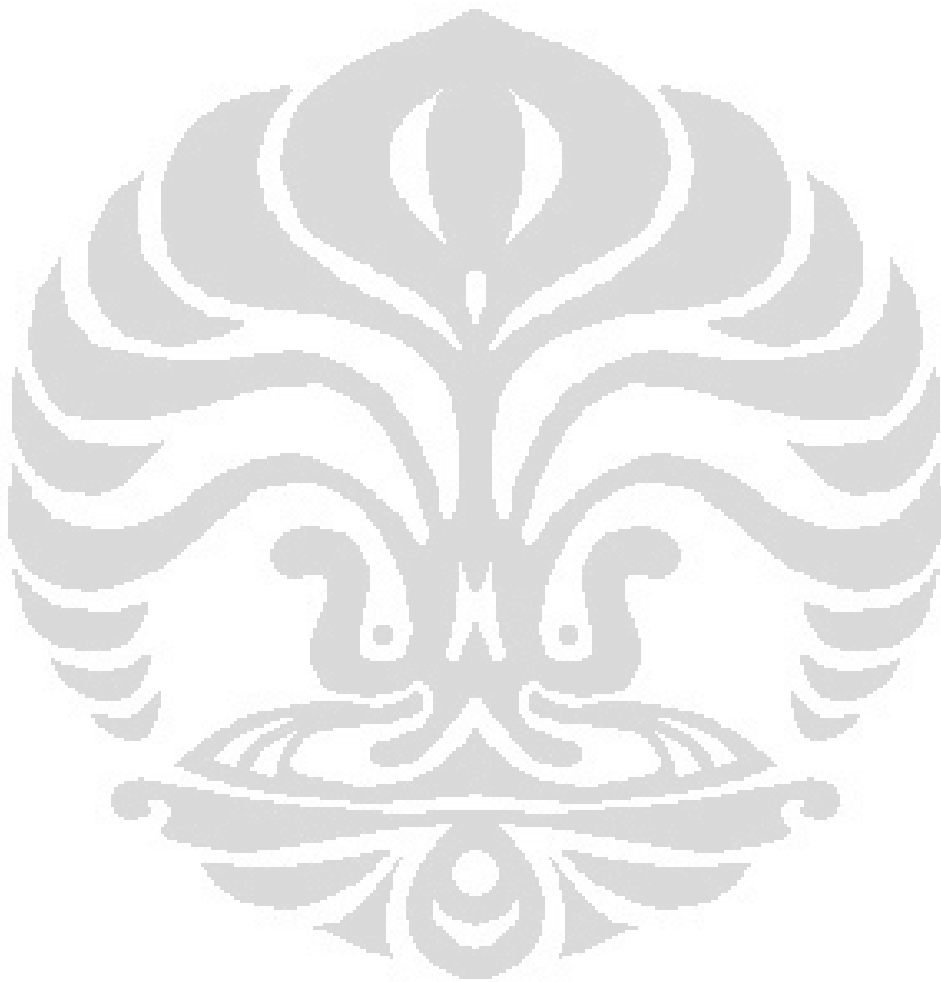
DAFTAR GAMBAR

Gambar Hubungan Antar Komponen.....	21
Gambar Konsep Penataan PKL.....	41
Gambar 5.1 Tahapan Penanganan Masalah PKL.....	48
Gambar 5.2 Kondisi Monumen '45 Banjarsar Sebelum Relokasi.....	55
Gambar 5.3 Kondisi Monumen '45 Banjarsari Setelah Relokasi.....	56



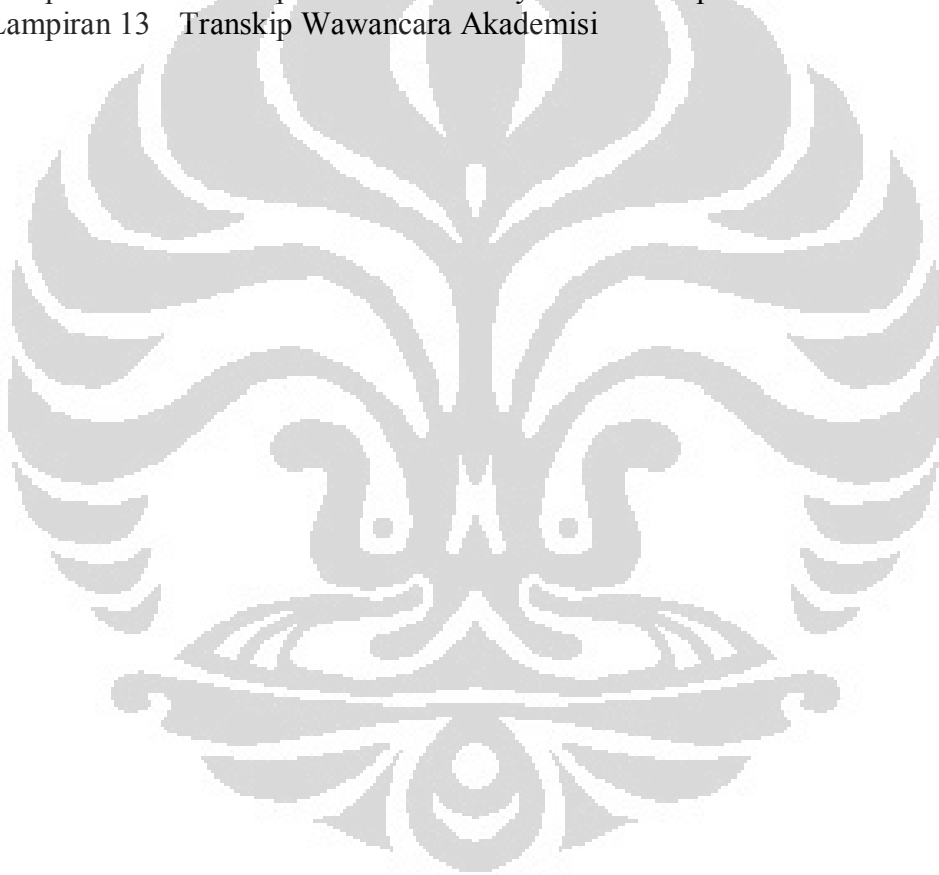
DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1 Pertumbuhan Kontribusi Pasar Notoharjo Terhadap Pemasukan Asli Daerah Kota Surakarta.....	52
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Gambar Pasar Notoharjo
Lampiran 2	Pedoman Wawancara Dinas Pengelolaan Pasar
Lampiran 3	Pedoman Wawancara Kepala Pasar Notoharjo
Lampiran 4	Pedoman Wawancara Satpol PP
Lampiran 5	Pedoman Wawancara Pedagang Kaki Lima
Lampiran 6	Pedoman Wawancara Masyarakat Setempat
Lampiran 7	Pedoman Wawancara Akademisi
Lampiran 8	Transkrip Wawancara Dinas Pengelolaan Pasar
Lampiran 9	Transkrip Wawancara Kepala Pasar Notoharjo
Lampiran 10	Transkrip Wawancara Satpol PP
Lampiran 11	Transkrip Wawancara Pedagang Kaki Lima
Lampiran 12	Transkrip Wawancara Masyarakat Setempat
Lampiran 13	Transkrip Wawancara Akademisi



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah penataan ruang wilayah di Indonesia terutama di wilayah perkotaan masih dianggap sulit untuk ditemukan solusinya. Hal ini mengacu kepada kurangnya dukungan masyarakat yang secara langsung terlibat dalam proses penataan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Penertiban kawasan-kawasan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan kerap mengundang konflik yang sering mewarnai eksekusi yang dilakukan oleh para Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di masing-masing daerah. Hal ini menjadi sebuah paradoks, ketika pada satu sisi pemerintah menginginkan ketertiban umum demi kepentingan bersama, tetapi pihak-pihak pada sisi lain yang mempunyai kepentingan, tidak mendukung proses penertiban tersebut.

Seperti yang dikutip oleh Dirjen Penataan Ruang Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Presiden Republik Indonesia dalam sambutannya pada saat Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional di Surabaya menegaskan beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional (penataanruang.net, 2011), yakni :

- a) terjadinya konflik kepentingan antar-sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya,
- b) belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor tadi,
- c) terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan,
- d) belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam RTRWN,
- e) belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang, serta

- f) kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan.

Permasalahan yang sering ditemukan dalam penataan ruang wilayah adalah pedagang kaki lima, dimana hal ini sudah menjadi sangat kronis bagi perkotaan, karena perkotaan dianggap mampu menciptakan lapangan usaha kecil-kecilan yang menjanjikan untuk sekedar bertahan hidup di dalam persaingan yang semakin ketat seperti sekarang ini. Para pejabat kota dan kaum elit lokal yang lain biasanya memandang pedagang kaki lima sebagai gangguan yang membuat kota menjadi kotor dan tidak rapi, menyebabkan kemacetan lalu lintas, pembuangan sampah di sembarang tempat, gangguan para pejalan kaki, saingan pedagang toko yang tertib dan membayar pajak, serta penyebaran penyakit lewat kontak fisik dan penjualan Kemudiannan yang kotor dan basi (Manning, 1996).

Sektor informal termasuk PKL, menurut Hernando De Soto (2006), merupakan kelompok yang memiliki aset besar. Kalkulasi De Soto menyebutkan aset sektor informal di dunia ketiga 20 kali lebih besar dari aliran investasi asing dan 90 kali lebih banyak dari bantuan asing dalam 30 tahun terakhir ini. Kekayaan yang dimiliki kaum miskin melebihi yang diberikan negara maju. Upaya pengembangan sektor informal akan dapat membangkitkan ekonomi. Sebaliknya, keterpurukan sektor informal bukan saja merugikan sektor informal, tetapi juga perekonomian negara. Kejelasan status lahan yang menjadi tempat tinggal dan lokasi usaha sektor informal, membuat sektor informal akan mampu mengatasi persoalan legalitas. Hal itu kemudian dapat dipakai sebagai salah satu jaminan mendapatkan permodalan. (soloraya.net, 2011)

Apabila dikaitkan antara pedagang kaki lima dengan rencana tata ruang wilayah perkotaan, Kemudian seperti yang sering disaksikan di televisi, banyaknya penertiban-penertiban pedagang kaki lima yang dianggap sangat mencemarkan keindahan kota diwarnai dengan kericuhan-kericuhan antara para pedagang dan Satpol PP yang sedang bertugas. Hal ini menjadi sebuah tontonan yang 'biasa' karena kepentingan para pedagang kaki lima berbenturan dengan kepentingan para Satpol PP yang ditugaskan oleh pemerintah setempat untuk menertibkan kawasan yang memang seharusnya tidak diperuntukkan pedagang kaki lima, sesuai dengan RTRW yang sudah ditetapkan oleh masing-masing

pemerintah daerah. Oleh karena itu, realisasi RTRW yang seharusnya sesuai dengan target kadang terbelenggu oleh hal-hal semacam ini, dimana masyarakat yang seharusnya mendukung segala peraturan yang bersifat kepentingan umum tetapi pada kenyataannya bersikukuh untuk bertahan dalam kondisi tersebut dengan alasan untuk bertahan hidup.

Pedagang kaki lima masuk ke dalam kelompok usaha sektor informal, karena keberadaannya tidak berdasarkan izin atau ketetapan yang diberlakukan secara legal formal oleh pemerintah setempat. Pedagang kaki lima juga masuk ke dalam ciri-ciri sektor informal yang dikemukakan oleh *International Labour Organisation* (ILO) (ilo.org, 2000), yakni (1) mempunyai ciri padat karya; (2) tingkat produktivitas yang rendah; (3) pelanggan yang sedikit dan biasanya masyarakat kurang mampu; (4) tingkat pendidikan formal yang rendah; (5) penggunaan teknologi menengah; (6) sebagian besar pekerja keluarga dan pemilikan usaha oleh keluarga; (7) gampangnya keluar masuk usaha; (8) kurangnya dukungan dan pengakuan pemerintah.

Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami permasalahan menjamurnya para pedagang kaki lima terutama di perkotaan-perkotaan. Adanya kesenjangan sosial bagi masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan menjadi pemicu banyaknya masyarakat pedesaan yang memutuskan untuk berurbanisasi dan mencari penghidupan yang layak di kota-kota besar, sehingga terjadi ketidaksesuaian jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan, sehingga banyak bermunculan para pengusaha sektor informal, seperti pedagang kaki lima. Menurut Kadir dan Biantoro dalam Alisjabana (2004:218), pedagang kaki lima selain pertumbuhan dan perkembangannya tidak teratur, tampak liar, tampak kumuh, melebar dan ada yang menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berdagang (misalnya trotoar jalan). Kehadiran PKL juga menyebabkan pengguna jalan tidak lagi merasakan kenyamanan saat berjalan karena banyak PKL yang sama sekali tidak menyisakan trotoar untuk pejalan kaki, bahkan tidak jarang pejalan kaki terganggu dengan tali-tali tenda yang diikatkan pada pembatas trotoar.

Berdasarkan data Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) (apkliindo.blogspot.com, 2011), jumlah PKL yang ada di Indonesia sebanyak 22,9

juta orang. Ini artinya, hampir 50 persen pengusaha mikro di negeri ini merupakan pengusaha yang bergerak di sektor PKL. Seharusnya pemerintah dapat memanfaatkan kondisi ini dengan memberdayakan para PKL yang jumlahnya sangat banyak ini menjadi salah satu aset yang dapat meningkatkan pendapatan, terutama pendapatan asli daerah (PAD) di daerah masing-masing.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pasca diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengundang pemerintah daerah untuk membuat berbagai program inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya dan diharapkan dengan adanya kewenangan yang diberikan secara langsung kepada pemerintah daerah, pemerintah setempat dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya sehingga dapat lebih cepat untuk berkembang dan mensejahterakan masyarakatnya. Dengan didasarkan pada UU No.32 Tahun 2004 inilah seharusnya pemerintah daerah terutama perkotaan dapat memaksimalkan pemberdayaan pedagang kaki lima sebagai aset yang mempunyai nilai lebih untuk kemajuan daerahnya, dimana pemerintah harus mempunyai cara atau inovasi agar dapat menanggulangi permasalahan pedagang kaki lima yang sudah banyak menjamur di setiap jalan-jalan perkotaan.

Permasalahan di atas ternyata ditanggapi secara positif oleh Pemerintah Kota Surakarta yang juga memiliki persoalan menjamurnya pedagang kaki lima di jalanan Kota Surakarta itu sendiri, oleh karena itu pemerintah Kota Surakarta menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Di dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa ruang lingkup Perda tersebut adalah semua kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penataan, pemberdayaan, dan pengawasan serta penertiban PKL.

Dengan adanya Perda No.3 Tahun 2008 tersebut juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Surakarta serius untuk membenahi permasalahan PKL di kotanya, termasuk memberdayakan keberadaan PKL sebagai aset untuk menambah PAD Kota Surakarta. Adapun rencana dari pengimplementasian Perda tersebut termasuk didalamnya adalah relokasi PKL ke dalam pasar yang sudah

disediakan oleh Pemerintah Kota Surakarta sehingga pengelolaan PKL menjadi lebih terkendali.

Salah satu contoh keberhasilan yang dijadikan objek penelitian ini adalah penataan pedagang kaki lima di kawasan Monumen '45 Banjarsari yang direlokasikan ke Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi. Penataan PKL di Banjarsari ini dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2006. Peristiwa tersebut merupakan suatu hal yang langka dan baru pertama kali terjadi “bedhol desa” PKL yang melibatkan pedagang kaki lima dalam jumlah kurang lebih 989 pedagang. Para PKL secara resmi meninggalkan lokasi tempat berdagang di Monumen '45 Banjarsari yang akan dikembalikan sebagai ruang publik. Para PKL direlokasi ke Pasar Klithikan Notoharjo yang dibuat secara khusus untuk penempatan pedagang kaki lima yang terkena relokasi. (solopos.com, 2011)

Saat menghadiri *Leadership Talks* yang diadakan oleh Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia Strategis (PPSDMS) Nurul Fikri Regional 1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (19 Desember 2011), Walikota Surakarta, Joko Widodo memaparkan konsep tentang relokasi pedagang kaki lima tersebut. Pada kenyataannya saat penertiban berlangsung, memang tidak mudah seperti yang selalu terjadi saat penertiban PKL berlangsung. Dengan teknik tersendiri, Joko Widodo dan Wakil Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatnoko mampu merelokasi ratusan pedagang tersebut tanpa kekerasan dan memberikan sejumlah bonus kepada PKL yang mau menempati tempat berjualan barunya di Pasar Klithikan Notoharjo berupa Surat Hak Penempatan (SHP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanpa harus membayar.

Sonya (2011) dalam hasil penelitiannya yang juga bertempat di Pasar Klithikan Notoharjo, menjelaskan bahwa saat ini Pasar Klithikan menjadi pusat perdagangan berbagai barang bekas, terutama onderdil dan aksesoris mobil dan sepeda motor, serta barang-barang elektronik. Lebih dari 1.000 kios kini berdagang di pasar tersebut dan membuka banyak akses lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar pasar. Pasar Klithikan Notoharjo juga kini menjadi penyumbang terbesar pendapatan dari retribusi pelayanan pasar, dimana setiap satu tahun pendapatan pasar ini sekitar 400 juta rupiah. Hal ini tentu menjadi sorotan publik, dimana gebrakan pemerintah Kota Surakarta ini banyak dibicarakan dan dianggap

patut dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya dalam masalah penataan PKL di masing-masing daerahnya, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu dan menggambarkan bagaimana pengelolaan PKL di Kota Surakarta ini menjadi *best practice* dengan menganalisis program pengelolaan PKL di Kota Surakarta, khususnya pengelolaan PKL dari Monumen '45 Banjarsari yang direlokasi ke Pasar Klithikan Notoharjo dengan menggunakan konsep *best practice*.

1.2 Permasalahan

Penataan PKL yang dilaksanakan oleh Pemkot Surakarta menjadi bahan pembicaraan yang hangat di setiap kalangan, karena program tersebut dinilai berhasil dalam pelaksanaannya sehingga dijadikan sebuah referensi yang dapat dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya. Hal ini diperkuat dengan banyaknya berbagai media yang memuat program penataan PKL di Kota Surakarta sebagai sebuah inovasi yang patut dijadikan *best practice* dan acap kali program ini mendapatkan pandangan dan sambutan yang positif dari berbagai pihak. Seperti yang diberitakan oleh portal resmi pemerintah Kota Surakarta (surakarta.go.id, 2011), saat Joko Widodo menjadi pembicara dalam acara yang diselenggarakan oleh Badan PBB ILO, beliau mempresentasikan Kebijakan Pemerintah di sektor ekonomi dalam hal yang berkaitan dengan relokasi PKL.

Harian Suara Karya Kota Solo juga memuat sebuah artikel (bataviase.co.id, 2011) tentang penataan PKL Kota Surakarta yang sudah mendunia sehingga dijadikan sebagai pusat pelatihan (*framing centre*) penataan bagi negara-negara Asia Pasifik. Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik yang akan menjadikan Kota Surakarta sebagai percontohan antara lain Thailand dan Kamboja. Dalam pelaksanaannya, Kota Surakarta ditunjuk oleh *United Cities and Local Governments* (UCLG) dan Pemerintah Kota Solo akan membentuk pusat PKL dan forum PKL dimana forum PKL tersebut akan dijadikan wadah bagi para PKL untuk saling bertukar pikiran dan berbicara dengan Pemkot Surakarta. Salah satu program penataan PKL yang akan dijadikan contoh adalah Pasar Klithikan Notoharjo yang dibangun Pemkot setempat untuk menampung PKL yang sebelumnya berada di area publik. Konsep penataan PKL di Surakarta akan

diterapkan di negara-negara tersebut tetapi disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing.

Konsep inovasi menurut Mulgan dan Albury (2003) sebagaimana dikutip oleh IDeA (2005) dalam Prasojo *et al* (2007), inovasi yang berhasil adalah pembentukan dan implementasi dari proses, produk, jasa dan metode baru yang dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan terhadap efisiensi, efektivitas atau kualitas keluaran dalam penyampaian layanan. Sedangkan menurut UN Habitat, sebuah program yang inovatif biasanya akan menjadi *best practice*, sehingga melahirkan berbagai kriteria yang di dalamnya mengukur sejauh mana sebuah program inovasi tersebut dapat dikategorikan sebagai *best practice* dan dapat dijadikan contoh untuk yang lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui dan meneliti bagaimana relokasi PKL tersebut dapat disebut sebagai *best practice* dengan menganalisis konsep *best practice* dari UN Habitat, sehingga dapat dijadikan sebuah pelajaran bagi pemerintah daerah lainnya (*lesson learned*). Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana analisis konsep *best practice* dari program pengelolaan PKL Kota Surakarta, khususnya dalam relokasi PKL Monumen 745 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo?.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis konsep *best practice* dari program pengelolaan PKL Kota Surakarta, khususnya dalam relokasi PKL Monumen 745 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.

1.4 Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah:

- Secara akademis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan di kalangan akademis dalam bidang Ilmu Administrasi Negara khususnya terkait dengan konsep *best practice* program pemerintahan daerah. Selain itu, tidak menutup kemungkinan hasil penelitian nantinya dapat memberi pemahaman baru terhadap konsep-konsep yang telah ada sebelumnya.

- Secara praktis, peneliti menginginkan hasil penelitian nantinya dapat menjadi sumbangsih yang yata untuk pihak-pihak yang terkait, khususnya pemerintah daerah lainnya yang dapat meniru langkah kebijakan Pemkot Surakarta dalam pengelolaan PKL karena mengingat penelitian yang dilakukan terkait dengan program yang bertujuan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang antara lain berisi alasan pemilihan tema penelitian dan signifikansinya dengan kondisi yang terjadi saat ini. Selain itu, bab ini memaparkan permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan signifikansi dari penelitian yang dilakukan dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini disampaikan beberapa konsep yang relevan terkait dengan inovasi dan *best practice* yang menjadi teori dan pisau analisis dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga berisi beberapa karya tulis dan jurnal yang dijadikan sebagai rujukan penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dipaparkan metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam melaksanakan riset untuk penelitian ini. Diantaranya adalah pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, narasumber/informan, proses penelitian, penentuan lokasi penelitian, batasan penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB 4 GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum dari Kota Surakarta, dan gambaran umum pedagang kaki lima Kota Surakarta.

BAB 5 ANALISIS *BEST PRACTICE* DALAM PROGRAM PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Bab ini merupakan bab inti dari penelitian, dimana hasil dan analisis penelitian akan dipaparkan dalam bab ini. Bab ini akan menjelaskan penerapan konsep *best practice* dalam pengelolaan PKL di Kota Surakarta. Penjelasan akan didapatkan dari hasil analisis teori dengan data-data yang sudah didapatkan dari lapangan.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan yang dapat ditarik setelah melalui proses penelitian sampai kepada analisis masalah serta peneliti akan memberikan sejumlah saran berdasarkan pengamatan disaat penelitian untuk memberikan pandangan dan input.



BAB 2 KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka yang akan memaparkan beberapa tinjauan dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan konsep dan pembahasan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka pertama adalah sebuah skripsi yang berjudul *Revitalisasi Pasar Bunder, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (Studi Terhadap Penerapan Multi-Stakeholder Partnership)* yang ditulis oleh Desy Hariyati pada tahun 2009. Penelitian tersebut ingin menggambarkan proses revitalisasi pasar Bunder dengan konsep *partnership* yang melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatannya. Konsep yang digunakan yaitu konsep *partnership*, revitalisasi dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan pendekatan positivis, metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan wawancara mendalam. Disinilah letak persamaan penelitiannya, dimana peneliti menggunakan metode penelitian yang sama baik secara pemahaman maupun secara teknisnya.

Dalam menganalisis data yang telah didapatkan, peneliti mengkaitkan hanya dengan faktor internal saja tanpa menggunakan faktor eksternal sebagai bahan untuk menganalisis. Di dalam hasil analisisnya terdapat hasil yang positif dimana para *stakeholder* yang menangani Pasar Bunder tersebut memerankan peran dengan cukup baik, karena dapat dilihat dari hasil analisis *partnership* dengan indikator yang telah peneliti elaborasi lagi. Tetapi terdapat hasil yang negatif juga dalam hambatan dan tantangan, dimana kurangnya ketersediaan dana sehingga kurang menjadikan revitalisasi Pasar Bunder menjadi maksimal dan tidak adanya proses evaluasi juga belum tersedianya *grouping* pedagang berdasarkan jenis dagangannya yang direncanakan oleh para *stakeholder* dalam melaksanakan revitalisasi Pasar Bunder tersebut.

Tinjauan pustaka yang kedua adalah tesis yang berjudul *Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pengawasan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima Pasca Penataan di Jl. M.A Salmun – Jl. Dewi Sartika dan Jl. Nyi Raja Permas Kota Bogor)* yang ditulis oleh Rakhmawati pada tahun 2007. Di dalam penelitiannya, penulis menggunakan konsep sektor informal, pedagang kaki lima,

pengawasan dan pengendalian. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu deskriptif, karena tujuan penelitian tersebut untuk menggambarkan bagaimana pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah Kota Bogor dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di jalan raya-jalan raya yang menjadi objek penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), wawancara mendalam dan observasi ke lapangan. Persamaan dengan penelitian ini adalah, tema besar yang dipakai yaitu penataan pedagang kaki lima, teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data dan jenis penelitian, sehingga peneliti dapat mengambil banyak manfaat dari hasil penelitian tersebut.

Pada hasil penelitiannya dijabarkan tentang implementasi program penataan pedagang kaki lima sebelum dan saat penataan di Kota Bogor, dimana sebelum penataan berlangsung, kondisi di Jl. M.A Salmun, Jl. Dewi Sartika dan Jl. Nyi Raja Permas sangat semrawut dan kotor karena dipenuhi oleh lebih dari 2000 PKL dan pada hasilnya setelah program penataan pedagang kaki lima dilaksanakan di jalan-jalan tersebut, kondisinya menjadi lebih bersih dan tertata rapi. Pengawasan dan pengendalian pedagang kaki lima pasca penataan PKL dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dan Disperindangkop Kota Bogor. Dalam pelaksanaannya juga didukung oleh SKPD yang terlibat dalam kegiatan penataan, TNI-Polri, LPM, tokoh masyarakat dan PKL itu sendiri. Tetapi di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan yang belum dapat tertangani dengan baik, seperti kurangnya fasilitas yang memadai untuk keberlanjutan program penataan tersebut, masih banyaknya kepentingan-kepentingan lain diluar kepentingan bersama yang ingin diciptakan oleh Pemerintah Kota Bogor itu sendiri.

Tinjauan pustaka selanjutnya adalah buku “Reformasi dan Inovasi Birokrasi (Studi di Kabupaten Sragen)” karya Eko Prasajo, Teguh Kurniawan dan Defny Holidin. Buku ini memaparkan program-program inovasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dan program-program tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori dan dianalisis dengan menggunakan konsep inovasi dan *best practice*. Buku ini memiliki kesamaan konsep analisis dengan penelitian ini, karena penelitian ini juga menggunakan

konsep *best practice* yang dikeluarkan oleh UN Habitat, begitu pula dengan buku ini. Buku inovasi birokrasi ini juga lahir untuk menjawab banyak pertanyaan terkait apakah sebenarnya program unggulan di Kabupaten Sragen yang dikenal baik memang benar-benar dapat dikatakan inovasi dan dikategorikan sebagai *best practice* sehingga dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi daerah lainnya (*lesson learned*).

Penulis menggunakan beberapa pendekatan sebagai cara untuk mendapatkan data, yang pertama penulis mengidentifikasi dan memetakan inovasi program yang ada di Kabupaten Sragen dengan mencari informasi mengenai inovasi program tersebut melalui publikasi dan dokumentasi resmi yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan program inovasi tersebut. Pendekatan kedua dilakukan dalam mengelompokkan inovasi program yang ada di Kabupaten Sragen dengan menggunakan indikator-indikator tertentu seperti lokus, fokus sasaran serta metode pelaksanaannya. Sedangkan pendekatan ketiga dilakukan dalam menganalisis level inovasi dan level kinerja dari inovasi program yang ada di Kabupaten Sragen menurut pandangan para ahli (*expert*) dan masyarakat Sragen yang dilakukan melalui kuesioner dan hasil kuesioner dilakukan dengan menggunakan AHP (*analytical hierarchy process*) sehingga menghasilkan pembobotan untuk setiap indikator *best practice* yang digunakan. Pendekatan keempat dilakukan dengan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil dari tiga pendekatan yang dilakukan pertama kali. Pendekatan kelima dilakukan melalui pertemuan tatap muka kembali dengan segenap aparat Pemerintah Kabupaten Sragen dan sejumlah masyarakat dalam rangka mengkonfirmasi kembali temuan-temuan yang dari hasil penilaian yang didapatkan selama penelitian.

Pada hasilnya, masih ditemukan faktor-faktor yang dianggap belum maksimal yang termasuk ke dalam poin-poin *best practice*. Dasar hukum pelaksanaan sejumlah program inovasi seperti dalam dana bergulir masih berbentuk Peraturan/Keputusan Bupati, padahal seharusnya sudah dipatenkan ke dalam bentuk Peraturan Daerah guna menjamin kepastian keberlanjutan program. Banyak yang masih harus dibenahi menurut penilaian yang sudah dilakukan terhadap masyarakat setempat. Pada pokoknya, program-program

inovasi yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Sragen masih banyak yang harus diperbaiki karena masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam pelaksanaannya.

Tinjauan pustaka selanjutnya adalah sebuah jurnal yang diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Aloysius Gunadi Brata, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta yang berjudul "*Vulnerability of Urban Informal Sector: Street Vendors in Yogyakarta, Indonesia*". Jurnal ini merupakan laporan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara survei dengan mengklasifikasikan beberapa macam PKL yang peneliti temukan di beberapa jalan besar di Sleman Yogyakarta. Sampel penelitian terdiri dari tiga kelompok PKL, yaitu penjual Kemudiannan, penjual non-Kemudiannan dan penyedia layanan. Kuesioner pada survey tersebut termasuk kedalam empat jenis pertanyaan yaitu karakteristik responden, informasi seputar aktivitas sektor informal, informasi mengenai situasi eksternal dan informasi mengenai internal pedagang kaki lima tersebut. Survey dilakukan kepada 122 PKL yang tersebar di wilayah Sleman Yogyakarta.

Hasil survey didapatkan dengan cara kuantitatif, yang berarti data yang dihasilkan juga bersifat kuantitatif sehingga penghitungannya dilakukan dengan menggunakan statistik dan diberikan pembobotan untuk menganalisis hasilnya. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar pedagang kaki lima di Yogyakarta mengalami kerentanan pengalaman di tingkat menengah, secara umum, kerentanan vendor penjual Kemudiannan lebih tinggi dari vendor lainnya, kerentanan juga bervariasi, berdasarkan lokasi penjualan. Persamaan dengan penelitian ini adalah tema yang diangkat merupakan sektor informal dan pedagang kaki lima tetapi dengan cara kuantitatif, sehingga akan menambah referensi bagi penulis untuk lebih mengetahui gambaran penelitian dengan objek pedagang kaki lima yang dilakukan dengan metode kuantitatif.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga	Penelitian Keempat	Penelitian Penulis
Nama Peneliti	Desy Hariyati	Rakhmawati	Eko Prasajo, Teguh Kurniawan, Defny Holidin	Aloysius Gunadi Brata	Ratna Pertiwi
Judul Penelitian	Revitalisasi Pasar Bunder, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (Studi Terhadap Penerapan <i>Multi-Stakeholder Partnership</i>)	Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pengawasan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima Pasca Penataan di Jl. M.A Salmun – Jl. Dewi Sartika dan Jl. Nyi Raja Permas Kota Bogor)	Reformasi dan Inovasi Birokrasi (Studi di Kabupaten Sragen)	<i>Vulnerability of Urban Informal Sector: Street Vendors in Yogyakarta, Indonesia</i>	Analisis <i>best practice</i> Pengelolaan PKL (Studi pada Relokasi PKL Monumen '45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta)
Pendekatan Penelitian	Positivis	Kualitatif	Positivis	Kuantitatif	Positivis
Teori	<i>Multi-stakeholder Partnership</i>	Pengawasan dan pengendalian	Inovasi dan <i>Best Practice</i>	<i>Vulnerability dan Street Vendors</i>	Inovasi dan <i>best practice</i>
Metode Pengumpulan Data	Kualitatif	Kualitatif	Kuantitatif dan Kualitatif	Kuantitatif	Kualitatif
Jenis Penelitian	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif
Teknik Pengumpulan Data	Wawancara Mendalam	Wawancara Mendalam	Survey, FGD, Wawancara Mendalam	Survey	Wawancara Mendalam
Hasil Penelitian	Partnership dalam revitalisasi pasar sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur.	Pengawasan dan pengendalian secara umum sudah baik tetapi masih ada kekurangan, seperti fasilitas yang belum memadai.	Hasil data menunjukkan komponen penelitian merujuk pada hasil yang positif dari keberadaan inovasi-inovasi di Kabupaten Sragen.	Sebagian besar pedagang kaki lima di Yogyakarta mengalami kerentanan pengalaman di tingkat menengah.	Hasil analisis menunjukkan setiap tahapan relokasi ini memenuhi unsur <i>best practice</i> dan secara umum memiliki hasil yang positif di setiap dimensinya.

Sumber : diolah oleh Peneliti

2.2 Konstruksi Model Teoritis

Peneliti menggunakan beberapa teori inti yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian, yaitu teori mengenai reformasi administrasi, inovasi dan *best practice*.

2.2.1 Reformasi Administrasi

Samonte dalam Lee (1971:28) dalam Nasucha (2004:22) menyebutkan bahwa reformasi administrasi merupakan suatu instrumen yang akan membawa keadilan politik, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, reformasi administrasi harus dilihat sebagai bagian dari transformasi sosial yang lebih luas dan pergerakan-pergerakan reformasi administrasi harus menunjukkan karakteristik yang sama dengan pergerakan reformasi sosial lainnya.

Definisi reformasi administrasi, dalam kajiannya didapatkan dalam banyak sudut pandang. Ada yang memandang sebagai reformasi administrasi dalam kelembagaannya, ada pula yang mendefinisikan reformasi administrasi dalam perilaku pelaku administrasi itu sendiri. Tetapi konsentrasi utama dari reformasi administrasi merupakan manusia sebagai yang melaksanakan dan sebagai objek dari reformasi administrasi itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Kasim (1998:11), reformasi administrasi adalah upaya perubahan melalui pendekatan dari atas ke bawah dengan program reorganisasi, pelangsingan (*downsizing*), program penghematan biaya, dan program *reengineering*. Caiden (1969:12) dalam Zauhar (1996:6) menyebutkan tujuan dari reformasi administrasi adalah

“...improve the administrative performance of individual, groups, and institutions and to advise them how can achieve their operating goals more effectively, more economically, and more quickly.”

Caiden (1991:13) dalam Nasucha (2004:23) juga mengatakan bahwa reformasi administrasi mempunyai kunci penting untuk meningkatkan kinerja sektor publik yang meliputi ekonomi, produktivitas, efisiensi dan efektivitas, khususnya melalui perubahan kultur administrasi. Hal utama yang menjadi perhatian dari pelaksana reformasi administrasi menurut Caiden (1991:100), antara lain (1) organisasi, meliputi tujuan, target, kebijaksanaan, ukuran, bentuk,

struktur, dan kebiasaan organisasi; (2) individu, meliputi hak, kewajiban, loyalitas, ambisi, harapan, kreativitas, dan lain-lain.

Abueva (1970:2) dalam Zauhar (1996:10) memandang reformasi administrasi dari aspek kelembagaan dan perilaku, dia menyebutkan bahwa

“Essentially a deliberate attempt to use power, authority and influence to change the goals, structure or procedures of the bureaucracy, and therefore, to alter the behaviour of its personnel”

Dari berbagai definisi yang dikemukakan para ahli tentang reformasi administrasi, Kemudian peneliti akan menggunakan definisi yang dikemukakan oleh Caiden, dimana reformasi administrasi merupakan sebuah alat untuk meningkatkan kinerja administrasi institusi dan organisasi publik, individu dalam organisasi dan klien.

Tujuan reformasi administrasi sebagaimana dikemukakan oleh Mosher (1967) diidentifikasi ke dalam empat sub tujuan, yaitu melakukan perubahan inovatif terhadap kebijaksanaan dan program pelaksanaan, meningkatkan efektivitas administrasi, meningkatkan kualitas personel dan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan kritik dan keluhan pihak luar. Hann Been Lee juga mengungkapkan adanya tujuan umum reformasi administrasi yang dispesifikasikan ke dalam tiga tujuan yakni meningkatkan keteraturan, meningkatkan atau menyempurnakan metode dan meningkatkan *performance*. (Zauhar, 1996:13)

Halligan (2001: 3-10) menjelaskan dua kriteria reformasi administrasi, seperti dalam kutipannya, dia menyebutkan bahwa

“Several types of reform have been selected for brief discussion according to two criteria: their significance and the availability of fairly reliable evidence (official documentation or secondary analysis) about their incidence...”

Dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi harus memiliki strategi agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Banyak teori yang menggunakan *reinventing government* sebagai strategi untuk mereformasi administrasi yang paling baik, dimana keseluruhan poin dari *reinventing government* itu sendiri mewakili dari tujuan dalam pelaksanaan reformasi administrasi. Oleh karena itu

peneliti juga akan menggunakan konsep *reinventing government* yang akan dijadikan konsep dalam strategi reformasi administrasi dalam kerangka teori penelitian ini.

Adapun konsep *reinventing government* yang dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1996: 5) adalah :

1. Pemerintahan Katalis: Mengarahkan Ketimbang Mengayuh;
2. Pemerintahan Milik Masyarakat: Memberi Wewenang Ketimbang Melayani;
3. Pemerintahan yang Kompetitif: Menyuntikkan Persaingan ke dalam Pemberian Pelayanan;
4. Pemerintahan yang digerakkan Misi: Mengubah Organisasi yang digerakkan oleh Peraturan;
5. Pemerintahan yang berorientasi Hasil: Membiayai Hasil Dibandingkan dengan Masukan;
6. Pemerintahan berorientasi Pelanggan: Memenuhi Kebutuhan Pelanggan bukan Birokrasi;
7. Pemerintahan Wirausaha: Menghasilkan Dibandingkan dengan Membelanjakan;
8. Pemerintahan Antisipatif: Mencegah daripada Mengobati;
9. Pemerintahan Desentralisasi;
10. Pemerintahan berorientasi Pasar: Mendongkrak Perubahan Melalui Pasar.

Dengan bahasa yang lebih ringkas, Osborne dan Gaebler meringkas kesepuluh prinsip birokrasi wirausaha tersebut ke dalam paragraf yang ringkas sebagai berikut.

“...most entrepreneurial governments promote competition between service providers. They empower citizens by pushing control out of the bureaucracy, into the community. They measure the performance of their agencies, focusing not inputs but on outcomes. They are driven by their goals-their mission-not by their rules and regulations. They redefine their clients as customers and offer them choices-between schools, between training programs, between housing options. They prevent problems before they emerge, rather than simply offering services

afterward. They put their energies into earning money, not simply spending it. They decentralize authority, embracing participatory management. They prefer market mechanism to bureaucratic mechanism. And they focus not simply on providing public services, but on catalyzing all sector-public, private, and voluntary-into action to solve their community's problems."

(dikutip dalam Winarno, 2004: 17)

2.2.2 Inovasi

Menurut Myers dan Marquis (1969), inovasi adalah, "Gabungan dari berbagai macam proses yang saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Jadi inovasi bukanlah sebuah konsep dari suatu ide baru, penemuan baru atau juga bukan merupakan suatu perkembangan dari suatu pasar yang baru saja, tetapi inovasi merupakan gabungan dari semua proses-proses tersebut." (dikutip dalam Kotler, 2002: 201-203)

Rogers dan Shoemaker (1972) dalam Kotler (2002: 210) berpendapat bahwa inovasi adalah suatu ide baru yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dalam hal ini harus dibedakan dengan penemuan. Inovasi merupakan aplikasi dari suatu ide atau penemuan. Penemuan merupakan konsep dari suatu ide. Rogers merumuskan inovasi sebagai berikut:

Inovasi = konsep teori + penemuan + komersil (dalam bisnis, komersil merupakan suatu tujuan untuk memperoleh laba)

Dari dua definisi di atas tentang inovasi, Kemudian dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang buatan manusia, yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) meskipun pada dasarnya inovasi tidak harus didapatkan dari suatu pemikiran yang baru juga, dapat jadi inovasi sudah pernah dilakukan oleh orang/sekelompok orang yang lainnya dan diterapkan kembali di wilayah yang berbeda sebagai sebuah inovasi.

Inovasi yang berhasil menurut Mulgan dan Albury (2003) dalam Prasojo *et al* (2007: 7-8) adalah pembentukan dan implementasi dari proses, produk, jasa dan metode baru yang dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan terhadap efisiensi, efektivitas atau kualitas keluaran dalam penyampaian.

Rogers (1983:14-15) menyebutkan bahwa inovasi memiliki beberapa karakteristik yaitu :

1. Keunggulan kreatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin dari faktor status sosial (gengsi), kesenjangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting;
2. Kompatibel (*compability*), yaitu tingkat kesesuaian dengan nilai (*values*), pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima;
3. Kompleksitas (*complexity*), yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima;
4. Trialabilitas (*trialability*), yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima;
5. Dapat diamati (*obsevability*), yaitu mudah diamati atau tidaknya suatu hasil inovasi oleh penerima.

Sedangkan Zaltman, Duncan, dan Holbek (1973:32-50) berpendapat bahwa cepat lambatnya penerimaan inovasi dipengaruhi oleh atribut inovasi itu sendiri yang meliputi: pembiayaan, balik modal, efisiensi, resiko dan ketidakpastian, mudah dikomunikasikan, kompabilitas, kompleksitas, status ilmiah, kadar keaslian, dapat dilihat kemanfaatannya, dapat dilihat batas sebelumnya, keterlibatan, hubungan interpersonal, kepentingan umum dan penyuluh inovasi.

Schemerhom (1996: 6) dalam Kadjatmiko dan Gana (2003: 17) memandang inovasi sebagai proses menciptakan ide-ide baru dan menempatkannya dalam praktek. Inovasi meliputi berbagai aspek baik proses, produk maupun manajemen. Di dalam organisasi, inovasi proses merupakan cara terbaik untuk melakukan sesuatu. Inovasi produk menyangkut penciptaan ide-ide baru atau perbaikan barang dan jasa. Inovasi manajemen menyangkut dukungan baik invensi (pengembangan ide-ide baru), seni penemuan, aplikasi dan seni penggunaan.

Kadjatmiko dan Gana (2003: 20) sendiri mengemukakan pendapatnya apabila ditinjau dari perspektif proses, inovasi sejatinya melewati beberapa

episode. *Pertama*, formasi agenda (*agenda formation*) menaruh perhatian pada kesadaran gagasan-gagasan awal dan persoalan yang membantu tujuan. *Kedua*, seleksi (*selection*) terkait dengan proses dan promosi lebih lanjut gagasan-gagasan bersama organisasi seperti ide-ide yang dipilih untuk dikedepankan bagi pengembangan lebih lanjut karena ide-ide tersebut cocok dengan permasalahan yang dihadapi organisasi. *Ketiga*, implementasi (*implementation*) menunjukkan proses secara aktual memperkenalkan ide-ide terpilih pada organisasi dan menerapkannya pada konteks lokal dalam bentuk produk-produk, pelayanan, teknologi atau proses baru. *Keempat*, rutinisasi (*routinization*) yang menggambarkan situasi dimana pemahaman inovasi telah dibangun pada titik dimana penggunaannya menjadi suatu yang rutin dan saat ini nampaknya sebagai standar praktek kerja untuk diadopsi pada bagian lain organisasi yang cocok.

Baker (2002) dalam IDeA (2005) yang dimuat dalam Prasojo *et al* (2007:10) mengemukakan mengenai tiga tipe inovasi. Tiga tipe inovasi tersebut kemudian ditambahkan oleh IDeA (2005) menjadi lima tipe inovasi. Kelima tipe menurut Baker dan IDeA adalah inovasi yang terkait dengan :

1. Strategi/kebijakan misalnya misi, sasaran, strategi dan pertimbangan baru;
2. Pelayanan/produk misalnya perubahan fitur dan desain dari pelayanan produk;
3. Penyampaian layanan misalnya perubahan atau cara baru dalam penyampaian layanan atau dalam berinteraksi dengan klien;
4. Proses misalnya prosedur internal, kebijakan dan bentuk organisasi baru;
5. Sistem interaksi misalnya cara baru atau perbaikannya yang berbasis pengetahuan dalam berinteraksi dengan aktor lain serta perubahan dalam cara menjalankan pemerintahan.

Skarzynski dan Gibson (2008: 229-232) di dalam bukunya *Innovation To The Core* menuliskan bagaimana membangun kapabilitas sebuah inovasi yang sistemik yaitu dengan mempersatukan empat komponen yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi, antara lain:

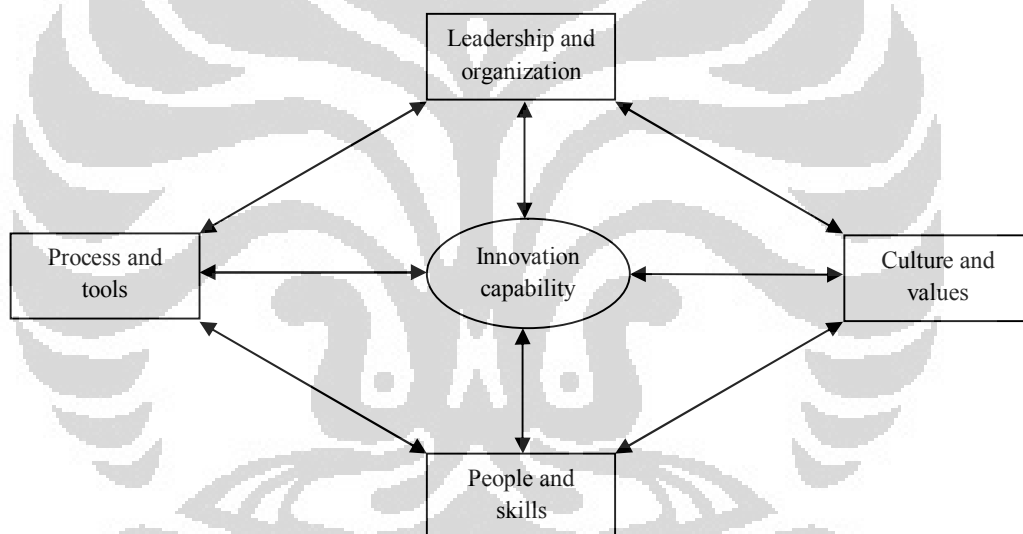
1. *Leadership and organization*: pemimpin dalam sebuah organisasi harus dapat menyampaikan visi yang akan dicapai dalam sebuah inovasi yang diterapkan sehingga dapat menciptakan tujuan yang sama. Keselarasan tujuan

dalam sebuah organisasi sangat diperlukan, karena inovasi akan berhasil dengan kerjasama SDM yang baik.

2. *People and skills*: menumbuhkan kedisiplinan untuk membangun kapabilitas inovasi di seluruh organisasi. Sebuah inovasi memerlukan komitmen dalam pelaksanaannya untuk tetap dapat berjalan sesuai koridornya dan pencapaian tujuan yang maksimal.

3. *Processes and tools*: pendekatan yang sistematis dan mendukung peralatan untuk generasi-generasi ide, jaringan dan portofolio manajemen. Inovasi juga memerlukan peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan inovasi dapat terakomodasi dan berjalan dengan baik.

4. *Culture and values*: kolaborasi, kultur yang terbuka dan pemberian insentif penghargaan untuk menantang kondisi yang *status quo*.



**Gambar Hubungan Antar Komponen
Membangun Kapabilitas Sebuah Inovasi**

Sumber: diolah oleh peneliti, 2012.

2.2.3 Best Practice

Tidak banyak teori yang menjabarkan secara khusus, definisi ataupun sesuatu hal yang berkaitan langsung dengan *best practice*, karena *best practice* dianggap hanyalah sebuah predikat dari indikator-indikator yang tidak dapat digeneralisasikan ke setiap aspek yang ada. *Best practice* diartikan sebagai sebuah ide atau cara yang dianggap berhasil dan memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas

yang tinggi. *Best practice* merupakan praktek terbaik yang dilakukan oleh sebuah otoritas yang biasanya ada di dalam pemerintahan atau manajemen, tergantung keadannya. *Best practice* juga menjadi suatu contoh untuk dapat dipraktikkan di tempat lain.

Penilaian UN Habitat tentang *best practice* yang dikutip dari Prasojo *et al* (2007 : 6) juga mendefinisikan *best practice* dalam konteks Lingkungan Perkotaan sebagai inisiatif yang telah menghasilkan kontribusi menonjol (*outstanding contributions*) dalam meningkatkan kualitas kehidupan baik di kota-kota maupun masyarakat umum lainnya. UN juga memberikan definisi yang dapat digambarkan secara umum melalui beberapa poin, antara lain :

- Memiliki dampak yang dapat ditunjukkan dan didemonstrasikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- Merupakan hasil dari kerjasama yang efektif antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat madani; serta
- Berkelanjutan secara sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

2.2.3.1 Kriteria *Best Practice*

UN juga memberikan kriteria-kriteria *best practice* yang dapat menjadi alat ukur penerapan program *best practice*, kriteria-kriteria tersebut antara lain (Prasojo *et al*, 2007:7) :

1. Dampak (*impact*), sebuah *best practices* harus menunjukkan sebuah dampak positif dan dapat dilihat (*tangible*) dalam meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak beruntung.
2. Kemitraan (*partnership*), sebuah *best practices* harus didasarkan pada sebuah kemitraan antara aktor-aktor yang terlibat. Setidaknya melibatkan dua pihak.
3. Keberlanjutan (*sustainability*), sebuah *best practices* harus membawa perubahan dasar dalam wilayah permasalahan berikut:
 - Legislasi, kerangka pengaturan oleh hukum atau standar formal yang menghargai isu-isu dan masalah yang dihadapi
 - Kebijakan sosial dan atau strategi sektoral di daerah yang memiliki potensial bagi adanya replikasi dimanapun

- Kerangka institusional dan proses pembuatan kebijakan yang memiliki kejelasan peran dan tanggungjawab bagi beragam tingkatan dan kelompok aktor seperti pemerintah pusat dan daerah, LSM dan organisasi masyarakat
 - Efisien, transparan, dan sistem manajemen yang akuntabel yang dapat membuat lebih efektif penggunaan sumber daya manusia, teknik dan keuangan
4. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (*leadership and community empowerment*), yakni :
- Kepemimpinan yang menginspirasi bagi adanya tindakan dan perubahan, termasuk didalamnya perubahan dalam kebijakan publik
 - Pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan komunitas lainnya serta penyatuan terhadap kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut
 - Penerimaan dan bertanggung jawab terhadap perbedaan sosial dan budaya
 - Kemungkinan bagi adanya transfer (*transferability*), pengembangan lebih lanjut dan replikasi
 - Tepat bagi kondisi lokal dan tingkatan pembangunan yang ada.
5. Kesetaraan gender dan pengecualian sosial (*gender equality & social inclusion*), yakni inisiatif haruslah dapat diterima dan merupakan respon terhadap perbedaan sosial dan budaya; mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial atas dasar pendapatan, jenis kelamin, usia, dan kondisi fisik/mental; serta mengakui dan memberikan nilai terhadap kemampuan yang berbeda.
6. Inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer (*innovation within local context & transferability*), yakni bagaimana pihak lain dapat belajar atau memperoleh keuntungan dari inisiatif, serta cara yang digunakan untuk membagi dan mentransfer pengetahuan, keahlian dan pelajaran untuk dapat dipelajari tersebut.

2.3 Operasionalisasi Konsep

Peneliti menggunakan teori *best practice* yang dicetuskan oleh UN Habitat dalam operasionalisasi konsep penelitian ini, tetapi peneliti hanya menggunakan sebagian dari kriteria *best practice* yang akan dijadikan dimensi dalam operasionalisasi konsep penelitian ini, karena ada satu poin yang tidak relevan dengan sasaran penelitian dan tidak akan berpengaruh dalam hasil analisis. Dimensi yang tidak dipakai yaitu dimensi kesetaraan gender, karena peneliti menganggap pedagang bersifat homogen atau sama tanpa melihat perbedaan gender, jenis kelamin dan usia. Untuk lebih memperkaya penjelasan dalam setiap dimensi dan indikator, peneliti mengambil beberapa sumber yang dirangkum untuk lebih mudah memahami dan mengelaborasi teori yang akan menjadi pedoman wawancara penelitian ini.

2.3.1 Dimensi Dampak (*Impact*)

Sebuah inovasi yang disertai dengan *best practice* pasti akan memiliki dampak di dalam penerapannya, baik langsung maupun tidak langsung. Dampak menjadi sebuah evaluasi yang nyata dan terlihat yang dapat dirasakan dari kebermanfaatannya atau bahkan ketidakbermanfaatannya dari sebuah program. Sebuah program yang dijalankan dapat menghasilkan dampak negatif maupun dampak positif bagi yang mengalaminya. Dampak yang dihasilkan oleh sebuah inovasi seharusnya berupa dampak positif. Karena sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah teori yang ada, sebuah inovasi adalah merupakan proses yang dimulai dengan keinginan untuk menjadi lebih baik yang kemudian dilanjutkan dengan usaha untuk mewujudkannya dan membuatnya berjalan dengan baik (Tabor dalam Prasojo, 2007) sehingga inovasi tersebut dapat dikategorikan *best practice*.

Schumpeter (1954) dalam Metuge Metuge (2010) mengatakan bahwa suatu *best practice* paling tidak akan berdampak pada sistem ekonomi dan lingkungan disekitar organisasi tersebut, sehingga dampak baiknya minimal dapat dilihat dan diukur dari kedua konteks tersebut, sehingga peneliti akan mengambil indikator tersebut dengan sub-indikator pendapatan dalam indikator ekonomi, kenyamanan dan ketertiban di dalam indikator lingkungan. Dalam pengukurannya, karena indikator tersebut juga sesuai dengan penelitian ini.

Peneliti akan menggunakan wawancara mendalam dan pengamatan terhadap dampak yang dihasilkan oleh program pengelolaan pedagang kaki lima tersebut.

2.3.2 Dimensi *Partnership* (Kemitraaan)

Dalam konsep *best practice* yang dikemukakan oleh UN Habitat itu sendiri, sebuah *best practice* harus terdiri dari sebuah kemitraan yang terdiri dari minimal dua aktor/lembaga yang bersangkutan dengan program tersebut. Kunci keberhasilan dari sebuah program yang diselenggarakan oleh pemerintah salah satunya adalah kemitraan yang dijalin untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Kemitraan dalam program pemerintah biasanya bekerja sama dengan sektor swasta dalam penyelenggaraannya sebagai sponsor atau *partner* dalam pengintegrasian kepentingan-kepentingan di dalamnya.

Indonesia memiliki lembaga independen yang mengurus kemitraan secara khusus untuk memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam reformasi pemerintahan. Di dalam penelitian kemitraan yang dilakukan oleh tim *The Partnership for Governance Reform in Indonesia*, terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan dari penilaian dari kemitraan sebuah program kerja pemerintah. Peneliti mengacu kepada konsep yang dibawa oleh *The Partnership for Governance Reform in Indonesia* tersebut, dimana indikator dari dimensi kemitraan terdiri dari beberapa aspek arena, antara lain (www.kemitraan.or.id, 2012) :

1. Pemerintah (*Government*), adalah lembaga pembuat kebijakan (*policy-making body*) pada level provinsi. Pemerintah dalam hal ini dimaksudkan menunjuk pada gubernur dan DPRD Provinsi. Arena ini melakukan fungsi pembuatan regulasi, koordinasi pembangunan dan pengalokasian anggaran.
2. Birokrasi (*Bureaucracy*), adalah lembaga pelaksana kebijakan (*executing body*) dan sekaligus merupakan jembatan antara pemerintah dan publik. Dalam hal ini birokrasi mencakup dinas-dinas dan badan lain setingkat yang berada di level provinsi. Arena ini melakukan fungsi pelayanan publik, peningkatan penerimaan keuangan daerah, dan pengaturan ekonomi daerah.

3. Masyarakat Sipil (*Civil Society*), adalah individu atau kelompok masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam proses *governance*. Arena ini melakukan fungsi advokasi kebijakan publik.
4. Masyarakat Ekonomi (*Economic Society*), adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjalankan usaha yang berorientasi profit dan terlibat dalam penyediaan barang dan jasa dalam menunjang pelaksanaan kebijakan.

2.3.3 Dimensi *Sustainability* (Keberlanjutan)

Istilah keberlanjutan sebenarnya dapat diartikan dengan ketersediaan bahan atau sumberdaya di masa yang akan datang, mencukupi atau tidak untuk tetap berlangsungnya program dikemudian hari. Keberlanjutan yang akan dipakai untuk menjadi indikator dalam penelitian ini mengacu kepada indikator *sustainability* yang dimuat di dalam buku Inovasi Sebagai Referensi: Tiga Tahun Otonom Daerah dan Otonomi Award, dimana indikator ini ditentukan oleh Tim *Jawa Post Institute of Pro-Otonomi* (JPIP) saat melaksanakan monitoring dan evaluasi pada tiga tahun perjalanan otonomi di Jawa Timur. Adapun indikator yang dipakai antara lain, penganggaran yang memihak kepada keberlanjutan program, legislasi, komitmen dan koordinasi. Peneliti akan meKemudiani semua indikator yang terdapat dalam buku tersebut dikarenakan sesuai dengan penelitian ini.

2.3.4 Dimensi *Leadership* (Kepemimpinan)

Kepemimpinan dalam sebuah organisasi akan banyak mempengaruhi bagaimana organisasi itu berjalan, karena pada dimensi kepemimpinanlah akan dilihat seberapa besar partisipasi dan dukungan dari lingkungan ini bergerak dalam pelaksanaan sebuah program yang melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat yang menjadi objek pelaksanaan setiap program pemerintah.

Dimensi kepemimpinan ini akan dilihat dari beberapa indikator, yaitu kemampuan memimpin dan manajemen di dalam penerapan dan pengelolaan program inovasi yang dijalankannya. Maxwell dalam Kaloh (2006: 18) mengatakan bahwa apabila ingin melihat kemampuan dari seorang pemimpin yang baik dan berhasil dapat dilihat dari pengaruh terhadap lingkungan yang ia

pimpin, pengaruh sendiri dapat diukur dengan tingkat kepercayaan masyarakat (*public trust*) dan seberapa banyak partisipasi masyarakat dapat terlibat dalam pelaksanaan program yang diselenggarakan pemerintah.

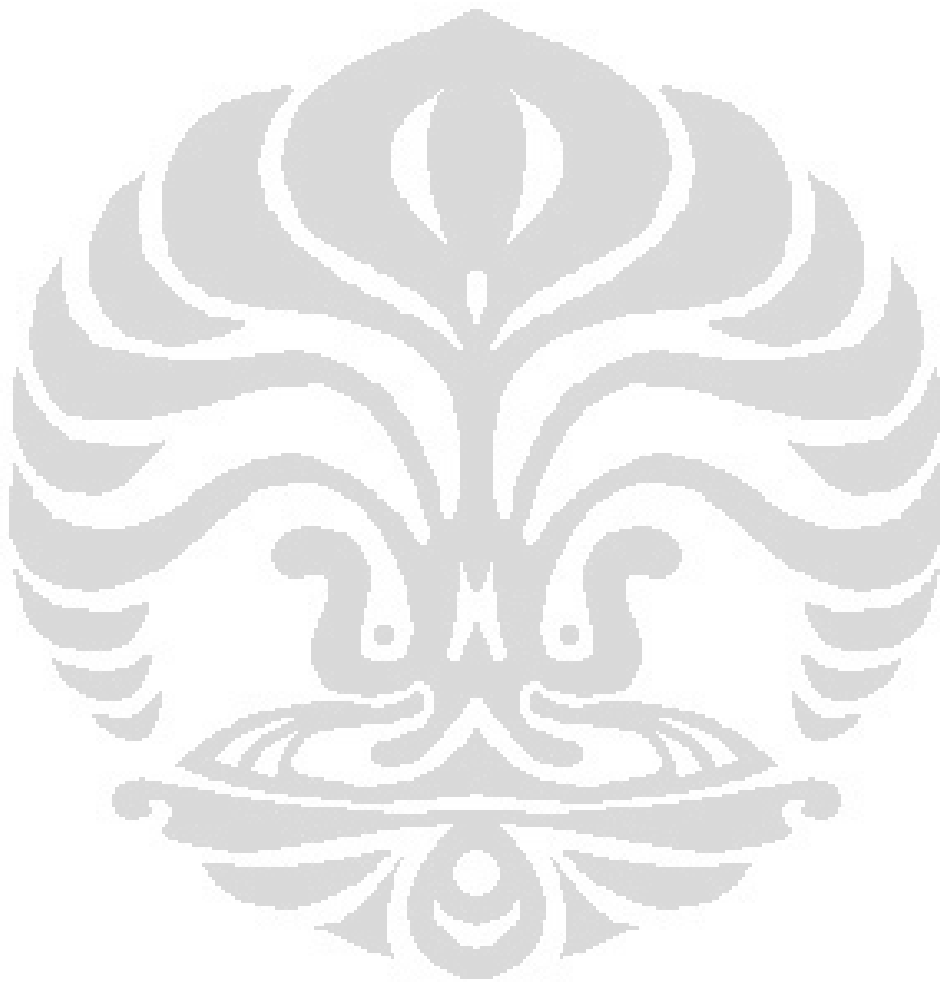
Sedangkan dalam implementasi programnya sendiri, indikator yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah manajemen pengelolaan program yang dilakukan oleh pemimpin daerah, hal ini selaras dengan pernyataan Nawawi dan Hadari (1993: 19) bahwa pemimpin dalam aspek manajemen merupakan seorang *planner* dan *decision maker* dalam sebuah organisasi, sehingga di dalam pengelolaan yang baik harus dilihat dari proses dan mekanisme pengambilan keputusan dalam pelaksanaan dan keberlanjutan program yang sedang ditanganinya. Oleh karena itu peneliti akan menggunakan indikator kemampuan memimpin dengan sub-indikator kepercayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dan indikator manajemen pengelolaan program dengan melihat aspek pengambilan keputusan, pelaksanaan dan rencana keberlanjutan program.

2.3.5 Dimensi *Transferability* (Kemampuan untuk ditransfer ke daerah lain)

Setiap inovasi yang menjadi *best practice* sudah pasti akan memberikan dampak positif bagi daerahnya. Hal ini dapat menjadi sebuah *lesson-learned* atau pembelajaran bagi daerah lainnya sehingga penerapannya dapat dicontoh dan dilaksanakan di daerah tersebut tentunya dengan segala jenis pertimbangan dan penyesuaian dengan konteks lokalnya tersebut. Sebuah *best practice* dalam inovasi daerah juga diharapkan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan sehingga programnya dapat dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya. Oleh karena itu di dalam penelitian ini akan dijabarkan indikator kemungkinan ditransfer kepada pemerintah daerah lain, karena biasanya karakteristik dari setiap daerah berbeda-beda sehingga ada saja *best practice* yang tidak dapat diterapkan di daerah lainnya karena perbedaan karakteristik tersebut.

Seperti penelitian yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sragen tentang inovasi pelatihan keterampilan kerja oleh Eko Prasajo, Teguh Kurniawan dan Defny Holidin, indikator-indikator yang dipakai di dalam penilaian *transferability* program inovasi ini berupa transfer di tempat lain, adopsi pengetahuan/sistem, adopsi informasi dan adopsi teknologi. Di dalam penelitian ini, peneliti akan

membatasi indikator penelitian hanya sampai kepada adopsi pengetahuan/sistem saja, karena dalam pengelolaan pedagang kaki lima, tidak diperlukan untuk pengadopsian informasi dan pengadopsian teknologi. Sedangkan sub-indikator yang akan dipakai berupa kemudahan program dalam penerapannya oleh daerah lain dan fisibilitas untuk diterapkan di daerah lain.



Tabel 2.2
Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator	Sub Indikator
<i>Best Practice</i>	<i>Best Practice</i>	<i>Impact</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak Ekonomi • Dampak Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Ekonomi</u> : - Pendapatan PKL - Pendapatan Asli Daerah (PAD) • <u>Lingkungan</u> : - Kenyamanan - Ketertiban
		<i>Partnership</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Sipil • Masyarakat Ekonomi • Pemerintah dan Birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi • Pembagian Kerjasama
		<i>Sustainability</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Legislasi • Dukungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk Legislasi • <u>Dukungan</u> : - Penganggaran - Komitmen - Koordinasi
		<i>Leadership</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan memimpin • Manajemen Pengelolaan Program 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan Masyarakat • Partisipasi dalam pelaksanaan program • Mekanisme pengambilan keputusan, pelaksanaan dan keberlanjutan program.
		<i>Transferability</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer di tempat lain • Adopsi Pengetahuan/Sistem 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan penerapan program • Fisibilitas penerapan di daerah lainnya
		<i>Gender Equality and Social Inclusion</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Kelamin • Usia • Kondisi fisik/mental 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan • Pengakuan nilai yang berbeda

Sumber : diolah oleh Peneliti, 2012.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis. Creswell dalam Hariyati (2009:24) mengemukakan bahwa pendekatan positivis bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan dengan mencakup reliabilitas, validitas dan objektivitas. Reliabilitas adalah peKemudian istilah untuk menunjukkan konsistensi dari data yang dikumpulkan terhadap data yang diperoleh dari sumber lain, serta sejalan dengan apa yang sudah diketahui orang. Validitas yang dimaksud merupakan suatu keyakinan bahwa analisis dan data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan apa yang terjadi di tempat penelitian. Objektivitas merupakan suatu pengukuran yang bebas dari penilaian subjektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis karena pada analisis akan menggambarkan kesesuaian teori dengan hasil perolehan data selama di lapangan.

3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini masuk ke dalam penelitian deskriptif, dimana peneliti berusaha menggambarkan fenomena yang ada secara mendetail dengan fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Menurut Neuman (1997 : 19-20), "*Descriptive research present a picture of the specific details a situation, social setting, or relationship*" (Penelitian deskriptif menyajikan suatu gambaran dari suatu keadaan, latar belakang sosial ataupun hubungan antar sesuatu secara terperinci). Di dalam penelitian ini. Peneliti akan menggambarkan program penataan pedagang kaki lima di Kota Surakarta sebagai sebuah *best practise* dan program inovasi yang ada di Kota Surakarta.

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian murni. Penelitian ini dilakukan untuk kepuasan peneliti dan berupaya untuk menambah pengetahuan khususnya terkait dengan konsep inovasi dan *best practice*.

Berdasarkan waktu penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *cross sectional*. Menurut Prasetyo dan Jannah (2005 : 45), "penelitian

cross sectional adalah penelitian yang dilakukan dalam waktu tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan.” Dengan kata lain, penelitian ini tidak akan dilanjutkan untuk mencari perbandingan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya dan selanjutnya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2001:6), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan, dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang diperlukan untuk kepentingan analisis. Peneliti akan terjun langsung ke Kota Surakarta dan bertemu langsung dengan para informan yang dapat dimintai keterangan dan wawancara terkait penelitian ini. Data primer yang digunakan adalah wawancara mendalam untuk mendapatkan keterangan atau fakta-fakta yang terperinci dan mendalam terhadap narasumber yang sudah ditetapkan.

Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan pengumpulan data serta dalam proses analisisnya. Proses pengumpulan data juga didasarkan atas teori-teori yang menjadi landasan utama penelitian yang sudah diturunkan menjadi dimensi-dimensi dan indikator-indikator untuk pembuatan daftar pertanyaan untuk wawancara mendalam kepada informan.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008), penelitian kualitatif mengutamakan analisis data secara induktif, dari lapangan tertentu yang bersifat khusus, untuk ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas. Analisis induktif ini digunakan karena beberapa

alasan. *Pertama*, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data. *Kedua*, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisist, dapat dikenal dan akuntabel. *Ketiga*, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat-tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya. *Keempat*, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. Terakhir, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Untuk menganalisis wawancara, peneliti menggunakan teknik “*Conversation Analysis*” seperti yang diungkapkan oleh Denzin dan Lincoln (2005:875). Dalam hal ini, peneliti menganalisis hasil wawancara mendalam yang telah direkam.

3.5 Narasumber/Informan

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dipilih berdasarkan tujuan dari penelitian, yaitu untuk mengetahui kondisi dari penataan PKL yang diadakan Pemerintah Surakarta sehingga peneliti memilih informan dari keterlibatannya secara langsung dengan program penataan PKL tersebut. Dengan demikian, sebagai informan dalam penelitian ini adalah :

1. Pihak Pemerintah, antara lain :
 - Bapak Didik Anggono, Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan PKL, Dinas Pengelola Pasar Kota Surakarta. Peneliti mendapatkan informasi dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara program, mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi yang diselenggarakan.
 - Ibu Sunarti, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta. Peneliti mendapatkan informasi mengenai teknis dari pelaksanaan relokasi dan bagaimana keberlanjutan yang dilaksanakan oleh Pemkot Surakarta beserta jajarannya dalam mempertahankan hasil yang sudah dicapai.

- Bapak Murdi, Kepala Pasar Klithikan Notoharjo. Peneliti mendapatkan informasi mengenai keseharian pedagang setelah direlokasi dan resmi menjadi pedagang formal di Pasar Notoharjo dan juga perkembangan dari Pasar Notoharjo setiap tahunnya.

2. Pihak Masyarakat, antara lain :

- Bapak Nanang dan Bapak Suratno, perwakilan PKL yang terkena relokasi ke Pasar Notoharjo. Peneliti mendapatkan informasi langsung mengenai relokasi dari sisi pedagang sebagai sasaran dari program dan bagaimana keberlanjutan usahanya setelah direlokasi.
- Bapak Joko Pramono dan Bapak Sukatno, perwakilan masyarakat lokasi Monumen '45 Banjarsari. Peneliti mendapatkan informasi mengenai dampak dan partisipasi masyarakat sekitar Monumen Banjarsari.
- Bapak Mukhlis, perwakilan konsumen Pasar Klithikan Notoharjo. Informasi yang didapatkan berupa kesediaan konsumen untuk tetap berkunjung ke Pasar Notoharjo dan bentuk dukungan secara langsung kepada para PKL yang terkena relokasi.
- Drs. H. Sudarmo, MA, Ph.D, sebagai pengamat/akademisi dari Universitas Negeri Sebelas Maret Kota Surakarta. Informasi yang didapatkan adalah hasil penelitian yang pengamatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan acuan dan penetralisir hasil analisis penelitian ini.

3.6 Proses Penelitian

Menurut Irawan (2007:20), penelitian kualitatif memiliki lima fase dalam proses penelitiannya, antara lain penentuan fokus, pengembangan kerangka teori, penentuan metodologi, analisis temuan dan pengambilan kesimpulan. Lima fase tersebut tidak selalu jelas batasan-batasannya antara fase satu dan fase yang lainnya tetapi setiap fase cenderung bersifat “*continuous*” dan sering kali terjadi *overlapping* (tumpang tindih) dan pengulangan-pengulangan.

Kelima fase yang telah disebutkan di atas akan terdapat pada penelitian ini, dimana fase pertama yaitu penentuan fokus. Penentuan fokus dalam penelitian

ini sudah dilaksanakan oleh peneliti dengan cara mengidentifikasi daerah dan pasar mana yang menjadi tempat untuk relokasi pedagang kaki lima di Surakarta sebagai salah satu upaya penataan pedagang kaki lima di Kota Surakarta tersebut. Peneliti mencari data tentang lokasi penertiban yang para PKL nya direlokasikan ke Pasar Klithikan, lalu karena Pasar Klithikan merupakan suatu contoh penataan pedagang kaki lima di Kota Surakarta bagi banyak daerah lain terutama data yang peneliti dapatkan tentang Klithikan menjadi contoh untuk negara-negara Asia Pasifik, Kemudian peneliti mengambil Pasar Klithikan sebagai objek dan fokus penelitian yang akan diteliti mengenai inovasi dan pengkategorisasian *best practice*.

Dalam fase pengembangan kerangka teori, peneliti memiliki teori dasar yang akan menjadi pedoman penelitian, yaitu teori inovasi dan *best practice*. Teori-teori tersebut akan dikembangkan melalui operasionalisasi konsep yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi kerangka untuk pembuatan daftar pertanyaan/wawancara yang akan dilaksanakan pada saat penelitian kepada para informan yang telah ditetapkan. Metodologi yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif, karena peneliti menggunakan teori inovasi dan *best practice* sebagai pedoman penelitian ini.

Pada fase analisis temuan atau data, peneliti mengidentifikasi dan menghubungkan keberadaan data yang ditemukan di lapangan dengan teori yang digunakan pada kerangka teori. Sehingga penelitian ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang merupakan paparan kriteria-kriteria *best practice* dari pengelolaan PKL di Kota Surakarta dan apa saja yang dapat dijadikan contoh bagi daerah-daerah lainnya. Pada fase kesimpulan, peneliti akan menganbil kesimpulan dari hasil data-data olahan yang sudah dijelaskan di dalam analisis temuan, sehingga akan ditemukan hasil yang diinginkan oleh penelitian ini. Peneliti juga akan memberikan rekomendasi apabila diperlukan.

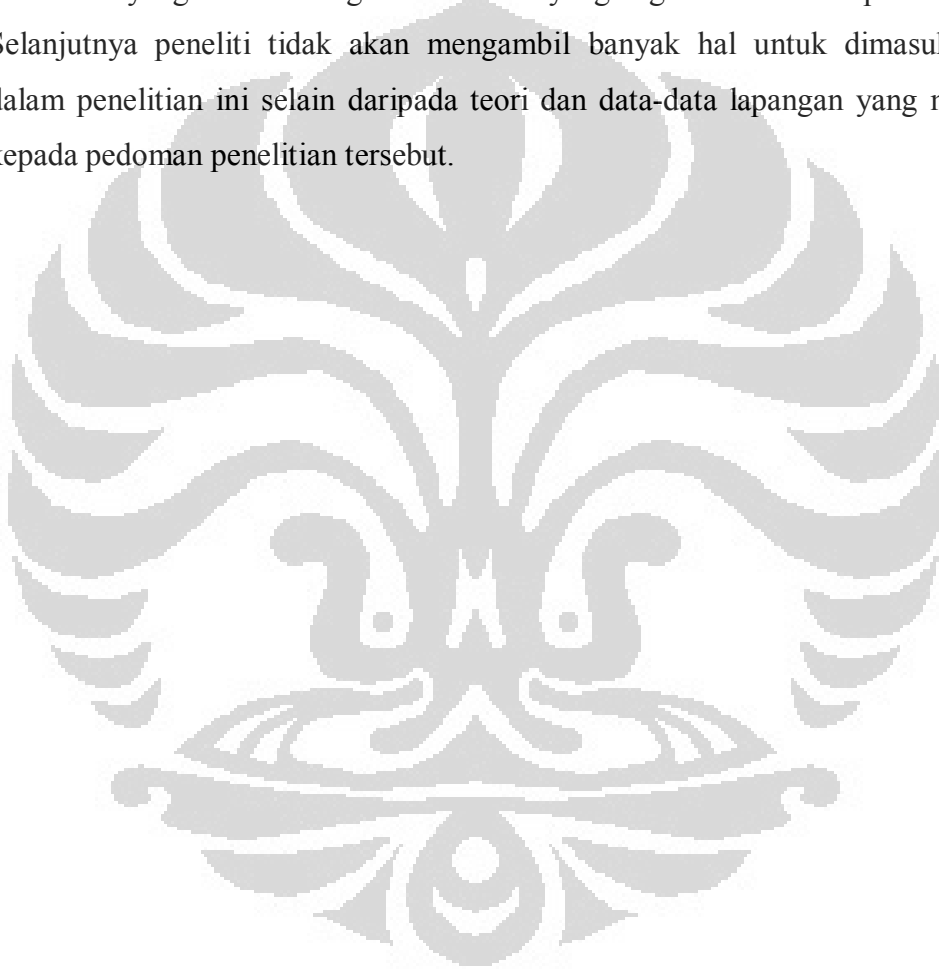
3.7 Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta. Lokasi ini dipilih dengan alasan bahwa program penataan pedagang kaki lima sudah diterapkan dan direlokasikan ke dalam Pasar Klithikan ini. Pasar Klithikan juga

dijadikan percontohan bagi relokasi pedagang kaki lima yang dialihkan ke dalam pasar formal bentukan pemerintah daerah. Oleh karena alasan tersebut, Kemudian peneliti tertarik untuk mengkaji konsep *best practice* ke dalam relokasi PKL Monumen '45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo tersebut.

3.8 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi dengan hanya menganalisis dan mengidentifikasi fenomena yang diteliti dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti tidak akan mengambil banyak hal untuk dimasukkan ke dalam penelitian ini selain daripada teori dan data-data lapangan yang mengacu kepada pedoman penelitian tersebut.



BAB 4

GAMBARAN UMUM

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum dari lokasi penelitian yaitu Kota Surakarta dan gambaran umum dari pedagang kaki lima di Kota Surakarta yang akan menjadi bahasan di dalam analisis pada bab berikutnya.

4.1 Gambaran Umum Kota Surakarta

Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan nama kota Solo, merupakan salah satu kota di propinsi Jawa Tengah. Surakarta terletak di dataran rendah dengan ketinggian \pm 92 meter dari permukaan laut, Surakarta berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan dengan Kabupaten Sukoharjo dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Sukoharjo.

Luas area kota Surakarta sebesar 4.404,06 Ha yang terdiri dari lima kecamatan dengan luas masing-masing kecamatan sebagai berikut (surakartakota.bps.go.id, 2011) :

- Kecamatan Laweyan terdiri dari 11 kelurahan dengan luas 863,83 Ha.
- Kecamatan Serengan terdiri dari 7 kelurahan dengan luas 319,5 Ha.
- Kecamatan Pasar Kliwon terdiri dari 9 kelurahan dengan luas 481,52 Ha.
- Kecamatan Jebres terdiri dari 11 kelurahan dengan luas 1.258,18 Ha.
- Kecamatan Banjarsari terdiri dari 13 kelurahan dengan luas 1.481,1 Ha.

Sebagian besar lahan dipakai sebagai tempat pemukiman sebesar 64 persen, sedangkan untuk kegiatan ekonomi juga meKemudiann lahan yang cukup besar yaitu berkisar antara 15 persen dari luas lahan yang ada.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kota Surakarta (bps.go.id, 2011) jumlah penduduk di Kota Surakarta tercatat sebanyak 500.642 jiwa, dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki, yaitu 257.279 jiwa perempuan dan 243.363 jiwa laki-laki.

Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak, yaitu 157.438 jiwa (31.45%). Kecamatan dengan penduduk terbanyak selanjutnya

adalah Kecamatan jebres sebesar 27,69 persen dari penduduk Kota Surakarta atau sebanyak 138.624 jiwa. Sedangkan Kecamatan Serengan tercatat dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebanyak 44.120 jiwa atau 8,81 persen.

Dengan luas hanya sebesar 44,03 km² membuat tingkat kepadatan penduduk di Kota Surakarta sangat tinggi, bahkan tertinggi di Jawa Tengah, yaitu 11.370 jiwa/ km². Adapun kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Pasar Kliwon dengan tingkat kepadatan sekitar 15.383 jiwa/ km², sedangkan yang terendah sekitar 10.002 jiwa/ km² pada kecamatan Laweyan.

Tabel 4.1
Laju Pertumbuhan Kota Surakarta 2000-2010

Kecamatan	Laju Pertumbuhan (dalam angka)
Banjarsari	0,25
Jebres	0,88
Pasar Kliwon	-0,07
Serengan	-0,59
Laweyan	-0,21

Sumber: Hasil Sensus Penduduk Kota Surakarta 2010 (bps.go.id, 2011)

Menurut hasil sensus pada tahun 2010 seperti yang digambarkan pada tabel di atas, laju pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta selama 1 (satu) dasawarsa dari tahun 2000-2010 menunjukkan angka 0,25 persen dan jauh di bawah angka Propinsi Jawa Tengah yang sebesar 0,46 persen. Tabel di atas menunjukkan terdapat 3 (tiga) kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang minus, yaitu Kecamatan Laweyan (-0,21 persen), Serengan (-0,57 persen), dan Pasar Kliwon (-0,07 persen). Sedangkan Kecamatan Jebres memiliki laju pertumbuhan yang tertinggi bahkan di atas laju pertumbuhan Propinsi Jawa Tengah yakni 0,87 persen. Hal ini dimungkinkan oleh faktor migrasi yang banyak terjadi di kecamatan ini mengingat pada dasawarsa ini wilayah Jebres merupakan wilayah pengembangan serta konsentrasi pelajar dan mahasiswa.

Tabel 4.2
Banyaknya Penduduk menurut Mata Pencaharian di Kota Surakarta 2010

Kecamatan	Peta-ni Sendiri	Buruh Tani	Peng-usaha	Buruh Industri	Buruh Bangun-an	Pedagang	Angkut-an	PNS/ TNI/ POLRI	Pensiun-an	Lain-Lain	Jml
Lawe-yan	50	34	1.480	16.046	12.790	7.318	4.142	4.322	3.236	38.183	87.601
Sereng-an	0	0	2.035	7.047	5.023	5.280	2.287	1.992	931	25.589	50.184
Pasar Kliwon	0	0	2.506	11.400	8.037	8.077	4.906	1.922	1.441	17.975	56.246
Jebres	85	0	2.202	16.853	16.206	5.218	2.813	8.091	3.733	48.016	103.217
Banjarsari	345	721	3.747	20.738	23.572	10.591	5.914	8.061	7.801	36.645	118.135
Jumlah	480	755	11.970	72.084	65.628	36.484	20.062	24.388	17.142	166.408	415.383

Sumber: Surakarta Dalam Angka 2010. (surakartakota.bps.go.id, 2011)

Tabel 4.2 merupakan tabel penduduk Kota Surakarta pada tahun 2010 menurut mata pencahariannya. Mata pencaharian yang paling banyak dimiliki oleh penduduk Surakarta yaitu buruh industri sebesar 72.084 pekerja, disamping pekerjaan lain-lain yang disebutkan dalam tabel 4.2 di atas.

Tabel 4.3
Banyaknya Penduduk 5 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Surakarta 2010

Kecamatan	S1/S2/S3	Tamat SMA	Tamat SMP	Tamat SD	Tidak Tamat SD	Belum Tamat SD	Tidak Sekolah	Jumlah
Laweyan	10.665	23.306	21.348	20.003	5.934	9.405	7.205	97.866
Serengan	4.739	14.316	11.906	14.957	2.837	5.560	1.587	55.902
Pasar Kliwon	7.574	23.541	17.029	15.648	6.967	7.145	2.893	80.797
Jebres	8.518	23.499	23.545	23.739	13.539	13.106	15.035	120.981
Banjarsari	15.918	40.373	33.019	31.934	9.017	18.810	10.485	159.556
Jumlah	47.414	125.035	106.847	106.281	38.294	54.026	37.205	515.102

Sumber: Surakarta Dalam Angka 2010. (surakartakota.bps.go.id, 2009)

Apabila dikaitkan dengan tabel 4.3 tentang penduduk kota Surakarta berdasarkan jenjang pendidikannya, Kemudian yang paling besar jumlahnya yaitu tamatan SMA sebesar 125.035 sehingga tidak aneh apabila kebanyakan masyarakat kota Surakarta sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh industri. Kota Surakarta memiliki beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, tetapi kebanyakan mahasiswa/i yang bersekolah disana merupakan mahasiswa/i dari luar kota Surakarta. Hal yang sama juga terjadi pada para pegawai negeri di lingkungan pemerintahan kota Surakarta, dimana sebagian pegawai negeri sipil bukan merupakan warga kota Surakarta.

4.2 Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Surakarta terjadi akibat beberapa faktor, seperti pengangguran, kemiskinan, lapangan kerja yang minim, kurangnya kesempatan kerja, tidak mencukupinya pendapatan untuk kebutuhan pokok, urbanisasi, lahan usaha yang terbatas, persaingan hidup yang semakin ketat dan peluang. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya akan menimbulkan keterpaksaan bagi para individu yang memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup dengan cara yang halal dan tidak menjadi peminta-minta, yaitu dengan mengadakan usaha kecil-kecilan yang dapat dijalankan tanpa perlu membayar uang penyewaan tempat, itulah pedagang kaki lima. (Dinas Pengelola Pasar, 2012)

Penyebaran pedagang kaki lima di Kota Surakarta, dapat ditemukan di setiap sudut kota, terutama jalan-jalan besar, seperti Jalan Dr.Radjiman, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Urip Sumoharjo, Stadion Manahan, Taman Sriwedari juga berbagai jalan besar dan tempat yang sering dikunjungi masyarakat lainnya. (pengamatan penelitian, 2012)

Sampai saat ini, pedagang kaki lima di Kota Surakarta masih banyak yang belum ditertibkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Adapun data mengenai jumlah pedagang kaki lima dari tahun 2005 sampai tahun 2012 yang sudah ditata dan belum ditata sebagai berikut :

Tabel 4.4
Penataan PKL Kota Surakarta

Tahun	Belum Ditata	Sudah Ditata
2005	5.817	-
2006	4.828	989
2007	3.406	1.422
2008	2.657	749
2009	2.344	313
2010	2.106	238
2011	2.066	40
2012	1.936	130
Jumlah PKL yang sudah tertata		3.881

Sumber: Paparan Penataan PKL Kota Surakarta, diolah kembali oleh peneliti, 2012.

Keberadaan PKL di Kota Surakarta dari tahun 2005 sampai tahun 2012 sedikit demi sedikit mulai menurun seiring dengan dilaksanakannya program penataan PKL disetiap kesempatannya. Setidaknya pencemaran lingkungan baik dalam segi keamanan, ketertiban, kenyamanan juga menjadi berkurang dan beberapa tempat yang biasanya menjadi lahan para pedagang kaki lima untuk berjualan dapat dikembalikan kembali fungsinya sesuai dengan RTRW yang sudah ditetapkan. Penurunan jumlah PKL setiap tahunnya memang tidak terlalu signifikan, saat ini pedagang yang belum terkena penataan masih mencapai angka 1.936 setelah adanya relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Program penataan PKL yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta dibagi ke dalam dua konsep, yaitu membuat kawasan PKL dan membuat kantong-kantong PKL dengan sarana relokasi, *shelter*, gerobak dan tenda. Seluruh pedagang yang akan ditertibkan dengan imbalan berupa fasilitas-fasilitas gratis untuk pengembangan dagangannya, harus memiliki tanda kependudukan asli warga Surakarta. Pengelompokkan penataan pedagang kaki lima ini berdasarkan pertimbangan dari tempat berdagang, jenis dagangan, waktu operasional dan ukuran/jumlah barang yang diperdagangkan. Penataan PKL ini dilaksanakan dengan prioritas dari wilayah yang lebih membutuhkan penanganan lebih dahulu atau wilayah yang banyak dilaporkan masyarakat. Adapun lebih singkatnya konsep penataan PKL yang dilaksanakan oleh Pemkot Surakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar Konsep Penataan PKL

Sumber: Program Kerja Sapol PP Kota Surakarta, diolah kembali oleh peneliti, 2012

Penataan PKL dengan cara merelokasi pedagang ke suatu tempat dilaksanakan pada PKL Monumen Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo. Relokasi ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan jumlah PKL yang berada di Monumen Banjarsari sudah terlalu banyak sampai menutupi hampir seluruh areal Monumen. Lokasi tersebut juga sudah banyak dilaporkan oleh masyarakat setempat karena mengundang banyak tindak kriminal dan asusila. Jenis usaha para PKL yang berada di Monumen Banjarsari juga relatif sama, yaitu menjual barang-barang bekas seperti onderdil kendaraan bermotor dan elektronik. Relokasi ini akan dijelaskan lebih lanjut di bab-bab selanjutnya karena merupakan pokok pembahasan dari penelitian.

Pemberian gerobak pada PKL yang dilaksanakan sebagai salah satu program penataan PKL yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surakarta contohnya adalah para pedagang Kemudiannan yang berjualan di kawasan *City Walk* Slamet Riyadi. Pemberian gerobak dan bantuan lainnya kepada pedagang yang berjualan di kawasan tersebut merupakan suatu upaya agar kawasan terlihat lebih rapi, tertib, bersih dan jauh dari kesan kumuh, sehingga akan lebih banyak pengunjung tertarik untuk mencoba aneka Kemudiannan yang dijual di sepanjang *city walk* Slamet Riyadi yang merupakan jalan utama dari Kota Surakarta tersebut.

Penataan dengan memberikan lahan berupa tenda juga dilaksanakan di dua tempat, yaitu Pasar Ngarsopuro dan Gladak Langan Bogan (Galabo). Pedagang yang diberi tenda ini merupakan pedagang yang dipilih berdasarkan waktu operasional dan jenis barang yang diperjualbelikan. Pasar Ngarsopuro hanya beroperasi pada setiap Sabtu malam di sepanjang jalan Ngarsopuro, tepat di depan Pasar Antik Triwindu. Pasar Ngarsopuro beroperasi pada pukul 17.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB. Barang yang banyak diperjualbelikan di Pasar Ngarsopuro ini adalah *souvenir-souvenir* khas Surakarta karena memang bertujuan untuk menarik pada wisatawan yang berkunjung ke Kota Surakarta. Biasanya juga disela-sela jam operasional pasar terdapat pertunjukan-pertunjukan berupa pegelaran musik dan seni budaya khas Surakarta sehingga Pasar Ngarsopuro akan selalu ramai setiap minggunya.

Pemberian fasilitas tenda dan gerobak juga diberikan kepada pedagang di lokasi kuliner Galabo yang terletak di jalan Gladak dekat Keraton Surakarta. Jam operasional Galabo ini dimulai dari pukul 18.00 s.d. 23.00 WIB tetapi buka setiap harinya. Jenis dagangan di Galabo adalah Kemudiannan atau kuliner khas Kota Surakarta, sehingga banyak wisatawan yang berkunjung untuk menikmati Kemudiannan khas Surakarta tanpa perlu berpindah-pindah ke banyak tempat.

Selain dengan adanya relokasi, pemberian gerobak dan tenda, pemerintah kota surakarta juga memberikan lahan bagi para pedagang kaki lima berupa *shelter* yang dapat ditempati oleh pedagang kaki lima di berbagai tempat yang biasanya dipakai oleh pedagang kaki lima agar dapat terlihat lebih tertib dan tidak mengganggu keindahan lingkungan. Sampai saat ini jumlah *shelter* bentukan pemerintah Kota Surakarta yang sudah ada mencapai 644 buah. Rincian penyebaran *shelter* ini dapat dilihat pada tabel 4.5 :

Tabel 4.5
Shelter PKL Kota Surakarta

Lokasi	Jumlah
Taman Jurug	23
Taman Kemudiamn Pahlawan	46
Pedaringan	18
Manahan	180
Solo Square	89
Loji Wetan	26
Dr.Wahidin	16
Jl.Hasanudin	92
Pucang Sawit	9
Timur PDAM	9
Jl.Menteri Supeno	40
Klithikan Silir	96
JUMLAH	644

Sumber: Paparan Penataan PKL Kota Surakarta, diolah kembali oleh peneliti, 2012.

Shelter-shelter ini berfungsi agar pedagang kaki lima dapat berjualan tanpa menggunakan fasilitas umum (trotoar) sebagai tempat untuk berjualannya. Para pedagang kaki lima yang diberi *shelter* ini juga menjadi pedagang legal yang sudah memiliki berkas-berkas sebagai pedagang formal yang sah dan diakui oleh pemerintah. Biasanya jenis usaha pedagang kaki lima yang diberikan lahan berupa *shelter* merupakan pedagang yang berjualan Kemudiannan dan barang-barang *souvenir* di tempat-tempat wisata dengan jumlah barang yang banyak dan bervariasi.

BAB 5

ANALISIS *BEST PRACTICE* RELOKASI PKL MONUMEN '45 BANJARSARI KE PASAR NOTOHARJO

Bab ini akan memaparkan analisis dari hasil data yang diperoleh dan teori yang telah dijelaskan dalam bab 2. Pada bab ini akan dibagi ke dalam beberapa sub-bab. Sub-bab pertama akan menjelaskan pelaksanaan relokasi PKL Monumen Banjarsari secara keseluruhan, sub-bab selanjutnya akan memaparkan analisis konsep *best practice* yang menjadi topik utama dari penelitian ini, dan sub-bab terakhir akan memaparkan *lesson learned* yang dapat diambil dari keseluruhan analisis terhadap relokasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta.

5.1 Pelaksanaan Relokasi PKL Monumen '45 Banjarsari ke Pasar Notoharjo

Monumen '45 Banjarsari merupakan sebuah bangunan yang merupakan simbol dari sejarah yang pernah ditorehkan di kota Surakarta. Monumen ini dibangun di kawasan Banjarsari yang juga dikelilingi oleh taman untuk keperluan masyarakat Surakarta. Tetapi pada zaman krisis ekonomi era orde baru, kawasan Monumen '45 Banjarsari tersebut tiba-tiba dipenuhi oleh para pedagang kaki lima yang menjual barang-barang bekas (klithikan) sehingga sampai pada sebelum dilaksanakannya relokasi, kawasan tersebut kerap kali disebut juga sebagai Pasar Klithikan Banjarsari, padahal tidak ada legalisasi dari pemerintah. Pasar Klithikan Banjarsari ini mulai muncul sekitar tahun 1997, ketika krisis ekonomi mulai melanda Indonesia. Tuntutan ekonomi menyebabkan beberapa orang berinisiatif untuk memulai usaha dengan menggelar dagangan di sekitar monumen. Pada tahun 2001, ada hampir 1.000 PKL yang beroperasi di sekitar wilayah itu. (Hetifah, 2008).

Wawancara dengan beberapa narasumber yang ditanyakan kondisi sebelum relokasi di sekitar Monumen juga mengatakan hal yang sama. Seperti yang disebutkan oleh Ibu Sunarti, Sekretaris Satpol PP pada Wawancara tanggal 4 April 2012, dimana Monumen yang seharusnya dimanfaatkan untuk fasilitas umum, tempat masyarakat untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan menjadi sangat terganggu dengan banyaknya PKL-PKL yang berdagang disana. Tentunya PKL-PKL tersebut tidak memberikan kenyamanan yang seharusnya

didapatkan oleh masyarakat yang ingin berkunjung dan melaksanakan berbagai kegiatan disana, karena tempat menjadi kumuh, lahan untuk melakukan kegiatan banyak yang dipakai untuk berdagang oleh PKL, sehingga akhirnya kawasan Monumen '45 Banjarsari benar-benar berfungsi sebagai tempat untuk jual-beli pedagang dan konsumen saja. Pada umumnya pedagang disana menjual barang-barang bekas seperti onderdil-onderdil kendaraan, barang-barang elektronik yang masih dapat dipergunakan dan barang-barang yang mungkin jarang orang temukan di pasar-pasar pada umumnya, sehingga prospek perdagangan disana menjadi besar dan menjanjikan dan mengundang lebih banyak lagi PKL untuk menetap disana. Oleh karena itu pula pasar tersebut dinamakan pasar klithikan, karena pada arti yang sebenarnya, klithikan itu berarti barang-barang bekas yang masih dapat dipergunakan.

Permasalahan ini menjadi sorotan banyak pihak terutama warga yang berada di sekitar monumen tersebut karena lingkungan di sekitar tempat tinggal warga menjadi tidak terawat dan terkesan kumuh. Banyak warga yang juga menuntut pembubaran PKL di sekitar monumen dikarenakan PKL disana mendatangkan hal-hal baru yang bersifat negatf, seperti prostitusi setiap malamnya, tempat untuk bermabuk-mabukan dan sarang dari kriminalitas. Salah satu narasumber dari penelitian ini, yaitu Ibu Sunarti yang menjabat sebagai Sekretaris Satpol PP Kota Surakarta juga mengatakan hal yang serupa, bahwa PKL disana meresahkan warga dan dianggap sebagai 'pasar maling', "*Dulu itu sebutannya pasar maling, orang yang hasil maling anu dijual disana cepet gitu loh..*". Hal ini tentu saja memberikan reaksi kepada masyarakat setempat untuk mengadukannya ke pihak yang berwenang, sehingga masyarakat setempat berinisiatif untuk mengusung adanya relokasi PKL Monumen '45 Banjarsari tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Joko Pramono, salah satu informan dari masyarakat yang juga menjabat sebagai ketua RW di lingkungan Monumen '45 Banjarsari,

"Oh ya ada, karena program ini bangkit kan memang pertama dari warga dulu, itu memang program dari pemkot, tapi terutama itu diusulkan dari tingkat RT, RW, lalu dibawa ke Kelurahan dan diberangkatkan ke Pemkot, sehingga Pemkot itu sendiri tidak ada beban karena didukung oleh

masyarakat, terutama RT, RW dan lingkungan memang sudah ada pembahasan dulu, lalu diadakan pendekatan, kalau tidak ada dukungan dari warga sekitar, otomatis nanti PKL itu anu mungkin ada reaksi tapi seHINGA itu ada pendekatan dari pejabat sendiri...” (wawancara dengan Joko Pramono, 5 April 2012)

Dari hasil wawancara tersebut dan beberapa sumber lainnya yang peneliti dapatkan, tahapan dari diadakannya relokasi tersebut bermula dari kegelisahan masyarakat yang merasakan ketidaknyamanan dengan adanya PKL di sekitar Monumen '45 Banjarsari tersebut. Warga yang merasakan ketidaknyamanan oleh adanya PKL di sekitar Monumen '45 Banjarsari tersebut, akhirnya melaporkan ke pihak RT/RW, lalu setelah laporan masuk ke pihak RT/RW. Permasalahan ini kembali didiskusikan dan setelah itu dilaporkan kepada pihak Kelurahan, kemudian pihak Kelurahan menyampaikannya langsung kepada pihak Pemkot Surakarta dan dari laporan warga masyarakat sekitar pula akhirnya proses relokasi ini dilakukan yang menjadi sebuah program Pemerintah Kota Surakarta.

Walikota Joko Widodo merespon keresahan para PKL Banjarsari dengan mengundang perwakilan dari 8 paguyuban PKL Banjarsari dalam acara ramah tamah di rumah dinas *Loji Gandrung* pada tanggal 16 Agustus 2005. Ini adalah dialog pertama yang dilanjutkan dengan puluhan pertemuan selanjutnya. Pemerintah Kota Solo juga berupaya untuk mengakomodir pendapat *stakeholder* kota lain dengan mengundang perwakilan LSM, Perguruan Tinggi, Media, beserta kepala-kepala kantor dan dinas terkait untuk membicarakan rencana relokasi PKL Banjarsari.

Melalui proses konsultatif yang cukup panjang inilah, akhirnya sikap PKL Banjarsari melunak. Sejak bulan Februari 2006 telah terbangun sikap PKL Banjarsari untuk menerima tawaran relokasi dari Pemerintah Kota dengan syarat Pemerintah Kota memberi jaminan hitam di atas putih atas kelangsungan usaha ekonomi PKL antara lain dengan menyediakan semua fasilitas yang di butuhkan seperti kios, surat izin usaha, kredit lunak, dan pelatihan secara gratis. Selain itu para pedagang juga mengajukan persyaratan lainnya seperti: desain bangunan di lokasi baru harus sesuai dengan kebutuhan pedagang, transportasi ke lokasi dipermudah dan dapat dijangkau oleh warga, keamanan di lokasi baru dapat

terjamin, disediakan kamar mandi dan tempat ibadah, adanya subsidi pada pedagang selama pasar masih belum ramai. PKL direlokasi secara bersamaan, serta dibangunnya citra lokasi baru (Semanggi) yang baik sehingga dapat membentuk opini publik yang positif. Para PKL juga meminta jaminan bahwa, lokasi Banjarsari yang ditinggalkan tidak akan ditempati lagi oleh PKL lain.

Pada tanggal 23 Juli 2006 Prosesi Kirab Budaya dilaksanakan dengan meriah menandai proses boyongan resmi para PKL dari kawasan Monumen Juang 45 Banjarsari menuju lokasi yang baru di Pasar Semanggi yang diberi nama pasar *klithikan* Notoharjo. Upacara yang kental nuansa Jawanya ini diikuti oleh seluruh PKL Banjarsari, Walikota, Wakil Walikota, rombongan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota, para anggota DPRD, pasukan pengibar bendera pusaka, berbagai elemen masyarakat, serta disaksikan ribuan warga kota di jalan-jalan yang dilalui kirab. (Hetifah, 2008)

Pemilihan lokasi relokasi juga ditetapkan dengan berbagai pertimbangan. Menurut Kepala Subdit Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, Bapak Didik Angono, pemilihan tempat disesuaikan dengan kebutuhan yang akan ditempati oleh para pedagang kaki lima yang akan direlokasi. Pemilihan lokasi di Semanggi menjadi sebuah perbincangan dan menimbulkan banyak pro dan kontra diantara pedagang yang akan direlokasi ke daerah Semanggi tersebut, karena daerah Semanggi dianggap tidak memiliki aksesibilitas yang mencukupi untuk daerah perdagangan, karena jarang dilalui kendaraan umum dan memang tidak ada kendaraan umum yang melewati area pembangunan pasar pada saat itu.

Lokasi yang akan dijadikan pasar Notoharjo itupun terkenal dengan tempat lokalisasi, dari sisi pedagang yang akan direlokasi tentu akan mengundang kontra, karena pedagang khawatir konsumen tidak mau berkunjung karena tempat yang sudah dinilai buruk oleh adanya lokalisasi tersebut sebelumnya. Dari sisi pemerintah berpendapat lain bahwa lokalisasi tersebut akan hilang sendirinya dengan keramaian yang akan dibuat pasar Notoharjo tersebut, dan tentunya dengan dibangunnya Pasar Notoharjo di lokasi tersebut akan menyingkirkan keberadaan tempat-tempat prostitusinya. Akhirnya dengan *bargaining* antara pemerintah dan pedagang yang akan direlokasi terjadi kesepakatan dimana lokasi

tersebut tetap akan dijadikan tempat relokasi bagi pedagang, tetapi akan banyak dibangun akses menuju tempat dan pedagang meminta untuk mempublikasikan pasar baru pedagang dengan berbagai media.



Gambar 5.1
Tahapan Penanganan Masalah PKL

Sumber: Paparan Penataan PKL Pemerintah Kota Surakarta, diolah kembali oleh peneliti, 2012

Pelaksanaan relokasi ini juga dapat dilihat dari kapabilitas inovasinya seperti yang dituliskan oleh Skarzynski dan Gibson (2008: 229-232) dalam kerangka teori, dimana ada empat hal yang membangun kapabilitas sebuah inovasi. Pertama adalah kepemimpinan dan organisasi yang menyelenggarakan inovasi tersebut. Sebuah inovasi dapat berjalan dan tetap bertahan sesuai jalur menuju ketercapaian tujuannya berawal dari pemimpin dari sebuah organisasi yang mampu mengarahkan organisasinya itu agar dapat mempertahankan atas hasil yang telah dicapai dari inovasi yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan relokasi ini juga tidak terlepas dari peranan Walikota Joko Widodo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Kota Surakarta dan turun langsung menangani permasalahan PKL. Walikota juga mengajak seluruh *stakeholder* dan jajarannya agar dapat berpartisipasi dengan maksimal tujuan bersama yang diinginkan. Pada kenyataannya, Walikota Joko Widodo berhasil menggerakkan banyak pihak untuk membantu pelaksanaan relokasi yang terbilang sangat besar.

Kedua adalah kultur dan nilai-nilai. Bapak Didik Anggono, Narasumber dari Dinas Pengelola Pasar mengatakan, relokasi ini mengutamakan asas kultur dan nilai-nilai kemanusiaan. Proses yang berlangsung dalam tahapan awal relokasi ini pun menggunakan diskusi-diskusi santai tanpa ada pemaksaan secara langsung dari pemerintah, mengalihkan pemahaman para pedagang tentang dimana dan bagaimana mereka seharusnya berjualan. Pendekatan ini pula memakan waktu yang lama karena proses yang bertahap sampai terjadi negosiasi antara pemerintah dan pedagang kaki lima, kesepakatan pun dapat ditentukan tanpa memotong sebelah pihak saja.

Ketiga adalah proses dan kebutuhan dalam pelaksanaan relokasi. Pemerintah Surakarta sudah menyiapkan secara matang dalam persiapan relokasi, setelah masyarakat mengajukan aduan tentang dampak negatif PKL di Monumen Banjarsari, Pemkot Surakarta mulai menyediakan semua yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan relokasi. Seperti yang disebutkan oleh Bapak Didik selaku Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

“Kita kuasai data dan akan kita apakan data ini artinya dengan eee planning dari Pemkot Surakarta dengan sudah adanya data ini, kita eee untuk menormalkan kembali atau merevitalisasi tempat itu harus bagaimana, relokasi lah solusinya, kemudian kita mencarikan tempat, dan tempatnya sudah ada, dengan data yang sudah ada, kita membuat sejumlah eeee bangunan yang sesuai dengan jumlah PKL yang terdata, kita tidak hanya membangun kios-kios sejumlah itu, kita membangun sekitar 1.018 kios. Jadi ada sisa dari jumlah PKL itu, kemudian setelah tempat oke, tempat ada kemudian dana ada, anggaran kita kucurkan untuk pembangunan pasar itu..” (wawancara dengan Didik Anggono, 9 April 2012)

Keempat yaitu Sumber Daya Manusia dan kemampuannya juga dapat terlihat dari poin ketiga, dimana kesiapan SDM terlihat dari proses pelaksanaan dan ketersediaan peralatan untuk melakukan relokasi tersebut. Keempat poin ini membangun sebuah kapabilitas dari inovasi pemerintah Kota Surakarta dalam merelokasi 989 PKL Monumen Banjarsari ke Pasar Notoharjo.

5.2 Analisis Konsep *Best Practice*

Bagian ini akan memaparkan analisis dari hasil pengumpulan data dan teori yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Secara umum, pembahasan analisis yang akan dijelaskan pada bab ini terdiri dari dimensi-dimensi konsep *best practice* dan akan diambil ringkasan secara garis besarnya untuk menjadi sebuah kesimpulan di bab berikutnya.

5.2.1 Dimensi *Impact*

Indikator yang digunakan dalam dimensi *impact* ini dalam pelaksanaan relokasi PKL Monumen '45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta antara lain dampak ekonomi dan dampak lingkungan.

1. Dampak Ekonomi

Pelaksanaan relokasi PKL Monumen '45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta ini pastinya melibatkan banyak faktor ekonomi di dalamnya, termasuk dampak yang terjadi setelah adanya relokasi tersebut. Dampak yang dapat terukur dari hasil pengamatan peneliti setelah melakukan studi lapangan langsung dan wawancara pihak yang terlibat paling banyak tentang masalah perekonomian, baik dari pihak pemerintah, warga masyarakat sekitar pasar Notoharjo maupun pedagang kaki lima yang terkena relokasi tersebut. Dampak yang masing-masing dirasakan ada yang berdasarkan dampak langsung maupun tidak langsung dan dampak yang dirasakan berupa dampak jangka pendek (dalam tahap adaptasi) maupun dampak jangka panjang yang bersifat permanen.

Pertama, dampak yang dirasakan oleh pemerintah dari faktor ekonomi antara lain kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta yang dihasilkan dari Pasar Notoharjo. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Didik Anggono, Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan PKL Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, bahwa saat dulu para PKL masih menduduki kawasan Monumen Banjarsari, para PKL hanya dipungut sebesar 200 rupiah atau 300 rupiah dan kadang-kadang juga tidak selalu dimintai setiap harinya, karena ketika PKL tersebut tidak berjualan, Kemudian tidak dipungut juga biaya retribusinya. Sedangkan saat ini setelah para PKL menempati kios gratis yang diberikan pemerintah, yang berada dalam pengelolaan masing-masing pasar, Kemudian

pemasukan dari masing-masing PKL menjadi meningkat menjadi 2.500 rupiah per kiosnya. Berarti dampak dari PAD yang dihasilkan Pasar Notoharjo hasil relokasi PKL Monumen Banjarsari tersebut dapat dikatakan menaik dengan signifikan karena nilai dari 200-300 rupiah ke 2.500 rupiah per kiosnya, sehingga dapat dihitung kira-kira pendapatan naik 90% dari biasanya dan tentu saja hal ini sudah diperkirakan oleh Pemerintah Kota Surakarta, karena untuk ‘balik modal’ setelah membangun pasar dan memberikan kios gratis kepada para PKL.

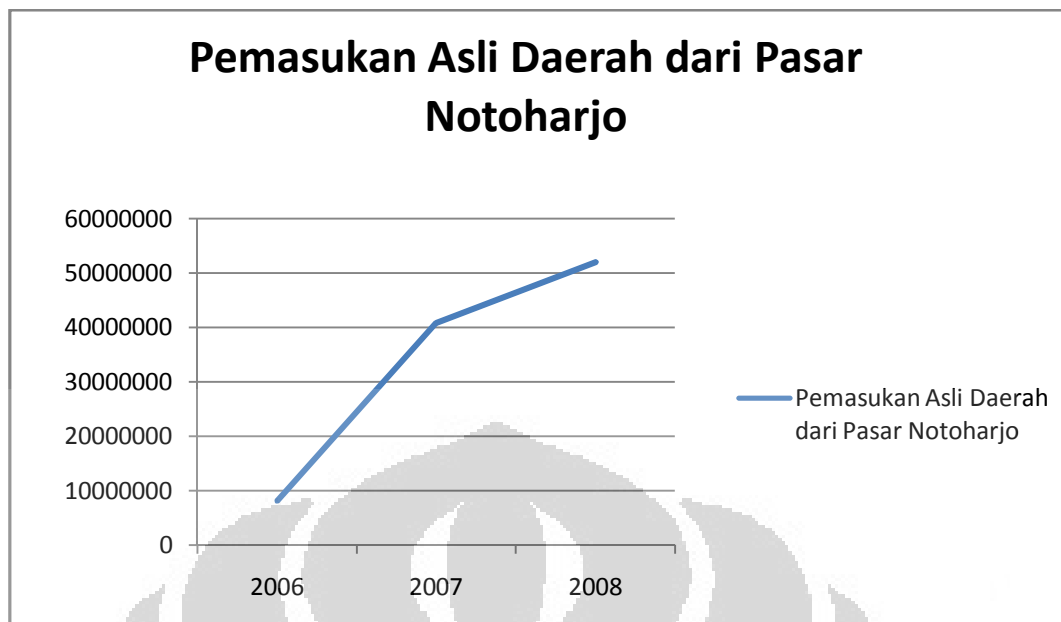
Tabel 5.1
Kontribusi Pedagang Pasar Notoharjo
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta

Tahun	Jumlah Kontribusi (dalam rupiah)	Kenaikan Kontribusi (dalam persen)	
2006	81.906.000	79,96%	21,35%
2007	408.792.000		
2008	519.806.000		

Sumber: diolah oleh peneliti, 2012.

Adapun data yang peneliti peroleh dari Dinas Pengelola Pasar (2008) seperti berikut: kontribusi pedagang kaki lima di Monumen Banjarsari tahun 2005 sebesar Rp 44.530.000 (1,2% dari PAD), tahun 2006 sebesar Rp 72.197.000 (1,4%). Kenaikan kontribusi di Monumen Banjarsari dari tahun 2005 ke tahun 2006 sebesar Rp. 20.667.000 atau 0,2 %.

Kontribusi pedagang kaki lima Pasar Notoharjo tahun 2006 sebesar Rp. 81.906.000 atau (0,26 %) sedangkan tahun 2007 sebesar Rp.408.792.000 (7%), sedangkan tahun 2008 sebesar Rp.519.806.000 (69 %). Kenaikan kontribusi Pasar Notoharjo dari tahun 2006 ke tahun 2007 sebesar Rp.326.886.000 atau sekitar 79,96%. Sedangkan kenaikan kontribusi dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar Rp. 111.014.000 atau 21,35%. Bahkan menurut Bapak Murdi selaku Ketua Pasar Klithikan Notoharjo, pada tahun 2011 pendapatan meningkat dari sekitaran 1 Miliar per tahun menjadi 1,8 Miliar per tahun dari Pasar Klithikan Notoharjo saja.



Grafik 5.1
Pertumbuhan Kontribusi Pasar Notoharjo
Terhadap Pemasukan Asli Daerah Kota Surakarta

Sumber: diolah oleh peneliti, 2012

Pemaparan di atas mengenai dampak yang terjadi pada PAD Kota Surakarta itu sendiri merupakan sebuah dampak yang positif, sehingga pemerintah kota Surakarta dapat dikatakan mampu memaksimalkan dan memanfaatkan keberadaan PKL yang direlokasi ke pasar bentukan khusus relokasi ini.

Selanjutnya adalah dampak yang dirasakan oleh pedagang kaki lima yang terkena relokasi, peneliti mendapatkan data yang bermacam-macam dari hasil pencarian data, dimana ada pedagang yang merasa lebih untung untuk berdagang di pasar dan ada juga yang mendapatkan lebih banyak pendapatan sewaktu berjualan di Monumen Banjarsari ketika menjadi PKL. Bapak Sunarto selaku narasumber yang merupakan pedagang di Pasar Klithikan Notoharjo yang dahulu terkena relokasi dari Monumen '45 Banjarsari memaparkan bahwa untuk pendapatannya lebih besar sewaktu masih menjadi PKL di Monumen Banjarsari, karena akses perdagangan lebih mudah dan masyarakat juga seperti sudah sangat tahu dimana harus mencari onderdil/barang-barang bekas, kalau bukan di Monumen '45 Banjarsari, dimana lagi. Relokasi memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Pak Sunarto, dimana faktor lokasi kios juga menjadi pertimbangan bagi para konsumen yang akan membeli. Bapak Sunarto mendapatkan kios agak ke dalam pasar, konsumen yang datang tidak sebanyak pedagang-pedagang yang

berada di depan wilayah pasar, paparnya. Hal ini juga menjadi salahsatu dilema bagi para pedagang berdasarkan lokasi kios-kiosnya yang menentukan sedikit-banyaknya konsumen yang datang kepada pedagang.

Pernyataan yang berbeda datang dari Bapak Nanang, pedagang yang juga terkena relokasi dari Monumen Banjarsari dan memiliki kios di Pasar Notoharjo itu mengatakan bahwa dirinya mendapatkan pendapatan yang cukup meningkat karena dia dapat menginventaris barang-barang lebih banyak lagi sehingga tidak perlu konsumennya menunggu keberadaan barang dan akhirnya malah mencari pedagang lainnya. Meskipun sedikit kenaikan penghasilannya, tetapi tetap meningkat dan saat pedagang menempati Pasar Notoharjo itu berarti pedagang sudah bukan menjadi pedagang kaki lima lagi tetapi sudah menjadi pedagang resmi yang sudah mengantongi surat izin meskipun diberikan seara cuma-cuma oleh pemerintah pada saat direlokasi.

Adanya perbedaan pendapat ini peneliti tanyakan kepada narasumber berikutnya yaitu Bapak Sudarmo selaku pengamat atau akademisi dari Universitas Negeri Sebelas Maret Kota Surakarta. Beliau memaparkan sebenarnya memang saat diadakannya relokasi itu ada kubu yang setuju dan ada juga yang tidak setuju, sehingga mungkin pembagian lokasi kiosnya terdapat suatu indikasi kecurangan dimana pihak yang setuju dan pro-pemerintah akan mendapatkan tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen atau masyarakat, sedangkan untuk pihak yang tidak setuju ditempatkan di tempat yang kurang strategis. Pak Darmo dapat mengatakan hal ini berdasarkan hasil penelitiannya dalam relokasi tersebut, sebenarnya masih banyak pihak yang merasa dirugikan dari program relokasi tersebut dan merasa dirinya hanya ikut-ikutan dan jadi terpaksa untuk mengikuti kemauan dari pemerintah agar mau pindah ke tempat relokasi.

Bapak Sudarmo juga mengatakan hasil penelitiannya menemukan suatu kesenjangan pada kehidupan para PKL setelah direlokasi. Ada beberapa dari PKL yang bermodal kecil tidak dapat *survive* dengan kios barunya dan makin tersingkir dengan para pemodal besar yang dapat memenuhi kiosnya dengan barang-barang penjualan sehingga pedagang memilih untuk menjual kiosnya kepada yang bermodal lebih besar lagi dan tentu saja hal ini lepas dari tanggungjawab pemerintah karena tidak ada dalam kesepakatan sebelumnya.

Persaingan begitu besar saat para pedagang kaki lima direlokasi ke pasar Notoharjo, karena meskipun pedagang semua diberikan hak yang sama, tetap saja bagi yang bermodal kecil untuk tetap menghidupkan kiosnya tersebut lama-lama pedagang akan tersingkir. Permasalahan ini akhirnya dicoba diatasi oleh Persatuan Pedagang Kaki Lima Pasar Klithikan yang akhirnya mendirikan suatu koperasi yang berfungsi sebagai rumah modal bagi pedagang-pedagang yang kekurangan modalnya, sehingga dampak buruk perekonomian pedagang kaki lima pada saat awal-awal tadi hanya masuk pada kategori dampak jangka pendek (dalam tahap adaptasi) sebelum dibentuknya sebuah solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Dampak ekonomi yang dirasakan secara langsung dari relokasi ini juga ternyata tidak hanya dirasakan oleh pihak yang berkaitan langsung seperti pemerintah atau pedagang, tetapi dampak ekonomi ini juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar karena dengan didirikannya Pasar Notoharjo ini juga berarti membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaannya. Masyarakat sekitar yang ditarik menjadi pekerja disana biasanya bekerja sebagai pekerja kebersihan, parkir, keamanan dan ketertiban sekitar pasar sehingga menurunkan angka pengangguran di kawasan Kecamatan Pasar Kliwon khususnya di Kelurahan Semanggi.

Sub-indikator selanjutnya yaitu dampak lingkungan. Selain dampak ekonomi, yang dapat dirasakan langsung dari hasil relokasi tersebut adalah dampak lingkungan. Dampak lingkungan dalam pembahasan kali ini dibagi menjadi dua lokasi, yaitu dampak di lingkungan Monumen '45 Banjarsari dan dampak di lingkungan Pasar Notoharjo.

Pertama, dampak di lingkungan Monumen Banjarsari setelah diadakannya relokasi, begitu banyak perubahan yang dirasakan oleh berbagai pihak, terutama warga masyarakat sekitar. Seperti hasil wawancara peneliti kepada dua orang narasumber yaitu warga sekitar Monumen Banjarsari, Bapak Joko dan Bapak Sukatno, pedagang sangat berterima kasih atas relokasi PKL Monumen Banjarsari tersebut karena sudah merubah banyak hal. Menurut pedagang, setelah diadakannya relokasi pemandangan di sekitar monumen menjadi lepas dan tidak ada yang menutupi, masyarakat pun dapat menghirup udara segar karena setelah direlokasi, penghijauan di taman sekitaran monumen kembali dilakukan.

Masyarakat menjadikan monumen sebagai tempat *refreshing* untuk mengurangi rasa penat dan untuk sekedar beristirahat. Monumen setelah relokasi juga menjadi tempat yang dapat digunakan untuk *event-event* yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, misalnya untuk olahraga anak-anak sekolahan, acara-acara peringatan dan sebagainya. Berikut penjelasan secara rinci yang dikemukakan oleh Bapak Joko, manfaat dari relokasi PKL tersebut (wawancara dengan Joko Pramono, 5 April 2012) :

1. Pada lingkungan sekitar Monumen Banjarsari, masyarakat dapat kembali merasakan pemandangan ‘lepas’ karena sudah tidak tertutup dengan adanya kios-kios PKL yang dianggap mengganggu keindahan pemandangan selama ini.
2. Masyarakat dapat kembali menghirup udara segar, karena sekarang sudah banyak penghijauan sehingga orang-orang yang merasa penat dan butuh istirahat, banyak yang datang ke Monumen Banjarsari untuk sekedar *refreshing*.
3. Anak-anak sekolah dapat kembali menggunakan Monumen Banjarsari sebagai fasilitas untuk berolahraga dan mengadakan acara-acara lainnya.



Gambar 5.2

Kondisi Monumen '45 Banjarsari Sebelum Relokasi

Sumber: Dinas Pengelola Pasar Kota Surakarta, 2006

Gambar 5.2 memperlihatkan kondisi sekitar Monumen Banjarsari yang masih banyak dihinggapi oleh para PKL sebelum direlokasi. Sepanjang pelataran

monumen menjadi tempat untuk bertransaksi dan berjual-beli layaknya pasar-pasar pada umumnya. Hal ini tentu yang menjadi perhatian warga setempat karena sebenarnya tempat tersebut tidak tepat pada fungsinya.

Bapak Joko, narasumber dari salah satu warga sekitar Monumen Banjarsari juga memaparkan keprihatinannya terhadap kondisi sebelum diadakannya relokasi.

“Sebelum relokasi itu memang keadaannya kumuh, sehingga ehh penataan itu sampe depan rumah aja ga dapat parkir sulit ditata dan banyak kerawanan tentang kejahatan dan banyak malempun banyak PSK maupun sarang banci-banci ya mbak disini. Sehingga dulu disini hampir ada 1000 PKL disini karena sekitaran jalan disini itu pasti ada PKL disetiap jalannya.” (wawancara dengan Joko Pramono, 5 April 2012)



Gambar 5.3

Kondisi Monumen '45 Banjarsari Setelah Relokasi

Sumber: Pengamatan Peneliti, 2012

Sedangkan gambar 5.2 menunjukkan kondisi monumen Banjarsari setelah para PKL direlokasi. Dua gambar tersebut menunjukkan monumen tetapi dapat dilihat perbedaannya, dimana jalan menuju monumen tampak terhalangi oleh adanya PKL-PKL yang masih berjualan sepanjang jalan tersebut, tetapi di gambar selanjutnya, dari jalan gerbang utama menuju monumen terlihat bebas dari PKL yang berjualan sehingga dapat terlihat dengan jelas pemandangan di sepanjang jalan menuju monumen tersebut.

Dampak lingkungan yang selanjutnya yaitu dampak lingkungan sekitaran Pasar Notoharjo. Menurut para pedagang kaki lima yang peneliti wawancara, dahulu wilayah Pasar Notoharjo ini dikenal dengan sebutan daerah 'silir' atau daerah lokalisasi bagi prostitusi yang terselubung. Daerah ini merupakan daerah yang terpelosok dari wilayah kota di Surakarta. Fasilitas umum untuk menuju ke daerah tersebut juga masih kurang dan hanya ada satu angkutan saja yang benar-benar melewati daerah sana, yaitu angkot 04. Hal ini yang sebenarnya menjadi alasan para PKL awalnya menolak untuk dipindahkan. Pada akhirnya setelah Pasar Notoharjo didirikan, lokalisasi pun menjadi tidak ada dan diganti dengan *Islamic Center* tepat di sebelah Pasar Notoharjo. Pemerintah mencoba menepati janjinya untuk mempromosikan Pasar Notoharjo secara masif, dari media cetak, media televisi, radio hingga papan petunjuk jalan yang pada akhirnya dari tahun ke tahun julukan 'silir' bagi daerah tersebut lama-lama berganti dan digantikan dengan daerah Pasar Notoharjo.

Secara garis besar, dampak lingkungan dari relokasi tersebut hingga saat ini masih dirasakan positif oleh pihak-pihak yang terkait, karena banyaknya perubahan-perubahan ke arah positif yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

5.2.2 Dimensi *Partnership*

Dimensi *partnership* pada penelitian ini akan difokuskan kepada pihak-pihak yang terkait dalam setiap proses pelaksanaan relokasi yaitu masyarakat sipil, masyarakat ekonomi (pedagang/konsumen/pengusaha), pemerintah dan birokrasi. Masing-masing indikator akan dibagi lagi kedalam dua sub-indikator yang dapat dinilai berdasarkan partisipasi dan pembagian kerjasama yang telah dilaksanakan dalam proses relokasi.

1. Masyarakat Sipil

Keterlibatan masyarakat sipil dalam pelaksanaan relokasi ini dimulai dari awal perencanaan relokasi PKL Monumen Banjarsari. Tuntutan relokasi sendiri pada awalnya memang datang langsung dari masyarakat setempat yang mengaku terganggu oleh adanya PKL yang memenuhi kawasan Monumen Banjarsari, yang

mengakibatkan banyak unsur-unsur negatif bermunculan akibat banyaknya PKL di kawasan tersebut. Kawasan Monumen Banjarsari merupakan kawasan yang padat penduduk, sehingga penduduk setempat merasakan efek langsung dari menjamurnya PKL di Monumen Banjarsari tersebut, seperti tingkat kriminalitas yang semakin meningkat, kenyamanan dan kebersihan tidak terjaga, pada malam hari juga menjadi tempat untuk melakukan maksiat seperti prostitusi dan mabuk-mabukan.

Partisipasi pertama dari masyarakat setempat adalah dengan mengadakan pertemuan di tingkat RW untuk mendiskusikan permasalahan PKL tersebut. Dari hasil diskusi, lahirlah sebuah kesepakatan untuk melaporkan permasalahan ini kepada pihak yang lebih tinggi kewenangannya, yaitu Kelurahan. Setelah pihak kelurahan menerima laporan dari warga masyarakat, pihak kelurahan yang langsung menyampaikannya kepada pemerintah.

Sebenarnya rencana relokasi PKL Monumen Banjarsari sudah ada semenjak zaman kepemimpinan Slamet Suryanto, tetapi masih banyaknya hambatan sehingga sampai akhir jabatannya relokasi belum juga dapat dilaksanakan. Laporan dari masyarakat setempat menjadi “juru kunci” dari diadakannya relokasi tersebut, karena menjadi alasan terkuat untuk mendesak PKL agar mau direlokasi.

Untuk memperlihatkan keprihatinan pedagang, warga sekitar Monumen Banjarsari tidak merayakan Hari Kemerdekaan pada tahun 2004 karena pedagang merasa “terjajah” oleh PKL yang pada saat itu tetap mempertahankan Monumen Banjarsari sebagai tempat berdagang pedagang. Warga kelurahan yang terdiri dari 31 RT dan 9 RW, dan 13 sekolah yang berada di lingkungan kelurahan tersebut mendukung program relokasi dengan alasan dahulu Monumen Banjarsari 45 dapat digunakan untuk olahraga tetapi setelah merebaknya PKL Banjarsari, untuk berolahraga pedagang harus pergi ke stadion Manahan. Dukungan itu diwujudkan dengan 2000 tandatangan. Keinginan untuk relokasi juga disampaikan warga melalui SMS kepada Walikota dan Wakil Walikota yang menghendaki pada tanggal 17 Agustus 2006 lokasi Monumen Banjarsari dapat dipergunakan untuk melakukan upacara bendera. (hetifah.com, 2008)

Partisipasi selanjutnya oleh masyarakat setempat adalah pada saat diskusi berlangsung. Pemerintah mendatangkan tokoh masyarakat dari wilayah Monumen Banjarsari tersebut untuk mengutarakan pendapatnya dan keluhannya secara langsung kepada PKL, jadi memperlihatkan tidak adanya campur tangan pemerintah untuk mengerahkan masyarakat dalam pelaksanaan relokasi tersebut. Partisipasi masyarakat merupakan partisipasi yang membuka jalan dari pelaksanaan relokasi PKL Monumen Banjarsari.

2. Masyarakat Ekonomi (PKL/Konsumen/Pengusaha)

Masyarakat ekonomi yang paling berpengaruh dalam proses pelaksanaan relokasi ini adalah para pedagang kaki lima itu sendiri, dimana pedaganglah yang menjadi sasaran utama dalam program ini. Partisipasi pedagang kaki lima ini secara langsung menentukan keberhasilan dari program relokasi ini. Partisipasi pedagang kaki lima sebagai sasaran dimulai dari proses sosialisasi, implementasi hingga evaluasi.

Proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Surakarta kepada para pedagang yang akan direlokasi dimulai dari pendekatan pejabat langsung ke lokasi Monumen Banjarsari. Walikota dan Wakil Walikota langsung terjun ke lapangan dan mengajak berdiskusi para PKL juga mendengarkan apa saja yang ingin disampaikan oleh PKL kepada pedagang pada saat itu.

Pendekatan berikutnya dilakukan secara masif dengan mengundang para pedagang untuk kemudiannya bersama dengan jajaran pejabat di pemerintah kota Surakarta. Proses sosialisasi dengan pendekatan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah sebanyak 54 kali. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Didik :

“Pada awalnya setelah satu dua tiga kita mengundang itu, tidak ada yang namanya diskusi, kita hanya mengajak untuk makan siang, makan pagi, makan malam. Pada akhirnya kalau kita mengajak seperti itu tanpa jelas ada maksudnya, kan mendatangkan tandatanya, saya itu mau diapakan tho? Kan begitu ya? Disitu terlihat orang-orang yang vokal, artinya orang-orang yang dapat mempengaruhi pedagang, harus ada perlakuan khusus, artinya pada saat yang lain itu diam dan orang-orang itu berbicara, kita harus melakukan pendekatan yang khusus, kalau yang lain satu sampai dua

kali, pedagang dapat sampai lima kali, ee..proses seperti itu terus dilakukan oleh Pak Walikota, Pak Joko Widodo dan Pak Rudi, he-eh..kemudian, baru ke pertemuan yang ke 30 dan 35 itu disampaikan bahwa anda akan dipindahkan, pada waktu itu pedagang tidak mengiyakan langsung tetapi juga tidak memprotes, tidak menolak, karena itu tadi orang Jawa itu mempunyai filosofinya bahwa kalau sudah diajak rembukan, diajak kemudiann, saling kenal dengan baik, ada rasa tidak enak saat ingin menolak itu budaya Solo yang dikeluarkan oleh Pak Joko Widodo dan Pak Rudi.” (wawancara dengan Didik Anggono, 9 April 2012)

Sampai pada akhirnya para pedagang tersebut mempertanyakan mengapa pedagang sampai diundang untuk kemudiann gratis sebanyak itu. Partisipasi langsung dari pedagang yang akan direlokasi pada saat itu adalah *bargaining* dalam proses diskusi. Pedagang mengajukan banyak syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah apabila pedagang akan direlokasi ke tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah. Pada saat itu pedagang meminta untuk mendapatkan surat-surat dan perizinan secara gratis termasuk kios yang akan ditempati, lalu pedagang juga meminta agar keberadaan pedagang di Pasar Notoharjo diberikan publikasi yang masif sehingga masyarakat mengetahui bahwa pedagang-pedagang yang selama ini berjualan di sekitar monumen '45 Banjarsari telah dipindah di Pasar Notoharjo. Awalnya proses diskusi berlangsung alot, tetapi dengan adanya *bargaining* dan kesepakatan yang dinilai seimbang oleh mayoritas pedagang, kemudian akhirnya tercapailah mufakat dalam proses sosialisasi tersebut.

Pada proses implementasi sudah jelas pedagang ikut serta karena pedagang yang direlokasi. Evaluasi yang diadakan oleh pemerintah yaitu setiap pekan, Walikota Joko Widodo melakukan kunjungan setiap hari Senin pagi ke Pasar Notoharjo guna mengetahui kondisi terkini dari pedagang yang telah direlokasi. Dalam partisipasinya, pedagang Notoharjo memberikan banyak masukan kepada pemerintah agar pedagang disana tetap dapat bertahan dengan kondisi yang terus berubah-ubah setiap waktunya.

Partisipasi masyarakat ekonomi selanjutnya adalah partisipasi yang dilakukan oleh para konsumen. Pasar yang tersedia di Surakarta sendiri merupakan pasar-pasar yang sudah tercipta karena klasifikasi barang-barang yang

dijualnya. Seperti Pasar Klithikan Notoharjo tersebut, pasar tersebut hanya menjual barang-barang *klithikan* atau barang-barang kecil seperti onderdil motor, barang-barang elektronik bekas yang masih dapat dipergunakan dan diperjual-belikan, sehingga kriteria konsumen setiap pasarnya dapat dikatakan konsumen yang loyal pada satu pasar saja, karena satu pasar akan menjual barang-barang yang sama dan akan sangat sulit ditemukan di pasar lainnya. Partisipasi konsumen dalam relokasi tidak ada, tetapi mungkin dalam keberlanjutan pasar Notoharjo sendiri, konsumen relatif tidak protes dengan adanya relokasi yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima yang berada di Banjarsari ke Semanggi.

Masyarakat ekonomi selanjutnya yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan relokasi ini adalah pengusaha yang mendapatkan *tender* dalam pembangunan Pasar Notoharjo dan pengadaan barang-barang yang diperlukan dalam pelaksanaan relokasi tersebut. PT Surya baru Sejahtera adalah pihak yang menangani pembangunan proyek mendapatkan tender dari hasil lelang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Surakarta.

3. Pemerintah dan Birokrasi

Peran pemerintah dan pembagian tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam relokasi ini dapat dijabarkan sebagai berikut, *pertama* dalam rencana paparan kerja pemerintah dalam merelokasi PKL yaitu melakukan pendekatan sosial budaya dengan mengutaKemudiann empat hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pendekatan antara lain; *nguwongke uwong* yang artinya menempatkan manusia pada harkat martabatnya; kemitraan, dimana pemerintah ingin melibatkan seluruh pihak yang terkait tanpa adanya otoritas dari satu pihak saja; hati nurani, ada rasa saling mengisi dan mempertimbangkan apa saja yang dibutuhkan oleh banyak pihak; dan yang terakhir saling menghormati atau adanya keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan dari masing-masing pihak. Semua pendekatan di atas tersebut digulirkan ke dalam pendekatan yang diwujudkan dalam diskusi publik antara pemerintah, pedagang kaki lima dan masyarakat, sehingga saat semua berkumpul membicarakan masalah dan solusinya, Kemudian solusi yang keluar adalah solusi atas mufakat bersama dengan tujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses relokasi tersebut. Pemerintah

didalam perannya menjadi pihak yang mengadakan acara tersebut dan berusaha untuk mewujudkan negosiasi-negosiasi yang diberikan oleh para PKL dan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut untuk apa sebenarnya tujuan utama dari diadakannya relokasi ini.

Peran dan pembagian kerjasama yang *kedua* yaitu pendekatan secara ekonomi, dimana pemerintah juga memperhatikan kondisi ekonomi pedagang kaki lima yang pada saat itu akan direlokasi. Dalam pendekatan ini pemerintah menyediakan berbagai alternatif untuk persetujuan dari pihak pedagang kaki lima sebagai hasil dari negosiasi-negosiasi yang dilakukan pada saat konsultasi publik, antara lain pada bantuan sarana dan pra-sarana, pemerintah menyediakan pasar, shelter, gerobak atau tenda tergantung dari jenis dagangan dan besarnya dagangan para PKL yang akan direlokasi; lalu penyediaan perizinan gratis antara lain SIUP, KTPP dan SHP; lalu bantuan langsung yang berupa modal usaha, pemindahan dan pengangkutan barang-barang dagangan ke tempat relokasi; dan yang terakhir promosi yang dilakukan pihak pemerintah di berbagai media seperti media elektronik, media cetak dan media hiburan.

Pendekatan *ketiga* yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan pendekatan normatif, yang dapat dilakukan dengan dua pilihan cara, yaitu cara yustisi dan non-yustisi. Pendekatan yustisi merupakan pendekatan yang dilakukan dengan secara langsung dengan penindakan ataupun dengan peradilan sedangkan pendekatan non-yustisi dilakukan dengan cara pembinaan; sosialisasi dan peringatan, pemantauan dan pengawasan.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Satpol PP Kota Surakarta, Ibu Sunarti mengatakan ada beberapa instansi pemerintahan yang terlibat langsung dalam proses relokasi ini, antara lain Dinas Pengelola Pasar, Dinas Pekerjaan Umum Tata Kota, Dinas Pelayanan Umum dan Satpol PP. Ibu Sunarti juga menambahkan masing-masing pembagian tugas dalam relokasi ini, Bapak Didik juga mengatakan pembuatan taman atau revitalisasi taman yang ada di kawasan monumen Banjarsari merupakan tugas dari DKP, sedangkan tugas dari DPU adalah mengurus masalah pembongkaran dan ganti rugi yang diminta oleh PKL yang terkena relokasi, PKL merupakan tanggungjawab Dinas Pengelola Pasar dalam mekanisme perelokasiannya sedangkan Satpol PP hanya membantu

penertiban, pembongkaran dan *boyongannya* saja. Namun saat mewawancarai Bapak Didik sebagai narasumber dari Dinas Pengelola Pasar, beliau menambahkan ada pihak TNI dan POLRI yang terlibat langsung dalam relokasi, tetapi partisipasinya tidak beda jauh dengan Satpol PP yang hanya terlibat dalam penindakannya saja.

5.2.3 Dimensi *Sustainability*

Pada analisis dimensi *sustainability* ini akan dibagi ke dalam dua indikator, antara lain legislasi dan dukungan secara berkelanjutannya, dimana akan dipecah kembali ke dalam beberapa sub-indikator yaitu bentuk legislasinya dan bentuk dukungan yang diberikan dalam program relokasi ini dalam penganggaran, komitmen dan koordinasi.

1. Legislasi

Pada saat pelaksanaan relokasi di tahun 2006, belum ada bentuk legislasi yang melandasi relokasi tersebut, hanya saja pelaksanaan relokasi tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang merasa keberadaan PKL di Monumen '45 Banjarsari itu perlu dipindahkan. Pada saat itu, ada beberapa landasan hukum yang menjadi acuan dalam relokasi tersebut, meskipun terpecah-pecah ke dalam beberapa peraturan, tetapi tetap mengacu kepada tujuan yang sama, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Didik, Narasumber dari Dinas Pengelola Pasar dalam hasil wawancara.

“Emm..yang pasti ada yang namanya Perda Tata Ruang, saya lupa itu mbak, trus Perda berseri, Perda berseri itu 88, Tata Ruang itu tempat-tempatnya, ada apa, ada space-space tertentu yang digunakan, kemudian Perda Berseri itu yang berkaitan dengan taman, karena tidak boleh berjalan dan mendirikan bangunan di taman, kemudian Perda Nomor.6 tahun 2005 yaitu Perda LLAJ, Lalu Lintas Angkutan Jalan, jadi yang namanya jalan, trotoar, itu mutlak digunakan untuk masyarakat berjalan, tidak untuk berjalan. Dan ditambah oleh Perda PKL nomor 8 tahun 1998 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.” (wawancara dengan Didik Anggono, 9 April 2012)

Pemerintah Kota Surakarta mulai memikirkan secara matang dalam pembaruan peraturan yang harus lebih diperjelas dan diklasifikasi setelah banyaknya PKL yang telah direlokasi ke dalam sebuah Peraturan Daerah. Kemudian terbitlah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima pada tahun 2011.

Rancangan Perda No.3 Tahun 2008 tersebut dibuat dengan beberapa tahapan yang juga melibatkan banyak pihak didalam pengerjaannya. Menurut Ketua DPRD Kota Surakarta pada saat itu, Bapak YF Soekasno menjelaskan bahwa pada saat sosialisasi rancangan Perda tersebut melalui tahap *public hearing*, yang menghadirkan *stakeholder* yang terkait dengan Perda tersebut, termasuk pedagang kaki lima. Memang tidak semua pedagang kaki lima dilibatkan secara langsung, tetapi hanya perwakilannya saja, tetapi rancangan ini sudah disosialisasikan kepada seluruh PKL, jadi pesan aspirasi terhadap masukan untuk Perda tersebut seharusnya disampaikan kepada pihak yang menjadi perwakilan *public hearing* bersama Legislatif dan Eksekutif tersebut.

Pada kenyataannya setelah Perda tersebut diterbitkan, malah menuai banyak penolakan dari PKL itu sendiri dan ada beberapa pasal yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, antara lain Pasal 16 ayat 1 dalam peraturan tersebut yang isinya berupa ancaman denda Rp 5 juta dan hukuman kurungan 3 bulan bagi PKL yang tak mengantongi izin. Ancaman hukuman yang sama juga diberlakukan bagi pembeli PKL tanpa izin. Pasal lain yang ditolak oleh PKL yakni Pasal 6 ayat 3 butir a yang mempersyaratkan PKL yang ingin mengajukan izin tempat usaha di Kota Surakarta harus merupakan warga Kota Surakarta dengan dibuktikan memiliki KTP Surakarta. Kedua pasal ini dinilai menjadi kriminalitas dalam jual-beli, karena dianggap menjadi sebuah teror dan para konsumen pun tidak akan berani untuk membeli sembarangan dan akan merugikan para PKL yang masih belum mempunyai KTP Surakarta. (news.detik.com, 2011)

Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Bapak Subagyo menjelaskan bahwa pada saat *public hearing* para PKL juga merasa ada kecemburuan sosial bagi sebagian pedagang yang berasal dari luar Surakarta, oleh karen itu disertakannya pasal tentang kewajiban memiliki KTP Kota Surakarta tersebut.

“Sebab selama ini ada kecemburuan orang Solo dengan pedagang yang dari luar Solo. Dari PKL yang telah ditata itu 40 persennya adalah luar Solo. Sehingga solusinya para PKL nantinya harus benar-benar ber-KTP Solo, atau kalau tidak diatasnaKemudiann orang Solo.” (harianjoglosemar.com, 2010)

Pada akhirnya para PKL diwakili oleh Aliansi Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta (APS) dan didampingi Lembaga Pengabdian Hukum (YAPHI) beserta Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (Kompip) mengajukan keberatan atas Perda tersebut pada bulan Maret tahun 2011. Setelah pedagang bertemu dengan anggota DPRD Kota Surakarta dan ditanggapi oleh Wakil Walikota, terjadi kesepakatan untuk melakukan revisi dengan pengkajian lebih dalam dari apa yang telah pedagang tuntut, karena menurut lembaga legislatif dan eksekutif, Perda tersebut dinilai aspiratif tidak hanya mendahulukan kepentingan PKL, tetapi untuk kepentingan masyarakat Kota Surakarta pada umumnya.

Pada bulan April, satu bulan setelah penerimaan revisi tersebut, pemerintah Kota Surakarta bersama anggota DPRD kembali membuat Panitia Khusus (Pansus) yang dikerahkan untuk membahas perihal revisi. Sampai pada bulan Agustus pengkajian tersebut masih belum selesai dan YAPHI kembali menagih hasil dari revisi yang sudah dijanjikan oleh pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Winarsi sebagai salah satu aktivis dari YAPHI,

”Setelah Lebaran, kami kembali mendatangi Gedung DPRD dan mendesak legislatif untuk merevisi Perda PKL tersebut. Selama puasa, kami semua colling down dulu,” (solopos.com, 2011)

Sampai saat ini, Perda No.3 Tahun 2008 tersebut masih diberlakukan dengan janji pemerintah untuk tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang selalu diusung dalam setiap penertiban PKL, sehingga dari pemerintah sendiri pun akan mengusahakan pengakomodiran pembuatan KTP pedagang untuk para pedagang yang belum memiliki KTP Kota Surakarta. Saat ini Pemkot dalam proses mendata semua PKL. Pedagang yang memiliki KTP Surakarta akan diberi identitas khusus PKL dan berhak menerima fasilitas dari Pemkot Surakarta, termasuk berdagang di lokasi-lokasi yang diperbolehkan. Seperti yang dikatakan

oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, Bapak Subagyo, Perda tetap akan diterapkan, namun Pemkot Solo menjamin tidak akan ada kriminalisasi kepada PKL seperti yang dikhawatirkan.

”Prinsip kami masih sama, tetap memperlakukan PKL secara manusiawi dan tanpa kekerasan. Namun, penataan kota tetap harus dilakukan agar terjaga kebersihan dan ketertibannya,” (kompas.com,2011)

Penerbitan Perda No.3 Tahun 2008 sebagai *legal sustainability* tersebut memang banyak menuai penolakan dari PKL, tetapi Pemkot Surakarta masih mempertahankan Perda tersebut untuk keberlanjutan dari program-program relokasi di Surakarta. Hal ini disebabkan oleh proses pengerjaan Perda yang disebutkan telah banyak mengambil aspirasi dari seluruh kalangan, sehingga tidak dapat hanya memenangkan satu kepentingan saja.

2. Dukungan

Sub-indikator dukungan pada dimensi *sustainability*, akan menjelaskan tentang dukungan apa saja yang menjadi faktor dari keberlanjutan program relokasi ini. *Pertama*, penganggaran yang dialokasikan pemerintah dalam keberlanjutan ketahanan pedagang kaki lima yang direlokasi ke pasar Notoharjo yaitu dalam bentuk pemberian dana pinjaman kredit sebesar 5 miliar rupiah yang disimpan di Koperasi Monjari yang juga berada di wilayah pasar Notoharjo untuk keperluan pedagang di Pasar Notoharjo. Tentu saja ini merupakan dukungan yang prositif dimana saat proses adaptasi pedagang kaki lima menjadi pedagang pasar akan mengalami banyak sekali penambahan kebutuhan sehingga banyak yang membutuhkan dana lebih agar dagangannya tetap dapat bertahan.

“Yang pasti ada kucuran dana, sejumlah 5 M, dari Menteri Koperasi, yang kedua, kita terus menerus mempromosikan tempat itu, artinya setiap ada kunjungan tamu, setiap ada kunjungan dari daerah lain, kita ajak kesana, itu sisi dari pemerintah ya. Dari penunjuk jalan kota Surakarta, kalau masuk di Kota Surakarta itu setiap jalan ada arah dan penunjuk ke Pasar Klithikan Notoharjo, itu ada seperti itu, artinya itu bentuk dukungan dari Pemerintah setelah pasca-relokasi itu kita tidak terus terserah kalian hidup sendiri, itu ngga, kita tetep mempromosikan mereka sedemikian rupa itu

agar ya tetep bener-bener menjadi survive dan pendapatan bertambah, sehingga kesejahteraan masyarakat itu juga bertambah, PAD kita juga bertambah, seperti itu.” (wawancara dengan Didik Anggono, 9 April 2012)

Kedua, komitmen yang dilakukan dalam rangka keberlanjutan program ini adalah kerjasama antara pemerintah dan pedagang yang sudah direlokasi agar tidak kembali lagi ke tempat asal dan pemerintah tetap menjalankan kewajibannya sebagai pihak yang bertanggungjawab sehingga melakukan monitoring pada para pedagang kaki lima yang telah direlokasi. Seperti yang diungkapkan Bapak Nanag, perwakilan PKL yang menjadi narasumber penelitian ini, setidaknya setiap satu minggu sekali Walikota langsung meninjau ke Pasar Notoharjo untuk mengetahui secara langsung perkembangan dan mendengarkan langsung apa yang ingin disampaikan oleh pedagang. Pemerintah juga mengerahkan Satpol PP untuk tetap melakukan monitoring di wilayah Monumen Banjarsari setiap harinya agar memastikan tidak ada lagi PKL yang kembali dan menempati kawasan yang telah direlokasi tersebut.

Ketiga, koordinasi yang dilakukan beberapa pihak di pemerintahan untuk tetap mengawasi penertiban di wilayah Monumen Banjarsari yang sudah bebas dari PKL, jangan sampai PKL-PKL tersebut kembali dan akhirnya relokasi tersebut menjadi sia-sia saja. Koordinasi yang dilakukan antara lain dengan Satpol PP yang juga tiap harinya mengontrol ketertiban di wilayah Monumen Banjarsari dan diikutsertakan Linmas yang berjaga di sekitar Monumen 1x24 jam. Koordinasi dalam hal promosi dan publikasi juga tetap dilakukan oleh pemerintah Surakarta dengan dipasangnya petunjuk jalan ke arah Pasar Notoharjo di setiap petunjuk jalan dan arah dari berbagai batas Kota Surakarta hingga di dalam kota. Seperti yang dikemukakan Bapak Suratno, salah satu narasumber perwakilan PKL di Pasar Notoharjo.

“Banyak kok, promosi pemerintah ada, tv, media ada, banyak. Jadi Pemkot disini mindah juga ga tinggal diem, diupayakan dimana supaya disini juga bisa berjalan juga.” (wawancara dengan Suratno, 9 April 2012)

Dukungan juga diberikan masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan ketertiban di sekitar Monumen Banjarsari, seperti yang dikatakan oleh Bapak Joko, salah satu narasumber perwakilan masyarakat sekitar Monumen Banjarsari.

“Dari masyarakat kita ikut menjaga kebersihan, dalam arti ee e dalam waktu tiga bulan sekali dengan kelurahan, RT/RW, PKK Linmas dan sebagainya, warga, melibatkan harus saling gotong royong dalam masalah kebersihan.” (wawancara dengan Joko Pramono, 5 April 2012)

5.2.4 Dimensi Leadership

Dimensi kepemimpinan ini merupakan dimensi yang cukup berpengaruh, mengingat kepercayaan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan dari sebuah program dan faktor kepemimpinan lah yang membawa kepercayaan masyarakat itu besar atau sedikit. Dalam analisis dimensi kepemimpinan ini akan dibagi menjadi dua indikator yaitu kemampuan memimpin dan manajemen pengelolaan program. Kedua indikator tersebut juga dibagi lagi menjadi tiga sub-indikator, yaitu kepercayaan masyarakat, partisipasi dalam pelaksanaan program dan mekanisme pengambilan keputusan, pelaksanaan dan keberlanjutan program.

1. Kemampuan Memimpin

Sepak terjang Walikota Joko Widodo pada saat merelokasi PKL Banjarsari ke Pasar Notoharjo masih terbilang belum lama semenjak dilantiknya menjadi Walikota Surakarta. Relokasi PKL Banjarsari ke Pasar Notoharjo ini merupakan program unggulan awal dari Joko Widodo yang diberitakan banyak oleh media massa sebagai sebuah program yang berhasil. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Joko Widodo ini juga sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Walikota sebelum Joko Widodo, yaitu Slamet Suryanto, seperti yang dikatakan oleh Bapak Sudarmo, salah satu narasumber dari akademisi yang memantau perkembangan relokasi Banjarsari selama ini.

“...sebenarnya rencana relokasi itu sendiri sudah ada semenjak jamannya Slamet Suryanto, itu Walikota sebelum Joko Widodo itu sudah ada, tetapi Slamet Suryanto tidak kunjung melakukan...” (wawancara dengan Sudarmo, 12 April 2012)

Bapak Sudarmo mengatakan bahwa kedekatan Slamet Suryanto dengan para PKL menimbulkan rasa belas kasihan kepada para PKL apabila pedagang harus terkena relokasi juga. Tidak ingin ada timbulnya gejolak diantara hubungan

masyarakat dengan pemerintah juga menjadi salah satu faktor tidak dilaksanakannya relokasi pada jaman kepemimpinan Slamet Suryanto, karena para PKL di Surakarta juga kuat dalam hal politiknya dan hampir sebagian besar merupakan kader-kader partai politik yang menaungi Slamet Suryanto dan Joko Widodo saat ini, sehingga Slamet Suryanto selalu menunda-nunda relokasi yang seharusnya dilakukan tersebut. Joko Widodo mengambil alih tugas tersebut tidak lama setelah pelantikannya menjadi Walikota Surakarta, melalui pendekatan-pendekatan yang telah dijelaskan di dalam dimensi *partnership*, Joko Widodo memulai tahapan dari proses relokasi tersebut, pada akhirnya setelah melalui pendekatan-pendekatan tersebut, para PKL menjadi sadar sendiri sebenarnya apa urgensi pedagang direlokasi ke tempat lain. Sampai pada akhirnya setelah negosiasi disepakati, para PKL bersedia untuk direlokasi. Peneliti menanyakan beberapa hal terkait apa yang menjadi faktor ketersediaan para PKL mau direlokasi kepada beberapa pedagang yang menjadi narasumber dari penelitian ini.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nanang, salah satu narasumber perwakilan PKL yang terkena relokasi, Bapak Nanang bersedia untuk direlokasi karena Bapak Nanang akhirnya sadar, sebenarnya kawasan Monumen Banjarsari itu bukan dipergunakan untuk berjualan.

“...disini kan seharusnya bukan tempat yang seharusnya untuk jualan, lama-lama kan mengotori kota, gimana kita kalau relokasi itu meminta pertimbangan dimana relokasi itu dapat untuk masa depan, sehingga dari hasil rapat-rapat disetujui kios-kios kami ini.” (wawancara dengan Nanang, 9 April 2012)

Hampir semua narasumber di dalam penelitian ini menyebutkan bahwa peran dari Walikota secara langsung menjadi salah satu faktor keberhasilan dari program ini, sehingga masyarakat percaya pada pemerintah dapat mengembalikan fungsi Monumen Banjarsari pada keadaan yang seharusnya.

Seperti yang sudah dijelaskan pada kerangka pemikiran, Maxwell dalam Kaloh (2006: 18) mengatakan bahwa apabila ingin melihat kemampuan dari seorang pemimpin yang baik dan berhasil dapat dilihat dari pengaruh terhadap lingkungan yang dipimpin. Pengaruh sendiri dapat diukur dengan tingkat

kepercayaan masyarakat (*public trust*) dan seberapa banyak partisipasi masyarakat dapat terlibat dalam pelaksanaan program yang diselenggarakan pemerintah. Relokasi 989 PKL dalam satu kali kesempatan merupakan pencapaian yang dapat dikatakan sebuah hasil dari kepemimpinan, karena pemimpin yang dapat meyakinkan masyarakatnya sehingga masyarakatnya mau untuk dipengaruhi dan mempercayai apa yang akan dilakukan oleh pemimpinnya menjadi salahsatu indikator keberhasilan dalam memimpin.

2. Manajemen Pengelolaan Program

Melihat dari partisipasi dalam pelaksanaan programnya, Bapak Murdi, Kepala Pasar Notoharjo mengatakan bahwa yang langsung memegang kepemimpinan dari semua tahap pelaksanaan relokasi ini ada Walikota langsung, sehingga Walikota mengetahui secara jelas apa yang benar-benar harus dibenahi, diganti atau bahkan dipindahkan.

Dalam partisipasinya, Joko Widodo menggunakan pendekatan komunikasi, PKL diajak untuk berdiskusi, mengobrol dan bertukar pikiran tetapi dengan suasana yang santai dan sedapat mungkin penuh dengan rasa kekeluargaan, sehingga pelaksanaan relokasi ini disetujui oleh seluruh PKL yang hadir dalam setiap kesempatan berkumpul tersebut. Negosiasi juga langsung dilakukan oleh Joko Widodo sebagai walikota, sehingga tidak ada lagi keraguan dari PKL untuk tersampaikan atau tidaknya aspirasi yang ingin pedagang sampaikan. Joko Widodo juga ikut dalam rombongan saat prosesi relokasi berlangsung.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam tahap awal relokasi ini adalah mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait, antara lain warga masyarakat yang mengadakan tentang keberadaan PKL yang dianggap mengganggu di wilayah Monumen Banjarsari, para PKL yang sudah lama menempati wilayah Monumen Banjarsari sehingga sulit untuk dipindahkan dan pemerintah itu sendiri yang memegang tanggung jawab atas penyelesaian konflik yang bersangkutan. Seperti yang telah banyak dijelaskan di bagian atas, pengambilan keputusan tidak semata-mata hanya mengandalkan otoritas dari walikota untuk langsung memerintahkan bawahannya menertibkan dan

merelokasi tanpa adanya kesepakatan langsung dari pihak yang terkena relokasi. Pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil negosiasi yang didapat dari kesepakatan bersama antara pemerintah dan tokoh warga dengan PKL Monumen Banjarsari.

Joko Widodo memerintahkan banyak pihak untuk ikut serta dalam pelaksanaan relokasi yang diadakan secara *boyongan* atau secara serempak seluruh PKL yang ada di Monumen Banjarsari. Adapun *stakeholder* yang ikut terlibat dalam pelaksanaan relokasi ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Surakarta, Instansi Vertikal yang terkait, POLRI, Perguruan Tinggi, RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ paguyuban-paguyuban, tokoh masyarakat setempat dan pada tokoh agama, serta lembaga ekonomi/koperasi. Walikota menempatkan masing-masing pihak yang terkait langsung di bidangnya. Misalnya, dalam prosesi *boyongan*, Joko Widodo menempatkan Satpol PP dan aparat keamanan lainnya untuk membantu menertibkan proses *boyongan* yang berlangsung dari Monumen Banjarsari ke Pasar Notoharjo. Pada proses dialog publik atau diskusi, Kemudian Joko Widodo mengikutsertakan paguyuban-paguyuban, tokoh masyarakat, RT/RW wilayah Monumen Banjarsari, LSM, perguruan tinggi, agar proses diskusi berjalan secara objektif karena banyaknya masukan-masukan dari pihak netral untuk menemukan titik kesamaan dalam sudut pandang dan kepentingan. Lembaga ekonomi/koperasi diperintahkan Joko Widodo untuk menangani masalah permodalan para PKL yang terkena relokasi sebagai upaya *sustainability* yang juga disediakan oleh pemerintah.

Manajemen dari keberlanjutan program relokasi ini agar tetap berjalan sebagaimana mestinya yaitu walikota turun langsung satu hari di setiap minggunya untuk melihat kondisi terkini dari Pasar Notoharjo, seperti yang dituturkan oleh Bapak Suratno, pedagang Notoharjo yang menjadi narasumber. Publikasi melalui media-media yang tersedia di Kota Surakarta juga tetap dijalankan meskipun tidak semasih pada awal-awal relokasi. Penambahan fasilitas dalam aksesibilitas menuju Pasar Notoharjo, seperti dibangunnya terminal tepat di depan Pasar Notoharjo tersebut.

5.2.5 Dimensi *Transferability*

Pada dimensi ini, pembahasan akan dibagi ke dalam dua indikator, yaitu transfer di tempat lain dan adopsi pengetahuan/sistem, yang akan dilebur kembali ke dalam sub-indikator, yaitu kemudahan penerapan program di tempat lain dan fisibilitas penerapan di daerah lainnya.

1. Transfer di Tempat Lain

Program relokasi ini banyak dikabarkan hanya akan berhasil di daerah yang masih kental dengan kekeluargaannya, seperti daerah Surakarta atau Yogyakarta yang masyarakatnya masih patuh dan tidak banyak memberontak seperti di kota-kota besar lainnya yang sudah dianggap metropolitan. Relokasi ini juga menjadi salahsatu program pemerintah yang tidak banyak berhasil, dikarenakan PKL-PKL yang sulit untuk ditertibkan dan meskipun sudah mau untuk ditertibkan tetapi tetap membandel dan kembali lagi ke tempat semula yang ditempati. Meskipun banyak yang beranggapan seperti itu, menurut Bapak Sudarmo, PKL di Surakarta termasuk kriteria PKL yang juga memberontak dan banyak keinginannya, terlihat dari banyaknya persyaratan yang harus diikuti oleh pemerintah apabila pedagang memang diharuskan untuk direlokasi.

Menurut Bapak Didik, narasumber dari Dinas Pengelolaan Pasar, mengatakan bahwa sebenarnya keberhasilan dari relokasi ini akan didapatkan dengan mudah apabila ada kemauan yang kuat dari pemerintahnya.

“Pemerintah itu kan sebenarnya punya power, dalam arti power itu memberdayakan, menata kota, kalau bersentuhan dengan PKL mau diapakan, gitu. Biasanya Pemkot atau Pemda itu ingin enaknyanya saja, ini gimana, pimpinan itu hanya perentah tapi tidak memberikan solusi, itu artinya seperti “PKL disana mengganggu, gimana caranya itu pergi”. Nah itu yang jadi masalah mbak...” (wawancara dengan Didik Anggono, 9 April 2012)

Bapak Didik menjelaskan bahwa kunci utama dari keberhasilan relokasi adalah pemerintahnya itu sendiri, karena pemerintah memiliki kekuatan untuk memberdayakan apa yang memang seharusnya dapat diberdayakan sehingga memberikan efek positif untuk bersama, khususnya pemerintah itu sendiri. Kunci

selanjutnya terletak pada walikota sebagai pimpinan tertinggi yang memberikan solusi, bukan hanya sekedar menyuruh saja kepada bawahannya, sehingga para bawahannya pun *respect* atas apa yang diperintahkan oleh walikota.

Ibu Sunarti untuk Pamong Praja juga mengutarakan hal yang sama dalam jawabannya saat diwawancarai, dimana kunci keberhasilan itu tergantung dari pemimpinnya, jadi semua akan serba mudah apabila pemimpinnya mampu mengkondisikan semua kebutuhan dan keperluan dari awal perencanaan sampai pada tahap keberlanjutan programnya.

Secara umum, narasumber-narasumber penelitian ini mengatakan bahwa pemimpin memiliki andil terbesar dalam keberhasilan program relokasi ini, karena relokasi PKL Monumen Banjarsari ini pun sebenarnya melalui proses yang panjang dan sulit, tetapi apabila konsisten dan tetap tegas dengan apa yang ingin dicapai, Kemudian keberhasilan itu akan datang dengan sendirinya.

Pelaksanaan program ini juga sebenarnya seperti menjalankan sebuah program besar pada umumnya yang memiliki banyak *stakeholder*, sehingga tingkat kesulitan program relokasi ini akan sangat tergantung dari mekanisme dan sistem yang akan dijalankan, apakah menyulitkan atau memang memudahkan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program relokasi seperti ini biasanya dalam hal finansial, dimana anggaran yang terkemudian akan cukup besar, karena untuk mengundang jamuan kemudiann gratis para PKL yang tidak hanya sekali-dua kali, juga untuk mengabulkan banyak permintaan yang dinegosiasikan oleh para PKL sebagai persyaratan dari relokasi tersebut. Koordinasi yang diperlukan juga akan cukup rumit karena banyaknya pihak yang terkait sehingga kadang akan memberikan banyak miskomunikasi yang menyebabkan ketidakefektifan.

2. Adopsi Pengetahuan/Sistem

Sistem yang dipakai dalam relokasi ini menggunakan pendekatan sosial budaya yang terdapat kearifan lokal di dalamnya, seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Keberagaman wilayah perkotaan di Indonesia memang menjadi faktor yang berpengaruh dalam penerapan setiap program pemerintah, ada yang berhasil di daerah ini atau malah ada yang tidak berhasil di

daerah yang satunya. Program relokasi ini pasti ada di setiap program kerja perkotaan, tetapi lagi-lagi kembali pada bagaimana pemerintah masing-masing kota dapat menerapkan program ini secara baik atau tidak.

Relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dapat diterapkan oleh daerah lainnya karena semua prosedur relokasi, dari tahap awal sampai tahap akhir merupakan tahap yang wajar dan memang seharusnya dilakukan oleh para pimpinan daerah. Pendalaman karakteristik masyarakat dari tiap-tiap daerah mungkin menjadi suatu hal yang penting ketika akan bertindak atau menjalankan program pemerintah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, apalagi dengan masyarakat yang memiliki kepentingan, seperti pedagang kaki lima. Jadi, dalam penerapan relokasi seperti yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta itu sangat memungkinkan untuk diterapkan di daerah lainnya.

5.3 Lesson Learned

Penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh setiap pemerintah daerah biasanya selalu mendapatkan perlawanan dari pedagang kaki lima yang akan ditertibkan yang akan berujung pada tindak kekerasan fisik dan ketegangan antara pihak aparat yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menertibkan dengan pedagang kaki lima yang akan ditertibkan. Pada akhirnya apabila terjadi masalah antara kedua belah pihak seperti itu akan tetap menimbulkan konflik dimana masing-masing pihak akan mempertahankan kepentingannya karena merasa tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan dengan baik-baik.

Relokasi pedagang kaki lima Monumen '45 Banjarsari ke Pasar Notoharjo Surakarta seolah memberikan harapan baru bagi pemerintah yang merasa sulit untuk menangani persoalan PKL di daerahnya. Relokasi ini dianggap berhasil karena mampu merelokasi 989 PKL tanpa adanya kekerasan. Tentu saja tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta ini patut dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya, sehingga harus menjadi sebuah pembelajaran bagaimana cara menerapkan sistem yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam merelokasi PKL sebanyak itu tanpa penggunaan kekerasan.

Setelah hasil analisis konsep *best practice* di atas, pembelajaran yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah daerah lainnya dalam merelokasi PKL adalah dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kemauan yang kuat dan komitmen dalam pelaksanaan program dari pemimpin di daerahnya yaitu Kepala Daerah. Meskipun dalam jangka waktu yang panjang, pemerintah tetap berusaha menjalankan program agar tujuan yang sudah direncanakan dapat tercapai. Mengintegrasikan setiap visi, misi dan motivasi jajaran pemerintah dan birokrasi di bawahnya agar di dalam kinerja pelaksanaan program seluruh *stakeholder* yang terkait di dalam instansi pemerintahan dapat berjalan sinergis.
2. Memaksimalkan potensi *multi-stakeholder partnership* dari berbagai kalangan yang dapat membantu pelaksanaan program tersebut. Kemampuan Kepala Daerah untuk melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik di dalam maupun di luar instansi pemerintahan, termasuk masyarakat dalam seluruh proses dari program tersebut.
3. Memasukkan nilai-nilai kekeluargaan dan kearifan lokal dalam pelaksanaan program pemerintah. Kini bukan saatnya lagi dimana arogansi pemerintah diterapkan ke dalam program yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Pendekatan secara sosial budaya juga menjadi penting ketika *public trust* tercipta dari hal tersebut. Pemerintah harus mau turun langsung untuk mendengarkan aspirasi dan berdiskusi dengan masyarakat sehingga masyarakat percaya pemerintah akan bertanggungjawab atas apa yang akan dilaksanakannya. Pemerintah juga harus bersedia mengabdikan negosiasi dari masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut, apabila dianggap merugikan pedagang. Semua kesepakatan diputuskan dengan cara musyawarah sehingga didapatkan hasil *win-win solution*.

BAB 6

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini memaparkan simpulan dari hasil analisis dan pembahasan dari bab sebelumnya. Simpulan dibagi kedalam beberapa poin yang akan menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan dimensi dari analisis konsep *best practice*. Pada bab ini juga memuat saran dan rekomendasi dari peneliti untuk perbaikan program dari hasil temuan yang sudah didapatkan dari pengolahan data lapangan.

6.1 Simpulan

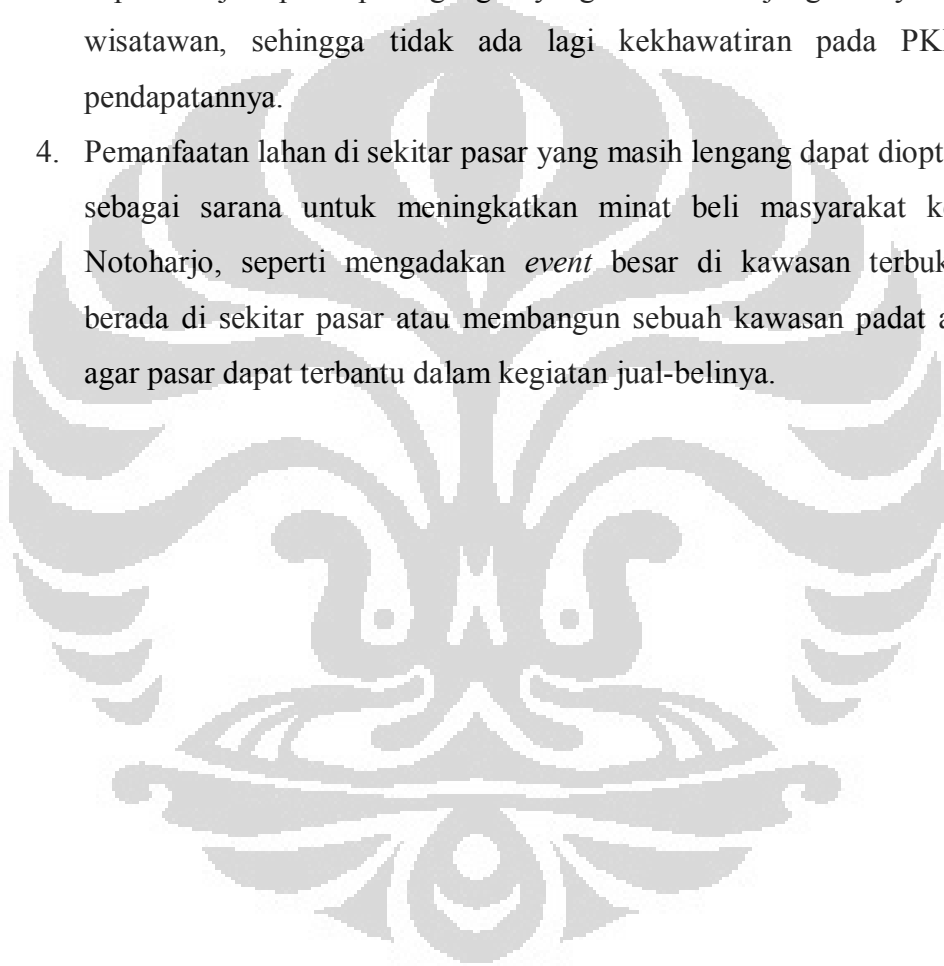
Pelaksanaan relokasi PKL Monumen Banjarsari ke Pasar Notoharjo sebagian besar sudah memenuhi aspek *best practice*, dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi yang menjadi landasan analisis penelitian ini, antara lain pada dimensi dampak, yang banyak dihasilkan dari relokasi ini adalah dampak positif. Pada dimensi kemitraan, tingkat partisipasi berbagai kalangan juga tinggi dengan melibatkan banyak pihak didalamnya. Keberlanjutan dari relokasi sampai saat ini masih dilaksanakan oleh Pemkot Surakarta melalui evaluasi-evaluasi dan penambahan fasilitas secara berjenjang. Kepemimpinan Walikota menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan relokasi. Walikota turun langsung dalam setiap tahapan pelaksanaan relokasi sehingga kepercayaan masyarakat tumbuh dan para PKL mau untuk bernegosiasi dan direlokasi. Sistem yang digunakan dalam pelaksanaan relokasi terdapat pada komitmen dan kesiapan dari jajaran atas pimpinan daerah dengan memperhatikan kondisi dan nilai-nilai kemanusiaan dari PKL yang akan direlokasi, sehingga kemungkinan untuk diadopsi oleh pemerintah daerah lain sangat memungkinkan.

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi ditujukan kepada Pemerintah Kota Surakarta dengan maksud untuk meningkatkan performa yang sudah baik pada saat ini agar menjadi lebih baik lagi bagi keberlanjutan relokasi PKL Monumen Banjarsari ke Pasar Notoharjo. Rekomendasinya, antara lain :

1. Penambahan aksesibilitas menuju Pasar Notoharjo, karena dari hasil pengamatan peneliti, akses menuju pasar masih terbatas, sehingga peneliti

2. pun sedikit kesulitan saat akan mencapai lokasi, apalagi para pedagang yang setiap hari harus ke Pasar Notoharjo. Lebih baik rute dari bis kota (baik bis umum/Damri/Batik Trans Solo) ada yang mencapai rute Pasar Notoharjo, sehingga konsumen pun akan lebih tertarik berkunjung karena akses yang mudah.
3. Penambahan pedagang dari PKL yang direlokasi dengan jenis dagangan yang berbeda-beda agar Pasar Notoharjo yang dapat dikatakan terpencil itu dapat menjadi pusat perdagangan yang ramai dikunjungi masyarakat dan wisatawan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran pada PKL akan pendapatannya.
4. Pemanfaatan lahan di sekitar pasar yang masih lengang dapat dioptimalkan sebagai sarana untuk meningkatkan minat beli masyarakat ke Pasar Notoharjo, seperti mengadakan *event* besar di kawasan terbuka yang berada di sekitar pasar atau membangun sebuah kawasan padat aktivitas agar pasar dapat terbantu dalam kegiatan jual-belinya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Kaloh, J. (2006). *Pemimpin: Antara Keberhasilan dan Kegagalan*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Kotler, Philip. (1997). *Manajemen pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi* (Hendra Teguh & Ronny Antonius Rusli, Penerjemah). Jakarta: Prenhallindo.
- Mc.Gee,T.G dan Yeung,Y.M. (1997). *Hawkers In South East Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*. Ottawa: International Development Research Centre.
- Manning, Chris dan Tadjudin Noer Effendi, ed. (1985). *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: PT Gramedia.
- Moleong, Lexy Johannes. (2004). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grasindo.
- Nawawi, Hadari, Hadari, Martini. (1993). *Kepemimpinan yang Efektif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Neuman, W. Laurence. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 6th Edition. New York: Pearsn Education.
- Nolan, Brendan C. (2001). *Public Sector Reform*. New York: Palgrave Publishing.
- Osborne, David dan Gaebler, Ted. (1996). *Mewirauahakan Birokrasi: Reinventing Government, Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik*. Jakarta: Pustaka Binawan Pressindo.
- Peter, F.Drucker. (1996). *Inovasi dan Kewiraswastaan*. Jakarta: Erlangga.
- Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan dan Azwar Hasan. (2004). *Reformasi Birokrasi dalam Praktek : Kasus di Kabupaten Jembrana*, Depok : Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota FISIP UI.
- Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan dan Defny Holidin. (2007). *Reformasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen*. Jakarta: Yappika.
- Rogers, Everett M., & Shoemaker, F. Floyd. (1971). *Communication of Innovations : A Cross Cultural Approach* (2nd ed.). New York: The Tree Press.

- Skarzynski, Peter & Gibson, Rowan. (2008). *Innovation To The Core*. Boston: Harvard Business Press.
- Sobari, Wawan, et al., ed. (2004). *Inovasi Sebagai Referensi : Tiga Tahun Otonomi Daerah dan Otonomi Award*. Surabaya: Jawa Post Institute of Pro-Otonomi.
- Suryabrata, Sumadi. (2006). *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada.
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Abidin, Said Zainal. *Reformasi Administrasi dan Pembangunan Nasional*. Depok: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Trung, Thai Quang. (1990). *Faksionalisme dan Kepemimpinan Kolektif di Vietnam : Studi Tentang Warisan Ho Chi Minh*. Jakarta: LP3ES.
- Wall, Bob., Solum, Robert S., & Sobol, Mark R. (1992). *The Visionary Leader*. Rocklin: Prima Publishing.
- West, Alan. (1992). *Innovation Strategy*. UK: Prentice Hall International.
- Zaltman, Gerald., Kotler, Philip., & Kaufman, Ira. (1972). *Creating Social Change*. USA: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Zaltman, Gerald. (1973). *Processes and Phenomena of Social Change*. Huntington: Robert E.Krieger Publishing Co., Inc.
- Zauhar, Soesilo. (1996). *Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan:

- Republik Indonesia. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Kota Surakarta. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Karya Ilmiah :

- Hariyati, Desy. (2009). "Revitalisasi Pasar Bunder, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (Studi terhadap penerapan multi-stakeholder partnership)". Skripsi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, tidak diterbitkan.
- Rakhmawati. (2007). "Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pengawasan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima Pasca Penataan di Jl. M.A Salmun – Jl. Dewi Sartika dan Jl. Nyi Raja Permas Kota Bogor)". Tesis Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, tidak diterbitkan.

Suryanto, Eddy. (2006). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995. Laporan Pelaksanaan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, diterbitkan.

Lain-Lain :

_____. (May 30, 2011). *Negara-Negara Asia Pasifik Berguru Soal PKL di Solo*. <http://bataviase.co.id/node/660491>.

_____. (March 1, 2010). *Temuan Inspektorat Patahkan Dugaan Korupsi*. <http://www.solopos.com/2010/solo/temuan-inspektorat-patahkan-dugaan-korupsi-15808>.

Alisjahbana, Armida S. (2001). *Tinjauan Triwulanan Perekonomian Indonesia*. *Ekonomi & Keuangan Indonesia* 49 (2) 2001: 111-151.

Badan Pusat Statistik Nasional. (2011). *Hasil Sensus Penduduk 2010 Kota Surakarta*. <http://www.bps.go.id/hasilSP2010/jateng/3372.pdf>.

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2012). *Surakarta Dalam Angka 2010*. http://surakartakota.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=57.

Brata, Aloysius Gunadi. (2007). *Vulnerability of Urban Informal Sector: Street Vendors in Yogyakarta, Indonesia*. *Jurnal Penelitian*. Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12541/1/vulnerability_alo_mpra.pdf.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. *Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/DirjenPR_STTNASYogya.pdf.

Djumiarti, Titik. *Menggagas Strategi Reinventing Government dalam Memantapkan Kehidupan Berbangsa*. http://eprints.undip.ac.id/19403/1/Artikel_Forum_Nasionalisme_baru_sekali.pdf.

Dubai Municipality. (2007). *Dubai International Award for Best Practices to Improve the Living Environment*. Submission Guide and Reporting Format for the Year 2007. http://www.unhabitat.org/downloads/docs/160_1_592648.pdf

International Labour Organization (ILO). (2000). *Informal Sector*. http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/feature/inf_sect.ht.

Kadajtmiko, Gana, Frans. (2003, April). *Mendongkrak Inovasi Di Era Cipta Pengetahuan Organisasi*. *Usahawan* No.04 XXXII, 16-20.

Hanafi, Irfan. (2011, 22 Januari). Mengubah PKL dari Beban menjadi Aset. <http://soloraya.net/mengubah-pkl-dari-beban-menjadi-aset.html>.

Metuge, Enongene, Metuge, Mekongcho. (2010). *Business Ecological System: Approach to the Theory of Competition and Technology Best Practice*. Washington: World Conference Proceeding International Council for Small Business (ICSB) :1-22.

Nizar. (2009). *Manifesto Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia*. Universitas Jenderal Soedirman. <http://kem.ami.or.id/2011/09/manifesto-pemberdayaan-pedagang-kaki-lima/>.

Sinombor, Sonya Hellen. (2011). *Inovasi Populis dari Solo*. April 20, 2011.

Siswanda, Hetifah Sj. (2008). *Relokasi PKL Banjarsari: Keputusan Berdasar Kesepakatan*. November 22, 2008. <http://hetifah.com/artikel/relokasi-pkl-banjarsari.html>.

Winarno, Budi. (2004). *Implementasi Konsep "Reinventing Government" dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Januari 14, 2004. http://eprints.undip.ac.id/984/1/Artikel_Budi_Winarno_edit.pdf.

www.apkliindo.blogspot.com

www.harianjoglosemar.com

www.kemitraan.or.id

www.kompas.com

www.unhabitat.org

www.solopos.com

www.surakarta.go.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ratna Pertiwi

Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 10 Januari 1991

Alamat (Rumah) : Jl. Kalimaya 7 Blok.4 No.152 RT.04/14
Perum Baros Kencana, Sukabumi, Jawa Barat.

Alamat (Kos) : Wisma Aisha, Jl. Mawar 1 No.141
Margonda Raya, Depok, Jawa Barat.

Nomor *Handphone* : 0856 82 14 22 7

Alamat *e-mail* : ratna.pertiwi91@yahoo.com
emailnya.ratna@gmail.com

Nama Orang Tua

- Ayah : Iim Abdurochim, Sm.HK.
- Ibu : Listia Hestinia

Riwayat Pendidikan Formal

- SD : SD Negeri Benteng 1 Gentramasekdas Sukabumi
- SMP : SMP Negeri 1 Kota Sukabumi
- SMA : SMA Negeri 3 Kota Sukabumi

The image features a large, light gray watermark of the Universitas Indonesia logo, which is a stylized, symmetrical emblem with intricate floral and geometric patterns. The text "LAMPIRAN-LAMPIRAN" is centered horizontally across the middle of the page, overlaid on the watermark.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

GAMBAR PASAR NOTOHARJO (LUAR)



GAMBAR PASAR NOTOHARJO (DALAM)



Lampiran 2

Pedoman Wawancara Dinas Pengelola Pasar Kota Surakarta

- Bagaimana kondisi Monumen '45 Banjarsari sebelum adanya relokasi PKL.
- Apa yang menjadi persoalan.
- Bagaimana pemecahan masalahnya.
- Bagaimana mekanisme (formulasi, sosialisasi, eksekusi, evaluasi) pelaksanaan program penataan PKL dari Monumen '45 Banjarsari ke Pasar Klithikan.
- Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan program ini.
- Bagaimana pembagian tugasnya dan peran-perannya dalam pelaksanaan program penataan ini.
- Apa saja dampak yang terasa dan terlihat setelah dilaksanakannya program penataan PKL ini.
- Bagaimana dampak terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta.
- Bagaimana keadaan sekitar monumen banjarsari (kenyamanannya) setelah dilakukan relokasi.
- Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan PKL tersebut.
- Bagaimana pemecahan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah.
- Apa bentuk legislasi yang memperkuat pelaksanaan relokasi. Bagaimana kedepannya.
- Bagaimana bentuk dukungan pemerintah dalam keberlanjutan pkl yang direlokasi.
- Bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah dalam keberlangsungan pasar klithikan notoharjo
- Bagaimana sikap pedagang saat akan direlokasi.
- Bagaimana mekanisme pelaksanaan penataan pedagang kaki lima, khususnya relokasi PKL Monumen '45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.
- Bagaimana pendapat. Apakah program ini dapat diterapkan di daerah lain selain Surakarta.
- Bagaimana dukungan politik dan pengerahan sumber dayanya.
- Siapa yang memegang peran kepemimpinan dalam program ini.

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta

- Bagaimana ketertiban kawasan Monumen '45 Banjarsari setelah relokasi PKL ke Pasar Klithikan Notoharjo?
- Bagaimana kondisi Monumen '45 Banjarsari sebelum adanya relokasi PKL.
- Siapa saja yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan relokasi pkl monumen 45 banjarsari ke pasar klithikan notoharjo.
- Apa bentuk legislasi yang memperkuat pelaksanaan relokasi. Bagaimana kedepannya.
- Bagaimana bentuk dukungan pemerintah dalam keberlanjutan pkl yang direlokasi.
- Bagaimana sikap pedagang saat akan direlokasi.
- Bagaimana mekanisme pelaksanaan penataan pedagang kaki lima, khususnya relokasi PKL Monumen '45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.
- Bagaimana pendapat. Apakah program ini dapat diterapkan di daerah lain selain Surakarta.
- Siapa yang memegang peran kepemimpinan dalam program ini.
- Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan PKL tersebut.
- Bagaimana pemecahan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah.

Lampiran 4

Pedoman Wawancara Ketua Pengelola Pasar Klithikan

- Bagaimana dampak relokasi PKL terhadap pendapatan PKL.
- Bagaimana kondisi Monumen '45 Banjarsari sebelum adanya relokasi PKL.
- Siapa saja yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan relokasi pkl monumen 45 banjarsari ke pasar klithikan notoharjo.
- Bagaimana bentuk partisipasi dan pembagian kerjasamanya.
- Apa bentuk legislasi yang memperkuat pelaksanaan relokasi. Bagaimana kedepannya.
- Bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah dalam keberlangsungan pasar klithikan notoharjo.
- Bagaimana bentuk dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan pasar klithikan notoharjo.
- Siapa yang memegang peran kepemimpinan dalam program ini.
- Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan PKL tersebut.

Lampiran 5

Pedoman Wawancara

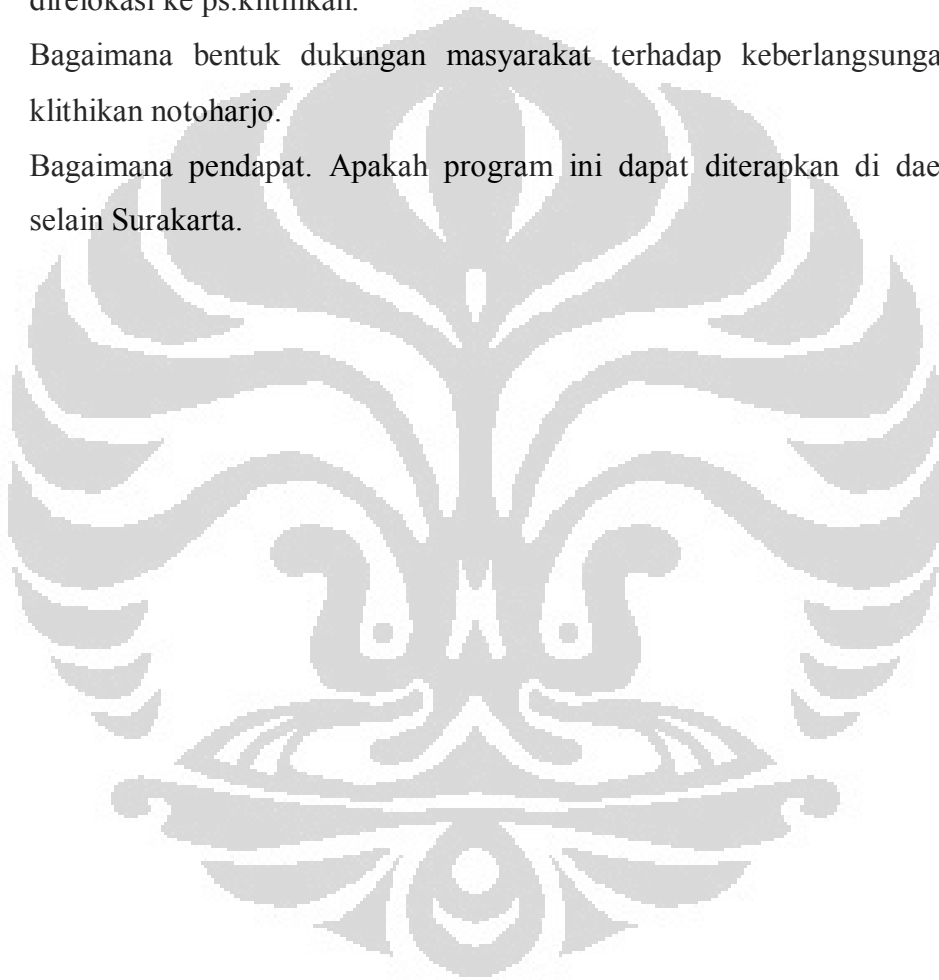
Perwakilan PKL yang terkena relokasi ke Pasar Klithikan

- Bagaimana dampak relokasi PKL terhadap pendapatan PKL.
- Bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah dalam keberlangsungan pasar klithikan notoharjo.
- Bagaimana bentuk dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan pkl yang direlokasi ke ps.klithikan.
- Bagaimana bentuk dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan pasar klithikan notoharjo.
- Mengapa mau dipindahkan. Adakah korelasinya dengan kepemimpinan pemerintah kota surakarta sekarang.
- Bagaimana pendapat. Apakah program ini dapat diterapkan di daerah lain selain Surakarta.
- Siapa yang memegang peran kepemimpinan dalam program ini.
- Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan PKL tersebut.

Lampiran 6

Pedoman Wawancara Perwakilan masyarakat setempat

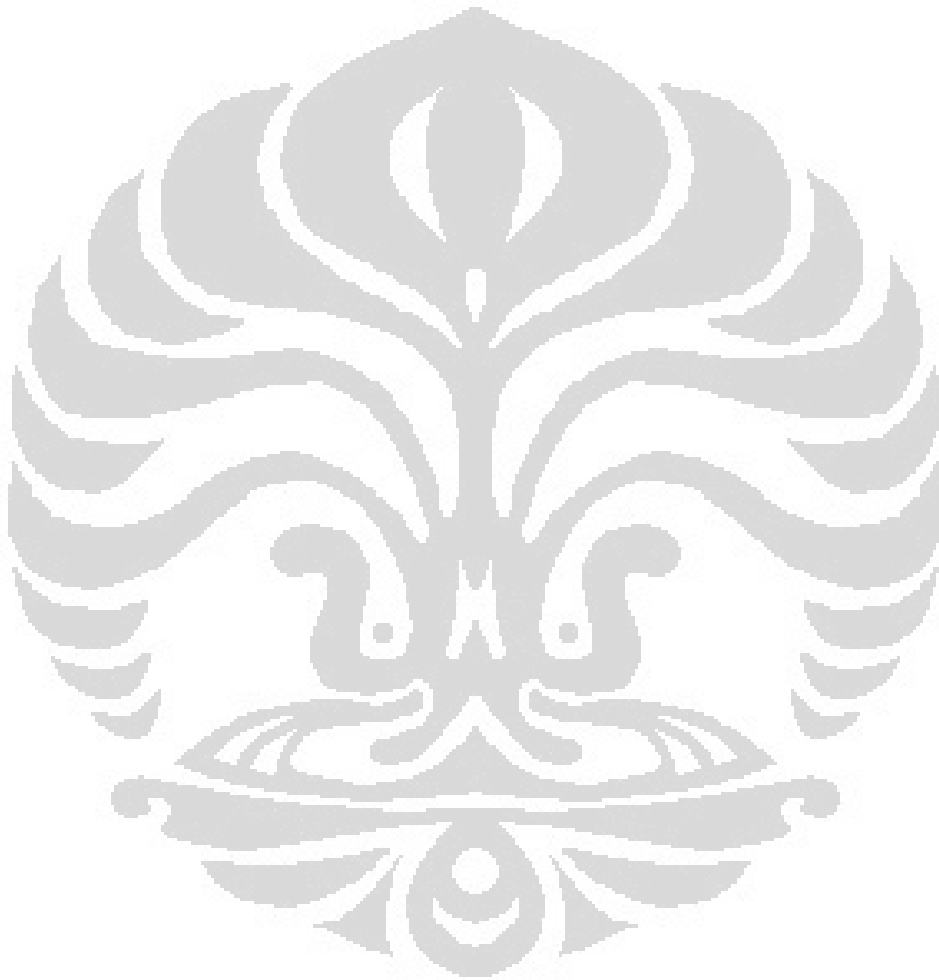
- Bagaimana kondisi Monumen '45 Banjarsari sebelum adanya relokasi PKL.
- Bagaimana keadaan sekitar monumen banjarsari (kenyamanannya) setelah dilakukan relokasi.
- Bagaimana bentuk dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan pkl yang direlokasi ke ps.klithikan.
- Bagaimana bentuk dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan pasar klithikan notoharjo.
- Bagaimana pendapat. Apakah program ini dapat diterapkan di daerah lain selain Surakarta.



Lampiran 7

Pedoman Wawancara Perwakilan konsumen Pasar Klithikan

- Bagaimana bentuk dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan pkl yang direlokasi ke ps.klithikan.
- Bagaimana bentuk dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan pasar klithikan notoharjo.



Lampiran 8

Pedoman Wawancara Pengamat/Akademisi

- Bagaimana dampak yang dilihat setelah proses relokasi ini.
- Bagaimana keterlibatan pihak yang terkait dalam proses relokasi ini.
- Bagaimana keberlanjutan dari program ini.
- Bagaimana apabila program ini diterapkan di Pemkot lainnya.
- Apa yang menjadi landasan utama PKL mau untuk direlokasi. Apa pengaruh utamanya.



Lampiran 9

Verbatim Dinas Pengelola Pasar

Nama : Didik Anggono

Jabatan: Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan PKL

Lokasi : Kantor Dinas Pengelola Pasar Komplek Balaikota

Waktu : Senin, 09 April 2012 pukul 09.30

Peneliti : “Bagaimana kondisi Monumen ’45 Banjarsari sebelum adanya relokasi?”

Narasumber : “Emmm..Monumen ’45 Banjarsari itu, pada waktu sebelum relokasi, di sepanjang jalan itu..jadi monumen itu ada jalan melingkar gitu, ada monumen ditengahnya, kemudian dipinggirnya itu ada jalan melingkar, kemudian di samping jalan itu ada rumah-rumah, kalau jaman dulu, rumah pejabat jaman dulu, kalau di Jakarta itu Mentengnya gitu, tapi dengan adanya PKL yang menduduki disitu kurang lebih 20 tahun, gitu itu, tapi memang eeee tumbuhnya PKL yang sangat pesat itu pada tahun 98 pada saat krisis jadi dari dulu memang sudah ada, jadi tidak ada satu jengkal tanahpun yang kosong, semuanya digunakan oleh PKL, dan bangunannya itu permanen semuanya, total dari pendataan yang sudah dilakukan oleh Kantor Pengelolaan PKL pada waktu itu, sekitar 989 PKL.”

Peneliti : “Trus sebenarnya apa sih pak yang menjadi persoalannya, sehingga harus dilaksanakan relokasi?”

Narasumber : “Jadi PKL yang ada di tempat itu, *satu* menempati monumen. Kita tahu bahwa monumen itu suatu prasasti dimana untuk mengenang jasa pahlawan, artinya dengan adanya prasasti itu kita harus apa harus eeehh merawat, kemudian harus menghormati meskipun hanya sebuah bangunan, tetapi kondisinya oleh PKL itu tidak diberikan sama sekali, jadi prasasti itu ya untuk gantungan dagangan, untuk dipakuin dagangan, bangunan liar mereka, dilihat dari sisi fungsi dan historisnya itu eeee...menghormati

sejarah itu tidak ada rasa hormatnya kepada sejarah, satu itu, yang kedua, bahwa PKL itu menempati ruang publik, dimana dia menempati jalan, jalur tempat dan trotoar yang seharusnya digunakan oleh masyarakat umum untuk bersosialisasi disitu, kemudian ditengahnya juga ada taman, taman itu juga seharusnya dapat digunakan sebagai untuk rekreasi, setiap harinya seperti itu. karena PKL itu tidak pada peruntukkannya disitu, makanya mengganggu aktivitas masyarakat disitu dalam bersosialisasi di masyarakat pada umumnya.”

Peneliti : “Trus bagaimana pemecahan masalahnya itu? Saya ingin mengetahui bagaimana mekanisme dari awal dari perumbukkan pemecahan masalahnya itu sampai benar-benar terealisasi.”

Narasumber : “Oh yah, jadi pada awalnya Pemkot Surakarta itu selalu mendata, ya kalau ahli bilang itu kita kuasai dunia dengan data, begitu, artinya data dulu yang kita apa kita awal untuk bekerja itu. Kita kuasai data dan akan kita apakan data ini artinya dengan eee planning dari Pemkot Surakarta dengan sudah adanya data ini, kita eee untuk menormalkan kembali atau merevitalisasi tempat itu harus bagaimana, relokasi lah solusinya, kemudian kita mencari tempat, dan tempatnya sudah ada, dengan data yang sudah ada, kita membuat sejumlah eeee bangunan yang sesuai dengan jumlah PKL yang terdata, kita tidak hanya membangun kios-kios sejumlah itu, kita membangun sekitar 1.018 kios. Jadi ada sisa dari jumlah PKL itu, kemudian setelah tempat oke, tempat ada kemudian dana ada, anggaran kita kucurkan untuk pembangunan pasar itu, kemudian kita lakukan pendekatan, pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan secara personal kepada PKL, kita undang, masing-masing PKL nya, kita undang masing-masing ketua paguyubannya disitu, kemudian, adanya dialog sampai 54 kali kalau pernah dengar, itu Pak Wali sendiri yang melakukan itu, jadi setelah adanya pendataan. Pada awalnya setelah satu dua tiga kita mengundang itu, tidak ada yang

namanya diskusi, kita hanya mengajak untuk makan siang, makan pagi, makan malam. Pada akhirnya kalau kita mengajak seperti itu tanpa jelas ada maksudnya, kan mendatangkan tandatanya, saya itu mau diapakan tho? Kan begitu ya? Disitu terlihat orang-orang yang vokal, artinya orang-orang yang bisa mempengaruhi mereka, harus ada perlakuan khusus, artinya pada saat yang lain itu diam dan orang-orang itu berbicara, kita harus melakukan pendekatan yang khusus, kalau yang lain satu sampai dua kali, mereka bisa sampai lima kali, ee..proses seperti itu terus dilakukan oleh Pak Walikota, Pak Jokowi dan Pak Rudi, heh..kemudian, baru ke pertemuan yang ke 30 dan 35 itu disampaikan bahwa anda akan dipindahkan, pada waktu itu mereka tidak mengiyakan langsung tetapi juga tidak memprotes, tidak menolak, karena itu tadi orang Jawa itu mempunyai filosofinya bahwa kalau sudah diajak rembukan, diajak makan, saling kenal dengan baik, ada rasa tidak enak saat ingin menolak itu budaya Solo yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi Rudy, artinya kebudayaan kita itu, orangnya bagaimana, kita yang menguasai sendiri, proses pemindahan itu dengan budaya yang kita tahu itu ternyata bisa sukses. Tetapi akhirnya mereka mau *bargaining*, “saya mau dipindah pak, asal, kios gratis, pindahnya di kirab, bantuan modal, kemudian ada pembukaan akses jalan atau penambahan angkutan disitu, diperbaiki fasilitas jalan disitu, terus kemudian ada promosi, di televisi swasta setiap 6 bulan, dipromosikan di koran atau di media cetak itu kurang lebih satu tahun”. Artinya setelah mereka bilang iya, Pemkot itu sendiri menyanggupi apa yang mereka minta, dengan mengiyakan saja dengan jumlah PKL yang sebesar itu, sudah suatu keberhasilan Pemerintah, seperti ya kalau misalnya karepmu seperti itu wes aku beri.”

Peneliti : “Trus yang terlibat siapa aja pak?”

- Narasumber : “Yang pasti Walikota, Wakil Walikota dan jajaran dibawahnya, eehhh..ada kurang lebih 18 SKPD, ditambah TNI, ditambah POLRI, ditambah tokoh masyarakat.”
- Peneliti : “Ada pihak swasta yang ikut tidak pak?”
- Narasumber : “Oh ini murni dari Pemkot. Murni, tidak ada campur tangan dari swasta.”
- Peneliti : “Trus dampaknya bagaimana pak? Apakah ada dampak dari PAD nya sendiri?”
- Narasumber : “Kalau dampak secara sosial bahwa tempat di Banjarsari itu adalah apa kembali ke tempat semula, artinya masyarakat dengan berduyun-duyun, dengan senang hati, menempati suasana yang baru itu. dan eee mereka sudah lama sekali memimpikan tempat yang seperti itu, kemudian kalau dampak dari PAD, bahwa dulu mereka hanya dipungut sekita 200 rupiah, 300 rupiah, seperti itu..dan itupun tidak selalu dipungut, misalnya ketika mereka tutup, karena PKL, mereka tidak dipungut mbak, tapi sekarang mereka dipindahkan ke pasar dengan pengelolaan sendiri, ada kepala pasarnya, kemudian menempati kios yang permanen mereka satu harinya membayar sekitar 2.500 dari segi PAD, kita meningkat pesat sekali, dari 200 rupiah menjadi 2500, sesuai dengan aturan pasar. Dan jangan lupa mereka menempati kios itu gratis semua.”
- Peneliti : “Yang melandasi pelaksanaan relokasi ini apa pak? Karena setahu saya Perda tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima baru dikeluarkan tahun 2008, Perda No.3 itu?”
- Narasumber : “Emm..yang pasti ada yang namanya Perda Tata Ruang, saya lupa itu mbak, trus Perda berseri, Perda berseri itu 88, Tata Ruang itu tempat-tempatnya, ada apa, ada space-space tertentu yang digunakan, kemudian Perda Berseri itu yang berkaitan dengan taman, karena tidak boleh berjualan dan mendirikan bangunan di taman, kemudian Perda Nomor.6 tahun 2005 yaitu Perda LLAJ, Lalu Lintas Angkutan Jalan, jadi yang namanya jalan, trotoar, itu

mutlak digunakan untuk masyarakat berjalan, tidak untuk berjualan. Dan ditambah oleh Perda PKL nomor 8 tahun 1998 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.”

Peneliti : “Trus pak, bentuk dukungan Pemerintah dalam keberlangsungannya itu bagaimana?”

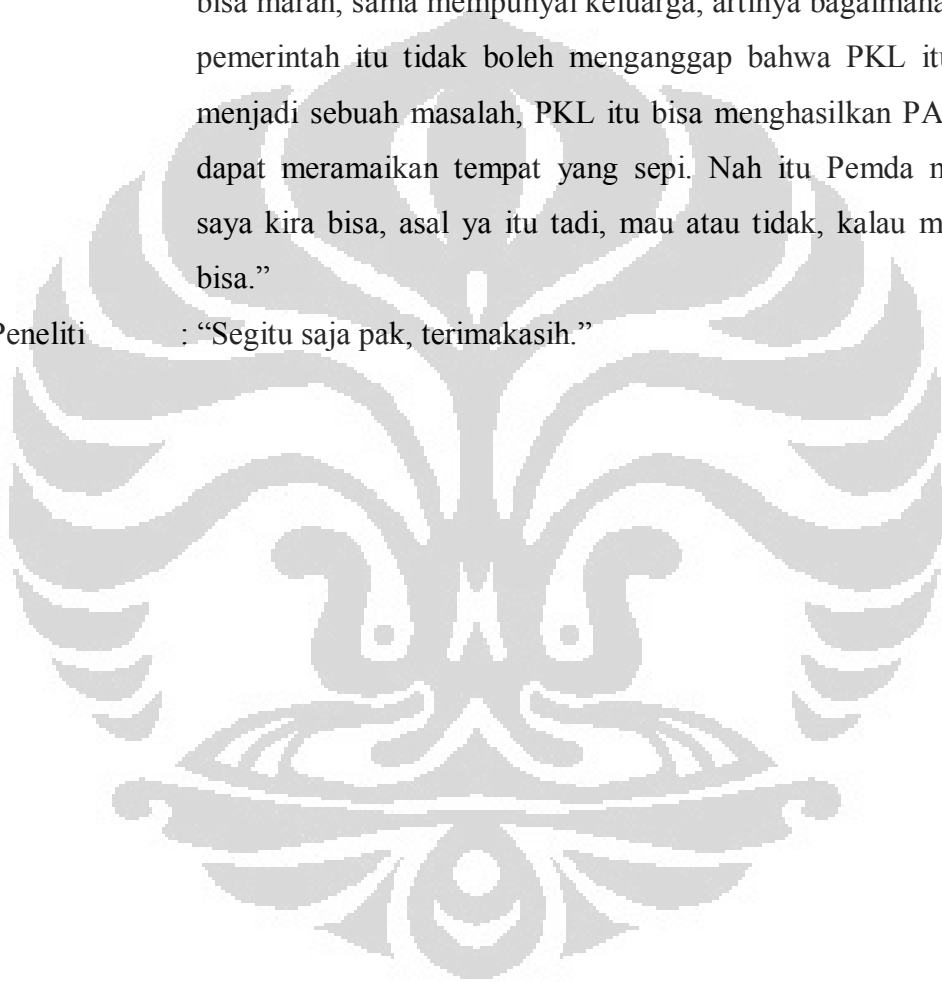
Narasumber : “Yang pasti ada kucuran dana, sejumlah 5 M, dari Menteri Koperasi, yang kedua, kita terus menerus mempromosikan tempat itu, artinya setiap ada kunjungan tamu, setiap ada kunjungan dari daerah lain, kita ajak kesana, itu sisi dari pemerintah ya. Dari penunjuk jalan kota Surakarta, kalau masuk di Kota Surakarta itu setiap jalan ada arah dan penunjuk ke Pasar Klithikan Notoharjo, itu ada seperti itu, artinya itu bentuk dukungan dari Pemerintah setelah pasca-relokasi itu kita tidak terus terserah kalian hidup sendiri, itu ngga, kita tetep mempromosikan mereka sedemikian rupa itu agar ya tetep bener-bener menjadi survive dan pendapatan bertambah, sehingga kesejahteraan masyarakat itu juga bertambah, PAD kita juga bertambah, seperti itu.”

Peneliti : “Satu lagi deh pak, sebenarnya menurut Bapak sendiri relokasi seperti ini dapat diterapkan di daerah lain tidak?”

Narasumber : “Saya kira kuncinya mau apa tidak, dan kalau mau pasti bisa, asal kita mau kita bisa. Artinya saya sampaikan tadi ada budaya, ya..budaya kami itu seperti itu, dan mungkin bisa diambil hanya karena wong budaya Solo seperti itu, di kita ndak bisa, itu sudah ga mau dulu, artinya Pemerintah itu kan sebenarnya punya power, dalam arti power itu memberdayakan, menata kota, kalau bersentuhan dengan PKL mau diapakan, gitu. Biasanya Pemkot atau Pemda itu ingin enaknyanya saja, ini gimana, pimpinan itu hanya perintah tapi tidak memberikan solusi, itu artinya seperti “PKL disana mengganggu, gimana caranya itu pergi”. Nah itu yang jadi masalah mbak, tapi kalau perlakuan seperti kami, bahwa PKL itu dipandang adalah eeehhh masyarakat yang mandiri, yang bisa menggerakkan ekonomi kota ini walaupun

kecil, tapi mereka dapat menghidupi keluarga mereka sendiri tanpa harus meminta pada Pemerintah gitu. Artinya, kalau Pemda yanglain itu mau berpikir, mau meluangkan waktu, mau tidak ada gap antara pejabat dan PKL, itu saya rasa bisa. Jadi kita tidak boleh memandang kita yang lebih tinggi, kita hanya memberi perintah dan mereka hanya menerima perintah kita me apa ya menempatkan PKL itu sama seperti kita, sama manusianya, sama bisa marah, sama mempunyai keluarga, artinya bagaimana kita itu pemerintah itu tidak boleh menganggap bahwa PKL itu hanya menjadi sebuah masalah, PKL itu bisa menghasilkan PAD, PKL dapat meramaikan tempat yang sepi. Nah itu Pemda manapun saya kira bisa, asal ya itu tadi, mau atau tidak, kalau mau pasti bisa.”

Peneliti : “Segitu saja pak, terimakasih.”



Lampiran 10

Verbatim Satpol PP

Nama : Ibu Sunarti (Sekretaris Satpol PP)

Lokasi : Kantor Satpol PP Gedung Tawangpraja Komplek Balaikota

Waktu : Rabu/4 April 2012 pukul 11.30

Peneliti : “Sama Ibu siapa ya maaf?”

Narasumber : (tertawa, sambil memperlihatkan name tag seragamnya)

Peneliti : “Sunarti. Ibu di bagian apa?”

Narasumber : “Saya sekretarisnya Satpol.”

Peneliti : “Saya mau nanyain awalnya itu, gimana sih ketertiban monumen banjarsari setelah adanya relokasi?”

Narasumber : “Ya, disana itu kan dulu banyak sekali PKL yang sangat banyak sekali akhirnya kan disana itu mengganggu baik di rumah tangganya sana, karena disana itu kan di depan rumahnya banyak emple-emple itu yang keliatan kumuh, kan selain itu juga selain mengganggu keindahan rumah-rumah itu juga mengganggu lalu-lintas, ya..kemudian lingkungan menjadi kumuh dan tidak tertib..keliatan jelek dan penataan kotanya jadi tidak bagus, dulu, waktu pak walikotanya Slamet Suryanto, dia sudah berusaha merelokasi tapi tidak berhasil..udah di anu tidak berhasil, akhirnya setelah adanya pergantian walikota, pak joko widodo ini dia berusaha semaksimal mungkin bekerja sama dengan dinas pasar, satpol pp kemudian bisa berhasil.”

Peneliti : “Jadi pada saat itu memang ketertiban PKL nya belum tertib ya bu?”

Narasumber : “Belum, iya, masih acak-acakan.”

Peneliti : “Trus, sekarang pas udah di relokasi, bersih bu disana?”

Narasumber : “Disana, setelah direlokasi, dipindah ke Klithikan, kami Satpol PP membantu untuk patroli setiap hari, karena kalo tidak dipatroli,

nanti ada yang satu dua ngeyel mendirikan lagi, akhirnya temen-temennya pada ikut-ikut lagi.”

Peneliti : “Trus disana memang ada yang patroli setiap hari kesana atau memang khusus jaga disana bu?”

Narasumber : “Ada yang patroli.kemudian untuk wilayahnya diserahkan kepada Linmas masing-masing wilayah.”

Peneliti : “Kalau boleh tahu, sebenarnya siapa aja yang turut berpartisipasi dalam relokasi kemarin?”

Narasumber : “Banyak, dari Paguyuban PKL, SKPD Instansi terkait, misalnya dinas pasar, DPU Tata Kota, DKP, dan Satpol PP itu sendiri. Soalnya kalo ada pembuatan taman, itu haknya DKP, kalo pembongkaran, ganti rugi, DPU, gitu..kalo PKLnya urusannya pasar..kalo satpol hanya membantu penertiban, pembongkaran, boyongan, gitu.”

Peneliti : “Trus yang jadi bentuk legislasi sebagai landasan dari relokasi tersebut apa bu?”

Narasumber : ”Ya itu anu, dari apa itu, penertiban kita itu, jadi langsung Walikota, dibantu dari instansi-instansi tadi.”

Peneliti : “Trus gimana bu, untuk kedepannya selain ada patroli?”

Narasumber : “Iya, kan ada Perda tentang PKL.”

Peneliti : “Trus bentuk dukungan dari pemerintah sendiri bu, yang ibu tau, tentang keberlanjutan relokasi ini?”

Narasumber : “Maksudnya kelanjutan yang disana (Monumen) atau yang disana (Ps.Klithikan)? Kalo yang bekas itu tetap ditertibkan terus, dan di setiap ada event-event disana ada upacara, misalnya upacara 17an, dulu ngga bisa karena banyaknya PKL, sekarang digunakan untuk event-event gitu..untuk anak-anak mainan gitu.”

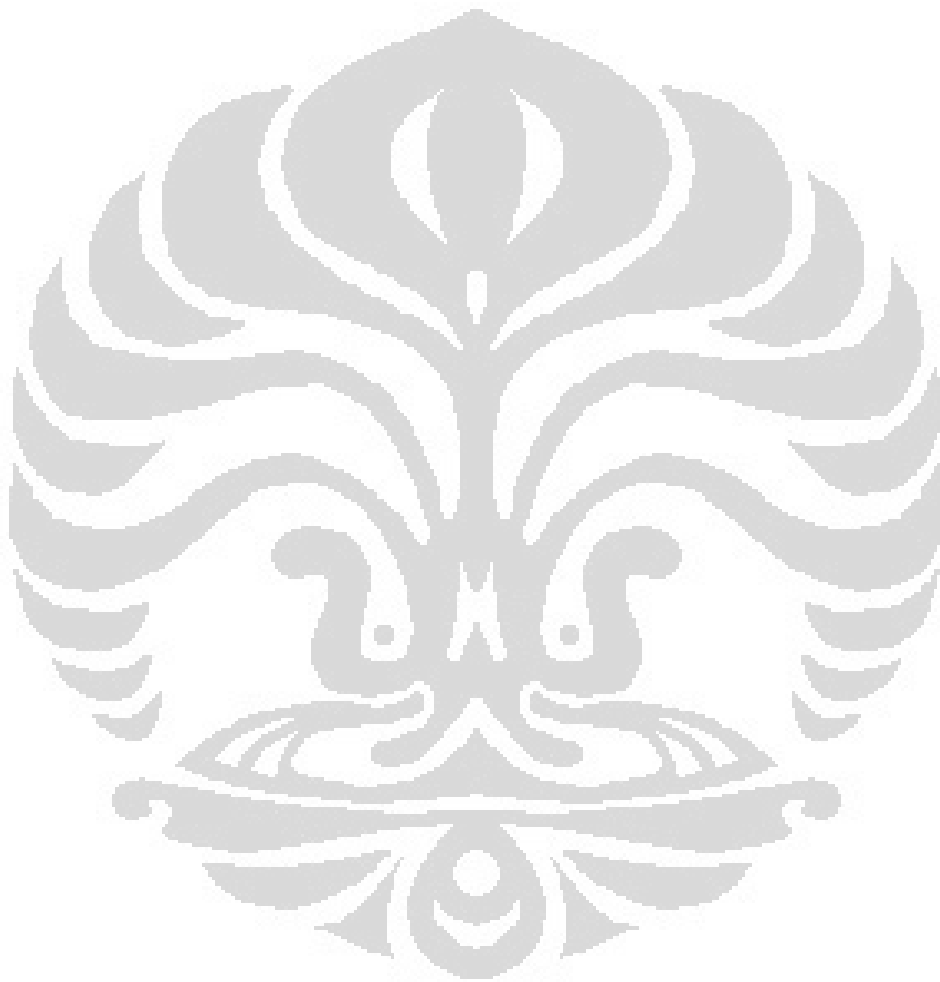
Peneliti : “Trus yang direlokasi itu semua emang pedagang Klithikan (barang bekas/onderdil) bu?”

Narasumber : “Dulu itu sebutannya Pasar Maling yo mas (menanyakan ke staf satpol pp yang ada di dalam ruangan), orang yang hasil maling anu dijual disana cepet gitu loh..heuheuheu..”

- Peneliti : “Serem juga pasar maling. Trus sikap pedagang saat akan direlokasi bagaimana bu?”
- Narasumber : “Karena seringnya pendekatan, semakin dia sadar itu akan ditertibkan itu karena program pemerintah, jadi dengan adanya relokasi itu juga bukan hanya dia digusur aja gitu, tapi dia diberi untuk pindah ke tempat lain dan disana gratis, tidak dipungut apapun, itu merupakan sebuah solusi. Jadi waktu itu dilaksanakan pendataan, sosialisasi, pembinaan, wawancara.”
- Peneliti : “Menurut ibu, program yang sudah berhasil merelokasi sekitar 900 PKL ini bisa diterapkan di daerah lain tidak?”
- Narasumber : “Ya itu dengan adanya relokasi 900 PKL itu malah anu, dari mancanegara itu pada mau studi banding kesini, banyak tamu-tamu kesini yang akhirnya ingin meniru bagaimana cara penanganan itu gitu.”
- Peneliti : “Menurut ibu bagaimana bu? Bisa diterapkan di tempat lain atau tidak bu?”
- Narasumber : “Bisa itu, sangat bisa itu, tergantung dari pimpinan daerah, kalau pimpinan daerahnya mendukung, pasti bawahannya akan slaing membantu gitu.
- Peneliti : “Trus, sebenarnya yang langsung memegang peran kepemimpinan dalam relokasi ini siapa bu?”
- Narasumber : “Walikota, atas programnya Pemkot.”
- Peneliti : “Hambatannya apa saja bu saat relokasi dilangsungkan?”
- Narasumber : “Hambatannya ya itu, dia tidak segera harus segera pindah tidak, jadi kita harus itu tadi, prosesnya lama, tidak harus cepat itu tidak. Sekitar 60 kali atau 70 kali, padahal sekali makan bisa berapa juta itu.”
- Peneliti : “Itu semua PKL diundang?”
- Narasumber : “Iya itu semua diundang ke (ga jelas, pokoknya suatu tempat) trus diajak makan.”
- Peneliti : “Oh berarti itu karena PKLnya itu sendiri yang sadar ya bu?”

Narasumber : “Iya jadi tidak ada perlawanan. Nanti, datanya yang lebih komplit di Dinas PKL.”

Peneliti : “Yaudah bu, terimakasih segitu aja.”



Lampiran 11

Verbatim Kepala Pasar Klithikan Notoharjo

Nama : Bapak Murdi

Lokasi : Pasar Klithikan Notoharjo

Waktu : Senin, 9 April 2012 pukul 13.00 WIB

Peneliti : “Bagaimana dampak relokasi PKL ini Pak?”

Narasumber : “Dampaknya sangat besar sekali bagi pedagang terutama, karena dulu sewaktu jadi PKL, seolah-olah masih liar, kalau sekarang sudah ada wadahnya di Pasar Notoharjo ini, jadi bagi mereka ini merupakan kemajuan yang sangat pesat.”

Peneliti : “Kondisi Monjari nya bagaimana Pak?”

Narasumber : “Sekarang sudah menjadi taman kota dan kembali pada tempatnya.”

Peneliti : “Yang berpartisipasi saat relokasi itu siapa saja Pak?”

Narasumber : “Yang pertama yang pasti Bapak Walikota, Bapak Wakil Walikota beserta jajarannya yang mempunyai konsep kemudian jajaran anu pemerintah kota, terutama Dinas Pengelolaan Pasar.”

Peneliti : “Bentuk kerjasamanya bagaimana pak? Apakah swasta ikut terlibat di dalamnya?”

Narasumber : “Swasta tidak terlibat, ya itu dari Bapak Walikota dan Dinas Pengelolaan Pasar dan Dinas Tata Ruang Kota, Dinas Perhubungan.”

Peneliti : “Dampak untuk PAD nya meningkat ga pak?”

Narasumber : “Bagi Pemkot meningkat sekali, yang dulu paling hanya sekitar tahun 2011 itu 1 M per tahun sekarang meningkat menjadi 1,8 M per tahun. Itu dari Pasar Klithikan Notoharjo saja.”

Peneliti : “Trus apa bentuk dukungan dari Pemerintah itu sendiri pak untuk keberlanjutan Pasar ini?”

Narasumber : “Surat Hak Penempatan atau SHP, KTP-P (Kartu Tanda Pengenal Pedagang).”

Peneliti : “Kalau dari masyarakat disini Pak?”

- Narasumber : “Masyarakat disini juga banyak membantu, apalagi di masalah perparkiran, masalah keamanan itu terlibat.”
- Peneliti : “Yang langsung memegang peran kepemimpinan dalam relokasi ini siapa pak?”
- Narasumber : “Langsung Pak Walikota dan Wakil Walikota.”
- Peneliti : “Hambatan-hambatan yang dihadapi saat relokasi?”
- Narasumber : “Kalau yang saya dengar itu banyak sekali, awal-awalnya kan pedagang itu tidak tahu untuk direlokasi, mereka hanya tahu mau digusur gitu, tapi dengan beberapa kali pertemuan, kalau tidak salah sampai puluhan kali, pas lima puluh empat kali baru Bapak Walikota ada konsep, mereka akhirnya mau. Kalau nanti mau dipindahkan akan jadi saudagar gitu seperti kata Pak Wali, dan terbukti mereka sudah banyak yang sukses, bagi pedagang-pedagang.”
- Peneliti : “Menurut Bapak program relokasi yang sudah berhasil diterapkan disini dapat diterapkan di daerah lain tidak pak?”
- Narasumber : “Eeehhh...kal menurut saya bisa, tergantung anu, pimpinan dan konsepnya.”
- Peneliti : “Terimakasih Pak, sekian saja.”

Lampiran 12

Verbatim Pedagang Kaki Lima

Narasumber 1

Nama : Bapak Nanang

Lokasi : Pasar Klithikan Notoharjo

Waktu : Senin, 09 April 2012 pukul 12.00

Peneliti : “Pertama, sebenarnya bapak mengalami dampak dari relokasi yang sudah bapak alami tidak? Seperti apa?”

Narasumber : “Ya selama ini, yang aku rasakan sih ada manfaatnya juga, karena disana tu tempatnya tidak bisa menjanjikan untuk hari depan, akses untuk pinjam-pinjam permodalan di bank kan susah, kalo disini kan aksesnya bisa dipercaya, maksudnya kan jelas gitu.”

Peneliti : “Bapak jual apa sih pak?”

Narasumber : “Alat-alat listrik sama untuk alat-alat bpl-bpk untuk pabrik.”

Peneliti : “Trus kalo bentuk dukungan dari pemerintah itu sendiri pak?”

Narasumber : “Kebetulan waktu itu kan waktu setelah direlokasi itu sendiri kan kita direlokasi masuk di pasar klithikan yang baru itu kan pengelola Pemkot, khususnya Pak Walikota kan menjanjikan mau dikasih kemudahan untuk simpan-pinjam, waktu itu ebetulan kita juga ditinjau dari Menteri Koperasi, waktu itu yang pegang masih Pak Suryadharma Ali, nah kebetulan Pak Jokowi itu menjanjikan ga begitu banyak, tapi siapa tahu nanti dikasihnya banyak ya kita kelola yang baik, waktu itu satu pedagang dipinjamkan modal hanya sekitar 500 ribu, waktu itu malah Pak Suryadharma Ali setelah tahu antusiasnya itu bisa naik sampai sepuluh kali lipat, satu pedagang bisa dipinjamkan lima juta, waktu itu kan yang direlokasi kan sekitar seribu pedagang jadi kita dipinjami sekitar 5 M lebih, kan waktu itu dibentuk suatu koperasi, namanya koperasi Monjari, Monjari itu singkatan dari Monumen Banjarsari, sampai sekarang koperasi itu berdiri itu koperasi di

atas, nah itu di atasku persis. Nah kebetulan dari simpan pinjam itu berkembang, sampai pedagang itu bisa bertahan sampai juga berkembang kaya gini.”

Peneliti : “Trus bentuk dukungan dari masyarakat pak?”

Narasumber : “Justru masyarakat disini itu dahulu kumuh mbak, seperti daerah prumpung di Jakarta. Disini itu, sebelum adanya relokasi, tempatnya itu bener-bener tempat yang tidak nyaman kalau dikunjungi, isinya orang-orang brengsek lah kalau istilahnya. Setelah adanya relokasi ini mereka berkompetisi untuk bermasyarakat gitu, jadi seakan-akan mereka akhirnya perduli dan sadar bahwa hidup bermasyarakat itu enak, akhirnya masyarakat sini direkrut jadi tukang parkir, keamanan, akhirnya menurut saya dukungan dari masyarakatnya besar juga, mereka-mereka kan akhirnya dapat berubah nasibnya juga. Dan akhirnya nama Klithikan jadi baik, dulu kalau orang dengar nama orang Semanggi atau orang Silir, ah sudah gamau dengar, katanya isinya orang-orang brengsek, makanya sekarang begitu dengar itu, konotasi namanya sudah mulai hilang dan terkikis. Dulu boro-boro orang mau diajak kesini gitu. Dulu juga, mohon maaf ini, dulu juga sebelah sini dulunya bekas lokalisasi mbak, kaya kampung gitu loh, setelah ini masuk semua digusur dan jadi ruko-ruko dan sebelah juga menjadi islamic center saat masih adanya Almarhum Gus Dur.”

Peneliti : “Trus pak, sebenarnya kenapa Bapak sampai mau direlokasi?”

Narasumber : “Ya sebetulnya saya sih, sebenarnya relokasi memounyai tujuan mbak, waktu itu kan dari hasil rapat-rapat itu kan aku denger, wong aku sendiri kan lama hidup di Jakarta, kenapa di daerah aku gamau berkembang untuk mengembangkan daerah aku sendiri, sedangkan aku di Jakarta kena PHK ngapain aku harus hidup sengsara lagi, yaudah hidup di daerah aja, ta’ kembangin, kebetulan temen-temen yang di Klithikan ada yang setuju ada yang ngga kan, trus kita kasih ini apa fasilitiasi loh, besok kalo

kita mau direlokasi kita punya perencanaan, yang sudah memiliki keluarga, punya anak otomatis ingin hari depannya kenapa harus kerja disini (Monjari), disini kan seharusnya bukan tempat yang seharusnya untuk jualan, lama-lama kan mengotori kota, gimana kita kalau relokasi itu meminta pertimbangan dimana relokasi itu bisa untuk masa depan, sehingga dari hasil rapat-rapat disetujui kios-kios kami ini.”

Peneliti : “Trus sebenarnya menurut Bapak, program yang sudah berhasil di Kota Solo ini bisa diterapkan di daerah lain tidak pak?”

Narasumber : “Ya sebetulnya kalau dibikin ini ya kalo sistem cara penyampaian ke pedagang apah tempat-tempat yang ga berdagang ya, yang penting itu pemerintahnya yang bisa kerjasama sama bisa ngerti, mereka-mereka maunya apa, jadi ga miskomunikasi, sebetulnya semuanya bisa, asal kita bicaranya sama yang mau direlokasi itu titik temunya ada gitu, kalo dulu memang alot mbak disini, sampai 14 kali pertemuan sampai ada titik kesepakatan, pemerintah ya menyediakan apa yang dimauin, pedagang mau ngikutin pemerintah asal pemerintah mau jamin kelangsungan usahanya, gitu.”

Peneliti : “Satu lagi pak, apa hambatan Bapak setelah relokasi?”

Narasumber : “Sebetulnya kalau di Solo, akses karena keadaan kota Solo kecil kan, jadi sebetulnya hambatan itu pasti ada, tapi karena keterbatasan dari Pemkot itu sendiri apa adanya sehingga ditata sekian rupa sehingga sedikit tidak merepotkan. Kalau orang luar kota memang kadang-kadang ngeluh, mau masuk aja kok keadaannya kayak gini, gitu, Cuma lama-lama menyadari, kalau Solo itu kota kecil, mau diapakan pun ga bisa dibesarkan kan. Saya rasa kalo di daerahlain pemerintahnya bisa menyiapkan yang lebih bagus, saya rasa bisa. Kalau di Solo kan ini, mau mindah satu tempat saja harus memikirkan 10 kali, ini mau dipindah kemana, ini dipindah ini nanti tujuannya ini, yang dipindahkannya itu bisa untuk kelanjutan hidup atau tidak gitu.”

Peneliti : “Yaudah pak, segitu aja, terimakasih.”

Narasumber 2

Nama : Bapak Suratno

Lokasi : Pasar Klithikan Notoharjo

Waktu : Senin, 09 April 2012 pukul 13.00

Peneliti : “Bagaimana dampak dari relokasi ini pak?”

Narasumber : “Lebih nyaman disini dari pada disana. Lebih aman. Dari segi penghasilan pun, kalo penghasilan lebih baik disana, cuman kita kan ya mengikuti arahan dari Pemkot, tapi akhirnya disini ya kita juga bisa.”

Peneliti : “Apa saja bentuk dukungan dari Pemerintah pak?”

Narasumber : “Banyak kok, promosi pemerintah ada, tv, media ada, banyak. Jadi Pemkot disini mindah juga ga tinggal diem, diupayakan dimana supaya disini juga bisa berjalan juga.”

Peneliti : “Kalau dukungan masyarakat disini bagaimana pak?”

Narasumber : “Oke, baik, ga ada masalah, malah nambah lahan pekerjaan bagi masyarakat disini.”

Peneliti : “Trus Bapak sendiri, pertamanya kenapa mau sampai direlokasi?”

Narasumber : “Ya kita mikirnya secara panjang, anu karena disana itu kita jualnya hanya dipingir jalan, bukan hak milik kita, akhirnya kalau sudah sampai disini kios ini menjadi milik kita sendiri, gratis, tidak dipungut biaya. Pada awalnya sih berat juga, tapi pada akhirnya kita menerima juga untuk dipindahkan disini. Kios disini juga kita milih sendiri.”

Peneliti : “Menurut Bapak sendiri program relokasi ini dapat diterapkan di Daerah lain ga?”

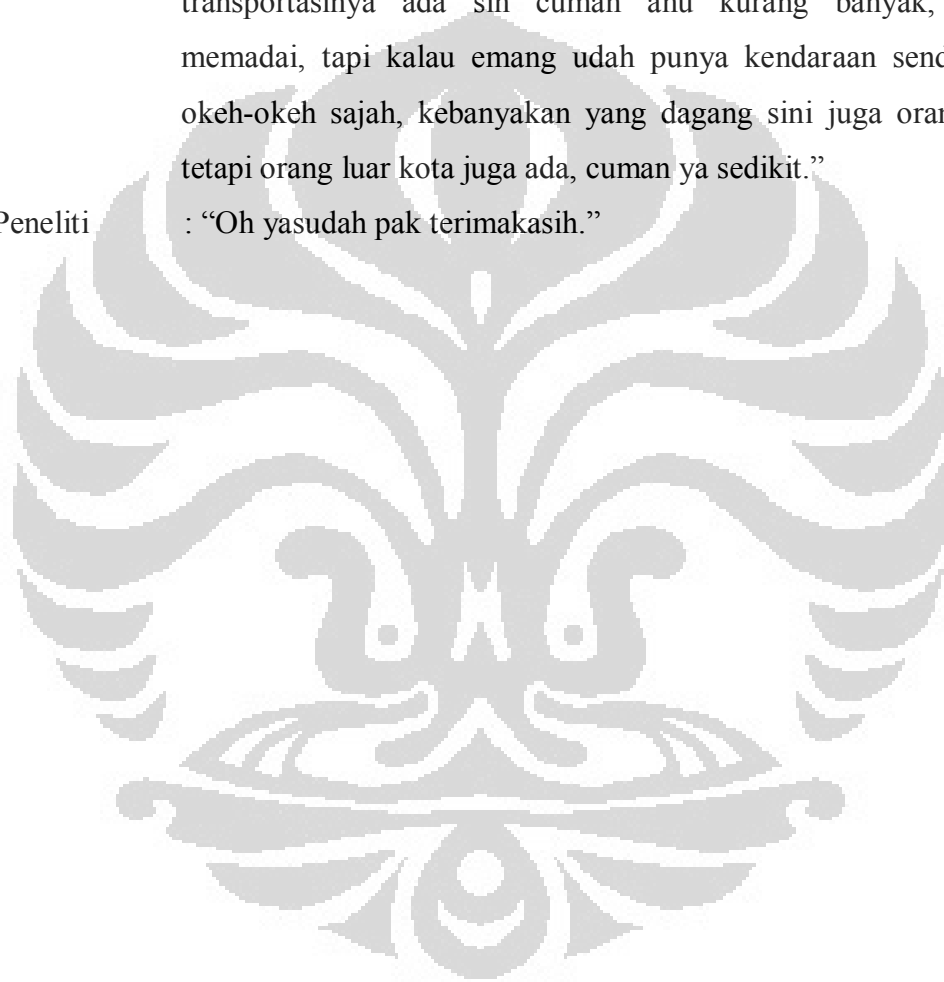
Narasumber : “Kalo masyarakatnya bisa menyadari seperti orang di Solo sini, bisa juga, bisa..kita ngambil misalnya pemkirannya di Solo sama di Jakarta sudah lain lagi, ga anu, cuman karakternya, kalau misalnya sampai sekarang pemimpinnya masih Pak Jokowi, walaupun di

Jakarta juga bisa. Soalnya Pak Jokowi itu mindah orang ga asal dipindahkan, tetapi dipikirkan dampak positif dan negatifnya.”

Peneliti : “Apakah Bapak merasakan hambatan selama disini?”

Narasumber : “Transport sudah ada, tetapi memang tidak sebanyak ditengah, kalau belum punya kendaraan sendiri memang agak repot, cuman transportnya emang banyak yang cuman disitu juga ada, Cuma tidak terlalu banyak seperti di daerah Slamet Riyadi, kalo transportasinya ada sih cuman anu kurang banyak, kurang memadai, tapi kalau emang udah punya kendaraan sendiri mah okeh-okeh sajah, kebanyakan yang dagang sini juga orang Solo, tetapi orang luar kota juga ada, cuman ya sedikit.”

Peneliti : “Oh yasudah pak terimakasih.”



Lampiran 13

Wawancara Akademisi

Nama : Drs. H. Sudarmo, MA, Ph.D

Jabatan: Ketua Program Magister Administrasi Publik FISIP UNS

Lokasi : FISIP Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS)

Waktu : Kamis, 12 April 2012 pukul 14.30 WIB

Peneliti : “Bapak ngeliat ga pak dampak dari relokasi PKL Monumen ’45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo?”

Narasumber : “Saya meneliti juga disitu karena itu untuk disertasi saya S3 kan ada, malah buku saya itu sudah dipublikasi di Jerman, sudah ada. Ehh jadi, dampak itu dapat dilihat dari jangka pendek dan panjang ya mbak, kalo dalam jangka pendek ketika itu direlokasi, itu ada eee sejumlah orang, sejumlah PKL yang kemudian tidak bisa melakukan bisnisnya selama kira-kira antara tujuh bulan sampai satu tahun itu mereka itu kurang bisa melakukan kegiatannya sebagai PKL karena apa, ketika relokasi itu dilakukan, dan relokasi itu ditempat yang terpencil waktu itu, karena akses kemana-mana itu jauh dan daerah itu merupakan daerah Silir, lebih sering orang mengatakan apa itu daerah prostitusi, maka eee itu dianggap itu daerah yang tidak disukai orang untuk datang kesana, kalau orang itu baik-baik. Maka sekitar satu tahunan mereka kesulitan untuk melakukan aktivitas disana. Efek langsungnya itu, karena mereka mendapatkan kios gratis dari pemerintah, dengan dana yang konon tadinya 5,5 Milyar dan tiba-tiba naik sekitar 10 Milyaran, mungkin hampir 11 barangkali ya, itu mereka yang sudah punya kios tetapi tidak mendapatkan uang berbulan-bulan, maka kios itu mereka jual. Kios yang dijual itu lebih banyak jatuh kepada orang-orang yang punya *capital* besar. Akhirnya kios-kios itu sekarang pada umumnya orang-orang yang memiliki *capital* besar, sedangkan orang-orang yang punya *capital* kecil ya sudah, begitu kiosnya dijual, dia entah pergi kemana, mung saya tidak tahu persis mereka

pergi kemana, apakah mereka menjadi PKL lagi atau membuka usaha lain saya ndak tahu, yang jelas saat saya meneliti tahun 2006 dan saya menanyakan kepada *stakeholder* disana yang sangat dekat dengan saya, itu sekitar saat itu 25 persen dari total kios yang ada disana itu sudah beralih tangan dalam waktu beberapa bulan. Dampak jangka panjangnya, karena itu perlu sosialisasi, perlu dimengerti dan dipahami oleh orang lain, dikomunikasikan informasikan *from mouth to mouth* itu kemudian tumbuhlah pasar yang seperti sekarang ini, tetapi itu memerlukan proses yang sangat panjang, tapi yang jelas ee dampak langsung tadi tuh tadi banyak PKL yang tidak dapat melanjutkan aktivitasnya, banyak kios yang kemudian sudah beralih tangan dan juga eeee apa akibat dari kondisi ekonomi yang waktu itu em apa, PKL tidak bisa mengatasinya, sebagian itu melakukan apa usaha yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu usaha apa saja yang kira-kira bisa laku disaat itu, karena kalau hanya jua rongsok-rongsok seperti itu kurang bisa laku, banyangkan kalau misalnya sudah sebulan, tidak ada pembeli mau makan apa? Kalau ngga makan modal yang dia punya, karena ada yang namanya siapa itu, ehhh itu orang Sragen sebenarnya, itu ada yang sampai makan anaknya itu dia kesulitan, untuk dia makan sendiri saja sehari sekali, saya lihat itu makanannya kaya apa itu, “*mas lha itu opo?*” “*ini nasi untuk makan*” “*makan berapa kali itu?*” “*Cuma sekali pak, nanti kalo dua kali nanti saya ga punya modal, ini saja sudah hutang-hutang.*”. jadi sebagian sudah ada yang hutang-hutang, maka sebelum mereka bangkrut betul ya mereka jual itunya kiosnya untuk nombokin hutang kemudian dia pergi entah kemana, gitu. Kemudian dampak selain itu juga mereka langsung membuat sebuah paguyuban, dan itu berkembang sampai sekarang. Tapi saya melihat mengapa mereka di eeee, sebenarnya rencana relokasi itu sendiri sudah ada semenjak jamannya Slamet Suryanto, itu Walikota sebelum Jokowi itu sudah ada, tetapi Slamet Suryanto

tidak kunjung melakukan karena di satu sisi kan PKL sendiri kan banyak yang dekat dengan Slamet Suryanto, Slamet Suryanto kan di satu sisi mungkin dia katakanlah pendidikannya relatif rendah, tetapi dia hubungan personal dekat dengan orang-orang bawah itu sangat kuat sehingga Suryanto juga melihat, tidak mau terjadi gejolak maka eee relokasi relokasi itu selalu ditunda, seperti itu. Dari beberapa kader-kader PKL itu juga memang sangat dekat dengan Slamet Suryanto dan sebagiannya juga ada kader-kader dari PDI-P, sehingga mereka itu secara politis juga dekat, secara pribadi dekat, dan secara kepentingan politis juga mengapa relokasi pada waktu itu ditunda karena memang ee tidak ingin menimbulkan gejala yang lebih besar, apalagi masalah ini masih umum di Indonesia.’

Peneliti : “Bapak tahu tidak bagaimana keterlibatan *stakeholder* yang terlibat dan bagaimana mereka saling membagi kerjasama dalam relokasi ini? Apakah ada pihak swasta yang terlibat atau tidak?”

Narasumber : “Kalau swasta jelas, karena mereka lebih dilibatkan dalam pembuatan proyek ya mbak, proyek dalam pembuatan pasarnya gitu, tapi secara finansial mereka itu dari dana dari pemerintah kota Surakarta sendiri, yang pertama menelan 5,5 Milyar, kemudian diusulkan lagi pada waktu ada pengusulan itu anggaran pembaruan itu dia Pemkot itu menganggarkan sekitar 10 Milyar seperti itu, mungkin lebih ya, saya itung sampai 10, tetapi ada yang mengatakan ada yang sampai 11, seperti itu. kemudian, ada yang mengatakan begini, wong dengan 5,5 Milyar saja sudah bisa keliatan kok ditambahin lagi untuk apa? Gitu. Lah itu persoalan itu belum terjawab kemana selebihnya itu, ada apa kok sampai segitu besarnya, memang untuk pembangunan sendiri ikut melibatkan pemborong tentunya ya, soal pemborong menentukannya dimana nanti Pemkot sendiri yang menentukan dan yang paling tahu prosesnya. Tapi yang jelas pembangunan-pembangunan sebanyak

itu yang jelas mengikuti apa yang ditentukan oleh Pemkot berapa jumlahnya, walaupun konon dari penghitungan itu jumlah kios itu lebih besar dibanding jumlah PKL itu sendiri, jadi siapa sebenarnya yang diuntungkan dan untuk kepentingan siapa kios PKL yang disediakan itu tidak ada kejelasan gitu. Untuk apa dibangun lebih dari jumlah yang seharusnya gitu, toh itu menggunakan dana-dana dari APBD.”

Peneliti : “Bapak tahu tidak tentang keberlanjutan dari program ini? *Sustainability*-nya? Dalam hal pengembangan PKL disananya.”

Narasumber : “Oh, disana itu kan setelah mereka dipindah, mereka itu tidak lagi dinamakan PKL ya walaupun ya saya masih menganggap mereka itu tetap saja pedagang informal ya, karena mereka masih model-model cara-cara PKL itu masih diterapkan, cuma dari sisi pemerintah yang mereka ketahui itu sudah pedagang formal, karena sudah jadi pedagang pasar gitu, tapi saya melihat ada sebagian disana yang berjualan secara informal juga, sehingga mereka ee walaupun mereka dikatakan formal tetapi masih banyak juga yang melakukan secara informal, jadi apakah itu akan sustainable atau tidak ya saya melihat sekarang ini karena prospeknya sudah bagus, itu sepertinya mereka disana akan tetap berjalan dan akan tetap menjadi pasar, nah yang jadi persoalan bagaimana kompetisi nanti ke depan, apakah nantinya kompetisi disana akan mengalahkan orang-orang yang hanya bermodal kecil itu bagaimana, apakah nanti yang kecil akan tergusur hingga nanti yang bermodal kecil akan menjual kios kepada yang bermodal besar itulah yang harus dijaga agar tidak terjadi seperti itu, karena tujuan utama dilaksanakannya relokasi ini juga sebenarnya ingin menaikkan harkat martabat dari PKL itu sendiri, jadi jangan sampe persoalan-persoalan seperti ini yang dapat menimbulkan hilangnya akses pemodal kecil itu jangan sampe, itu harus dipertahankan. Mungkin harus ada intervensi sehingga PKL dengan orang-orang yang

bermodal kecil masih bisass bertahan disana kelangsungan hidup ekonomi mereka terjamin, itu yang saya kira penting. Tapi soal *sustainability* bagaimana pemerintah akan melakukan relokasi yang lain itu mungkin juga tergantung ada tidak lokasi yang bisa ditempati, kemudian ada ga pusat-pusat PKL yang dianggap menimbulkan masalah seperti PKL yang lalu-lalu itu.”

Peneliti : “Terus menurut Bapak sendiri, program relokasi yang sudah berhasil di Kota Surakarta ini bisa diterapkan di Pemerintah Daerah lain tidak pak?”

Narasumber : “Saya tidak mengatakan bahwa ini sebuah bentuk program yang berhasil ya, karena menurut saya kalau orang ada uang, bangun gedung, kemudian ada, saya tidak bisa melihat itu berhasil, yang saya lihat itu adalah prosesnya ya mbak, awal prosesnya itu yang menentukan program ini berhasil atau tidak karena kalau karena proses itu sendiri kan tidak murni, itu bentuk demokratisasi, itu sebenarnya ada pemaksaan-pemaksaan dibalik itu, orang tidak pernah tahu sebenarnya itu ada *pressure-pressure* yang orang tidak tahu, yang mereka tahu oh ada dialog, ya memang dialog ada, ada pertemuan, tapi kan bersama dengan itu ada *pressure-pressure* terhadap mereka sehingga mereka tidak ada pilihan kecuali relokasi, jadi yang namanya keberhasilan tuh kadang-kadang diartikan ketika orang itu sudah selesai membangun, dia itu berhasil, kaya Soeharto kan gitu, dia bangun apaa misalnya dengan angka gress nya ya dengan angka pertumbuhan sekian persen, dia dianggap berhasil, tetapi orang kan tidak mau mengetahui bagaimana proses di dalam menangani persoalan itu, kan dia bisa saja menggunakan kekerasan, atau sebagainya misalnya, ya sama dengan yang di Solo, itu kan ada *pressure-pressure* walaupun kita ngga tahu disitu, kalau misalnya kan ada *pressure* begitu kan nanti kita melihat itu bukan cara-cara yang terbaik, ya memang bukan berarti cara-cara *pressure* juga akan menghasilkan sesuatu yang

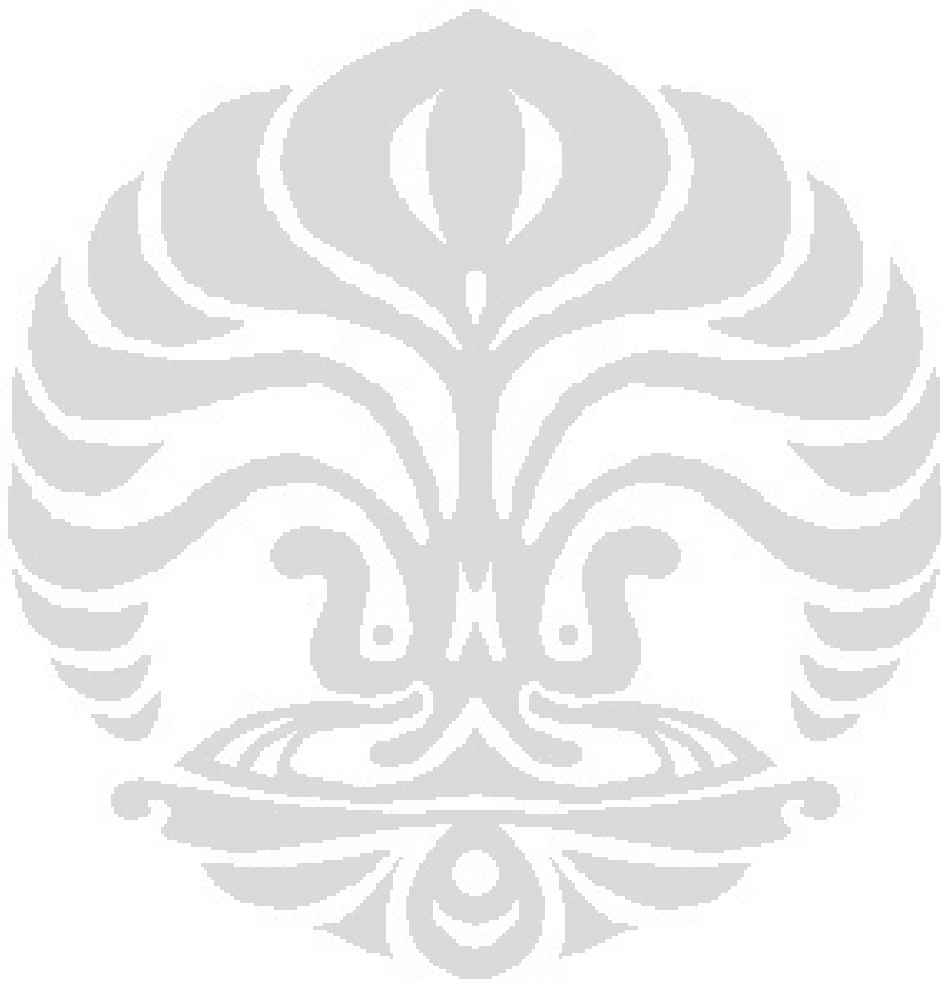
buruk dalam hal ekonomi, Soeharto kan juga punya *pressure* pun ekonomi kita bagus pada saat itu tetapi ketika kemudian kita menggunakan demokratisasi sebagainya itu kemudian jamannya BJ Habiebie misalnya, karena memang kondisi ekonomi lagi lumpuh ya lumpuh lah, jadi kita tdiak dapat mengatakan itu berhasil apa tidak dari sesuatu yang keliatan, jadi perspektif andan dengan saya itu berbeda karena saya mengikuti proses *governance* nya seperti apa dan saya nilai, dan itulah yang saya masukkan ke dalam penelitian saya, seperti itu. Jadi saya melihat dari prosesnya seperti apa, bukan sekedar oke saya berhasil memindahkan ini dan sudah selesai, tetapi saya melihat ada apa dibalik prosesnya. Memang berhasil memindahkan iya, berhasil membangun iya, tetapi bagaimana proses itu, proses sampai mereka pindah kesana itu, saya kan melihat yang paling penting disana itulah ada orang yang dipaksa, ada orang yang sudah sampai disana ternyata tidak seperti yang diharapkan akhirnya mereka tergusur, karena mereka tidak mampu bertahan dan sebagainya, kemudian juga kenapa kelompok ini bisa di atas dan kenapa kelompok ini bisa dibawah, rantai bawah pasti lebih laku dibanding di atas yang cenderung sedikit didatengi orang itu kan juga bentuk-bentuk proses, mengapa si ini ditempatkan disana dan mengapa si X ditempatkan disana, dan saya juga mendengar itu juga katanya undian, itu undian, tapi saya melihat orang-orang yang menentang, cenderung ditempatkan di atas.”

Peneliti : “Jadi menurut Bapak sendiri yang sidah mengamati, mengapa PKL-PKL tersebut sampai mau direlokasi?”

Narasumber : “Jadi gini, eee Jokowi kan seringkali mengatakan kaya relokasi di Manahan juga ya, poko’e, “Kalau ga manut saya ya ilang gitu loh”, kata ilang dalam bahasa Jawa itu bisa dikatakan macem-macem loh Mbak, ilang bisa karena digusur, ilang karena ga punya hak-haknya lagi mungkin karena PKL sendiri kan punya pikiran oportunis

sebenarnya lebih baik saya ikut daripada saya ilang samasekali, jadi ya yang penting saya dapat kios, walaupun katakanlah mungkin untuk akan dijual kembali, seperti itu, sehingga mengapa kemudian mereka mau, karena PKL sendiri kan ada motif ekonominya juga, tapi pemerintah juga punya kepentingan, dia ingin mewujudkan kota Solo yang bersih yang bebas dari segala kekumuhan, sehingga mereka akan melakukan berbagai cara, dengan dana yang besar, maka dilakukanlah itu apalagi itu merupakan momentum pertama Jokowi memerintah Solo, sehingga ia ingin bagaimana keberhasilan itu ingin dilihat oleh orang banyak, karena itulah popularitas itu akan meningkat, itulah faktanya dia sudah berhasil dalam tanda petik memindahkan itu kan menjadi rujukan orang banyak tetapi kan bagaimana prosesnya itu yang tidak dilihat, yang paling bisa dilakukan orang lain pertama itu adalah dia punya uang ngga, dia punya tempat ngga, hanya itu, kalau itu bisa dilihat tapi budayanya, prosesnya, ada ngga kemungkinan mereka punya ee sikap politik seperti orang solo, karena saya lihat itu tingkat politiknya PKLnya Solo itu sudah matang sekali, mereka banyak yang terjun ke dunia-dunia politik, maka bagaimana mereka berpolitik itu luar biasa, saya melihat ketikan saya meneliti di Semarang, beda pola pikir PKL di Solo dengan Semarang, di Semarang itu pola pikir PKL nya lebih sederhana, mereka cenderung lebih manut, kalau di Solo ngga, mereka punya kekuatan politik sendiri yang bisa digunakan untuk balikin, untuk tawar-menawar dengan pemerintah, maka kemudian mengapa mereka mau pindah kesana asal dengan syarat ini ini ini maka muncullah dana sekitar 10 milyar untuk membangun itu, dan pemerintah juga punya kepentingan, misalnya pemerintah punya kepentingan bagaimana mereka terlihat berhasil, maka dana berapapun diupayakan untuk dilakukan, jadi mereka sama-sama punya kepentingan, pemerintah ingin dilihat berhasil, PKL juga kalau gamau ya hilanglah hak saya, akses saya, apalagi pemerintah sudah

mengatakan bahwa kalau kamu pergi gamau, berarti kamu ilang, kalau sudah ilang berarti yaudah mereka gapunya hak-hak lagi, digusur dan gapunya akses untuk mendapatkan kios secara gratis, seperti itu.”



Lampiran 14

Verbatim Masyarakat

Nama : (1) Joko Pramono (Ketua RW Daerah Monumen '45 Banjarsari)

(2) Sukatno (Ketua Linmas Daerah Monumen '45 Banjarsari)

Lokasi : Monumen '45 Banjarsari

Waktu : Kamis/5 April 2012 pukul 13.30.

Peneliti : “Bagaimana kondisi Monjari sebelum relokasi PKL?”

Narasumber 1 : “Sebelum relokasi itu memang keadaannya kumuh, sehingga eh penataan itu sampe depan rumah aja ga bisa parkir sulit ditata dan banyak kerawanan tentang kejahatan dan banyak malempun banyak PSK maupun sarang banci-banci ya mbak disini. Sehingga dulu disini hampir ada 1000 PKL disini karena sekitaran jalan disini itu pasti ada PKL disetiap jalannya.”

Peneliti : “Bapak warga sini ya?”

Narasumber 1 : “Saya selaku warga sini juga bisa.”

Peneliti : “Terus pas sudah direlokasi, bagaimana dampaknya terhadap warga sini pak?”

Narasumber 1 : “Setelah direlokasi, banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh warga, terutama di lingkungan sini saja, di lingkungan rumah, sehingga kita dapat pemandangan lepas, karena sudah tidak tertutup oleh adanya kios-kios PKL. Yang kedua, kita dapat menghirup udara segar, karena apa, disini banyak penghijauan di Monumen Banjarsari, sehingga sekarang itu banyak orang-orang yang merasa penat itu datang kesini atau istirahat disini untuk menghilangkan rasa penat, begitu. Yang ketiga, yang untuk olahraga anak-anak sekolah, sehingga dapat berolahraga disini, sehingga ini banyak sekali yang sudah dirasakan oleh masyarakat, tentang kebersihan, kesehatan, dan mungkin adanya Linmas, itu PSK pun sudah berkurang sekali, bahkan tidak ada, dan bancipun malampun tidak ada, memang disini banyak dijaga oleh linmas,

dengan adanya linmas ini bisa membantu warga masyarakat, karena lingkungan banjarsari ini juga merupakan kawasan tertib, ya ini, kita khususnya warga mengucapkan terimakasih dengan adanya relokasi ini.”

Peneliti : “Bapak (linmas) mau nambahin?”

Narasumber 2 : “Oh tidak, sama saja kaya bapak ini.”

Peneliti : “Oh yaudah, trus sebenarnya ada tidak sih pak bentuk dukungan dari warga sekitar terhadap program relokasi ini?”

Narasumber 1 : ‘Oh ya ada, karena program ini bangkit kan memang pertama dari warga dulu, itu memang program dari pemkot, tapi terutama itu diusulkan dari tingkat RT, RW, lalu dibawa ke Kelurahan dan diberangkatkan ke Pemkot, sehingga Pemkot itu sendiri tidak ada beban karena didukung oleh masyarakat, terutama RT, RW dan lingkungan memang sudah ada pembahasan dulu, lalu diadakan pendekatan, kalau tidak ada dukungan dari warga sekitar, otomatis nanti PKL itu anu mungkin ada reaksi tapi sehinga itu ada pendekatan dari pejabat sendiri, lingkungan juga dilibatkan, sehingga pendekatannya memang baik sekali.

Peneliti : “Sebenarnya program relokasi yang berhasil seperti di Solo ini dapat diterapkan di daerah lain tidak?”

Narasumber 1 : “Saya kira untuk diterapkan di kota lain, di daerah lain itu bisa, selama itu ee seperti dari pimpinan sendiri, walikota, seperti Pak Jokowi dan Pak Rudi, keberhasilan melalui jajarannya. Selama itu diajak komunikasi, itu saya kira bisa, diajak komunikasi, sehingga ada solusi, bagaimana kita menempatkan, basa jowo kita wongke, terkadang tanpa adanya komunikasi langsung direlokasi atau dibubarkan, sehingga akan terjadi gejolak, mungkin DKI sana mudah-mudahan berhasil disana.”

Peneliti : “Kalau untuk keberlanjutan ketertiban disini itu, dari masyarakat itu ngapain pak?”

Narasumber 1 : “Dari masyarakat kita ikut menjaga kebersihan, dalam arti ee e dalam waktu tiga bulan sekali dengan kelurahan, RT/RW, PKK

Linmas dan sebagainya, warga, melibatkan harus saling gotong royong dalam masalah kebersihan. Kalau tentang keamanan, mungkin karena adanya Linmas, warga sifatnya mungkin memberitahu, sehingga masyarakat merasa hak milik saling perduli, oh ini ada pengrusakan ada ini, misalkan ada orang istilahnya nyampirkeun memean, atau jemur kain di pagar, warga tau, mungkin Linmas belum tau, jadi nanti warga yang memberitahu Linmas, tegor nanti Linmas yang bergerak kesana, ditegor jangan ditaruh disitu, karena mengganggu keindahan, nah itu juga salahsatu bentuk kepedulian untuk menyalurkannya.”

Peneliti : “Satpol PP setiap hari patroli kesini pak?”

Narasumber 2 : “Satpol PP memang kadang kesini, tapi memang setiap hari juga bisa, karena sekarang, dengan adanya Linmas, mungkin dulu PKL masuk, masuk kita tegur oleh Linmas, keluar masih dekat dengan pager, baru kita tegur lagi, saya kira harus dengan pendekatan dahulu kita keluarkan dulu, setelah keluarkan kok anu, setelah Linmas maju, baru Satpol PP, pendekatan, nanti keluarahan, kalau nanti masih tidak anu, baru Satpol PP. Jadi dari bawah dulu nanti ke atas gitu. Jadi Satpol PP sini juga sudah memiliki data, dan tidak serta-merta mereka langsung merelokasi, mereka juga melalui pendkatan dulu, diperingatkan, nah baru. Selama itu ada komunikasi, saya kira bisa, diterapkan di kota lain juga bisa.”

Peneliti : “Oh yasudah pak itu saja. Terima kasih.”

Nama : Mukhlis

Lokasi : Pasar Klithikan Notoharjo

Waktu : Senin, 9 April 2012 pukul 13.45 WIB

Peneliti : “Kenapa milih belanja di Pasar ini mas?”

Narasumber : “Komplit mbak.”

Peneliti : “Setelah direlokasi dari Monjari itu mas ngerasa lebih bermanfaat ga sih disini? Maksudnya untuk kenyamanannya gitu?”

Narasumber : “Ya enak disini, komplit dan banyak pilihan.”

Peneliti : “Jadi mas kalo lagi butuh bahan-bahan Klithikan langsung kesini? Ga kemana-mana lagi?”

Narasumber : “Iya.”

Peneliti : “Makasih ya mas.”

